



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2019



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019



KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD)**

**Kabupaten Bantul
Provinsi DIY
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul Telpn (0274) 367325, 367675
E-mail : inspektorat@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk membetikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan revm yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Bantul, 1..{ April 2020

Inspektur Daerah Kabupaten Bantul



HERMAWAN SETIAJI, SIP/AM.

NIP. 197403221993111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban Bupati Bantul sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama Tahun 2019. Selain itu, laporan ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan buku laporan ini telah disesuaikan dengan sistematika yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6977/OTDA tertanggal 31 Desember 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Buku laporan ini dapat disusun atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terkait, baik dalam penyediaan, pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga menyadari bahwa buku laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharap kritik, saran dan evaluasi dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bantul, 31 Maret 2020



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	2
C. Kondisi Geografis Daerah	2
D. Gambaran Umum Demografis	10
a. Jumlah Penduduk.....	10
b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	13
c. Struktur Usia.....	15
d. Jenis Pekerjaan	17
e. Pendidikan	18
E. Kondisi Ekonomi.....	19
1. Potensi Unggulan Daerah	19
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	26
F. Indikator Kinerja Makro.....	29
1. Indeks Pembangunan Manusia	29
2. Angka Kemiskinan	30
3. Angka Pengangguran.....	32
4. Pertumbuhan Ekonomi	33
5. Pendapatan Per Kapita.....	34
6. Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>).....	35
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).....	37

A. Visi dan Misi.....	39
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	45
C. Prioritas Daerah	56
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69
A. Urusan Konkuren	69
a. Ringkasan Urusan Wajib	69
b. Ringkasan Urusan Pilihan.....	144
B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan dan Fungsi Penunjang lainnya)	161
1. Perangkat Daerah Pelaksana	161
2. Program dan Kegiatan.....	162
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	195
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	199
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	201
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan	201
7. Permasalahan dan Solusi.....	202
C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)	209
1. Perangkat Daerah Pelaksana	209
2. Program dan Kegiatan.....	209
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	212
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	213
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	213
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan	214

7. Permasalahan dan Solusi	214
D. Indikator kinerja kunci	214
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019.....	215
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	221
A. Tugas Pembantuan yang Diterima.....	221
1. Dasar Hukum	221
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	221
3. Program dan Kegiatan	221
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	222
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan	223
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	224
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.	224
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).....	225
9. Permasalahan dan Solusi	225
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan.....	225
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	227
A. Kerja Sama Antar Daerah.....	227
1. Daerah yang Diajak Kerja Sama	227
2. Dasar Hukum	230
3. Bidang Kerja Sama.....	231
4. Nama Kegiatan	232
5. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah.....	232
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.	233
7. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	234
8. Jangka Waktu Kerja Sama.....	235

9. Hasil (<i>Output</i>) dari Kerja Sama	236
10. Permasalahan dan Solusi.....	236
11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.....	236
B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	247
1. Mitra yang Diajak Kerja Sama.....	247
2. Dasar Hukum	250
3. Bidang Kerja Sama	251
4. Nama Kegiatan.....	253
5. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah	253
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan .	254
7. Sumber dan Jumlah Anggaran	255
8. Jangka Waktu Kerja Sama	256
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah	290
1. Forum Koordinasi	290
2. Materi Koordinasi	290
3. Instansi Vertikal yang Terlibat.....	291
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	291
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	291
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan .	292
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan	292
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi	292
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.....	293
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	293
D. Pembinaan Batas Wilayah	293
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi	294
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian	295

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah.....	296
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.	297
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	297
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	297
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten//Kota)	299
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	299
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	300
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana.....	302
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.	302
7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana.....	302
8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi	304
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	305
1. Jenis Kawasan Khusus	305
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya	310
3. Sumber Anggaran	310
4. Permasalahan yang dihadapi	311
5. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Menangani Kawasan Khusus	311
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.	311
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	312
1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya).....	312
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani	312
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.	312
4. Penanggulangan dan Kendalanya	313
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.....	315

6. Sumber dan Jumlah Anggaran	316
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	317
7.1. Urusan Pendidikan.....	317
7.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	317
7.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	317
7.1.3. Realisasi	318
7.1.4. Alokasi Anggaran	319
7.1.5. Dukungan Personil.....	319
7.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	320
7.2. Urusan Kesehatan	322
7.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	322
7.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	324
7.2.3. Realisasi	324
7.2.4. Alokasi Anggaran	329
7.2.5. Dukungan Personil.....	331
7.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	332
7.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	333
7.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	333
7.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	333
7.3.3. Realisasi	334
7.3.4. Alokasi Anggaran	334
7.3.5. Dukungan Personil.....	336
7.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	338
7.4. Urusan Perumahan Rakyat	340
7.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	340
7.4.3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	341
7.4.4. Realisasi	341

7.4.5. Alokasi Anggaran	342
7.4.6. Dukungan Personil	343
7.4.7. Permasalahan dan Solusi	343
7.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	344
7.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	344
7.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	346
7.5.3. Realisasi.....	347
7.5.4. Alokasi Anggaran	356
7.5.5. Dukungan Personil	358
7.5.6. Permasalahan dan Solusi	361
7.6. Urusan Sosial	364
7.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	364
7.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	364
7.6.3. Realisasi.....	365
7.6.4. Alokasi Anggaran	369
7.6.5. Dukungan Personil	369
7.6.6. Permasalahan dan Solusi	369
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH ...	371
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	372
B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.....	373
C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	375
D. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	377
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	379
F. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.....	387

BAB IX PENUTUP411

LAMPIRAN :

IKK.III.1 : Tataran Pengambil Kebijakan

IKK.III.2 : Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi
Umum

IKK.III.3 : Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian
Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Status Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2019	6
Tabel 1.2.	Tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 ..	8
Tabel 1.3.	Luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Bantul Tahun 2019	9
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kecamatan.....	11
Tabel 1.5.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Per Kecamatan Tahun 2015-2019 dalam satuan jiwa/km ²	12
Tabel 1.6.	Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2019..	13
Tabel 1.7.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019	13
Tabel 1.8.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Tahun 2019	14
Tabel 1.9.	Komposisi Usia Penduduk Pada Tahun 2015-2019	15
Tabel 1.10.	Penduduk berdasarkan jenis lapangan pekerjaan utama	18
Tabel 1.11.	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai.....	20
Tabel 1.12.	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	21
Tabel 1.13.	Produksi perikanan Tahun 2017 – 2019 dalam Ton.....	21
Tabel 1.14.	Peningkatan Kunjungan Wisata Tahun 2019	23
Tabel 1.15.	Daya tarik wisata dan usaha wisata Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2019.....	24
Tabel 1.16.	Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2018 & 2019	25
Tabel 1.17.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019	28
Tabel 1.18.	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2019.....	29
Tabel 1.19.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia	30

Tabel 1.20.	Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2014 - 2019	30
Tabel 2.21.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul.....	42
Tabel 2.22.	Target Pencapaian Sasaran dan Realisasi Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	43
Tabel 2.23.	Matrik Analisa SWOT	48
Tabel 2.24.	Strategi dan arah kebijakan	53
Tabel 2.25.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	57
Tabel 3.26.	Kategori dan jenis urusan wajib, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019.....	73
Tabel 3.27.	Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, pejabat struktural dan fungsional dalam pelaksanaan urusan wajib di Kabupaten Bantul	127
Tabel 3.28.	Alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 pada penyelenggaraan urusan wajib	130
Tabel 3.29.	Permasalahan dan solusi pada pelaksanaan urusan wajib.....	133
Tabel 3.30.	Jenis urusan pilihan, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019.....	146
Tabel 3.31.	Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada urusan pilihan di Kabupaten Bantul.....	155
Tabel 3.32.	Alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 pada penyelenggaraan urusan pilihan	157
Tabel 3.33.	Permasalahan dan solusi pada penyelenggaraan urusan pilihan.	158
Tabel 3.34.	Jenis urusan penunjang, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan pada urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019.....	163

Tabel 3.35.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada urusan penunjang pemerintahan daerah	196
Tabel 3.36.	Alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan.....	200
Tabel 3.37.	Permasalahan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.....	202
Tabel 3.38.	OPD pelaksana, serta program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019	211
Tabel 3.39.	Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	212
Tabel 3.40.	Jumlah pejabat struktural dan fungsional di Kantor Kesatuan bangsa dan Politik.....	212
Tabel 3.41.	Permasalahan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	214
Tabel 4.42.	Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Prioritas Pembangunan DIY dan Nasional.....	217
Tabel 4.43.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tugas Pembantuan Kabupaten Bantul Tahun 2019.....	222
Tabel 4.44.	Program, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan dalam Tugas Pembantuan.....	224
Tabel 5.45.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	225
Tabel 5.46.	Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pembantuan.....	225
Tabel 6.47.	Mitra Kerja Sama dan Bentuk Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.....	229
Tabel 6.48.	Bidang dan Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.....	231

Tabel 6.49.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	234
Tabel 6.50.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.....	234
Tabel 6.51.	Data Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.....	237
Tabel 6.52.	Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.....	245
Tabel 6.53.	Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.....	246
Tabel 6.54.	Mitra Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.	248
Tabel 6.55.	Bidang dan Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pihak Ketiga Tahun 2019	251
Tabel 6.56.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	254
Tabel 6.57.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.....	255
Tabel 6.58.	Perikatan Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dunia Usaha/Pihak Ketiga Tahun 2019	257
Tabel 6.59.	Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan,, Sekretariat Daerah Kabupaten.....	292
Tabel 6.60.	Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan,, Sekretariat	

	Daerah Kabupaten Bantul.....	297
Tabel 6.61.	Kejadian dan Lokasi Bencana tahun 2019	298
Tabel 6.62.	Tren kejadian bencana Tahun 2013 - 2018	302
Tabel 6.63.	Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	302
Tabel 6.64.	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.....	304
Tabel 6.65.	Permasalahan dan Solusi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Khusus	311
Tabel 6.66.	Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di DPUPKP Kabupaten Bantul	312
Tabel 6.67.	Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul...	313
Tabel 7.68.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator pada Bidang Pendidikan	317
Tabel 7.69.	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan.....	318
Tabel 7.70.	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	318
Tabel 7.71.	Alokasi dan realisasi anggaran pemenuhan SPM bidang Pendidikan	319
Tabel 7.72.	Dukungan personil berdasarkan kualifikasi pendidikan pada pemenuhan SPM bidang pendidikan	320
Tabel 7.73.	Golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional yang mendukung pemenuhan SPM bidang pendidikan	320
Tabel 7.74.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan	323
Tabel 7.75.	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	324
Tabel 7.76.	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan	325
Tabel 7.77.	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan.....	329
Tabel 7.78.	Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan.....	332
Tabel 7.79.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan	

	Umum	333
Tabel 7.80.	Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	334
Tabel 7.81.	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	334
Tabel 7.82.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum .	335
Tabel 7.83.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan Tahun 2019.....	337
Tabel 7.84.	Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP	337
Tabel 7.85.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat	341
Tabel 7.86.	Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	341
Tabel 7.87.	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	342
Tabel 7.88.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	342
Tabel 7.89.	Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	346
Tabel 7.90.	Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	347
Tabel 7.91.	Jenis Ancaman dan Jumlah Penduduk Terpapar	349
Tabel 7.92.	Tabel Kelas Ancaman	349
Tabel 7.93.	Pemasangan Rambu evakuasi dan papan informasi publik	351
Tabel 7.94.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana.....	353
Tabel 7.95.	Alokasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	356
Tabel 7.96.	Alokasi Anggaran Sub Urusan Bencana.....	357
Tabel 7.97.	Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebakaran	357
Tabel 7.98.	Permasalahan dan Solusi pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	361
Tabel 7.99.	Permasalahan dan Solusi pada Sub Urusan Bencana	362
Tabel 7.100.	Permasalahan dan Solusi pada Sub Urusan Kebakaran	363
Tabel 7.101.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang	

Sosial	364
Tabel 7.102. Target Capaian SPM Bidang Sosial	364
Tabel 7.103. Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	365
Tabel 7.104. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial.....	369
Tabel 8.105. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	371
Tabel 8.106. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	372
Tabel 8.107. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.....	374
Tabel 8.108. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.....	376
Tabel 8.109. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan dengan target RPJMD.....	378
Tabel 8.110. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019*	380
Tabel 8.111. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.....	381
Tabel 8.112. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019.	381
Tabel 8.113. Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	384
Tabel 8.114. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	386
Tabel 8.115. Jumlah Program Kegiatan per IKU Sasaran Strategis yang Didukung	388
Tabel 8.116. Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	390

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Bantul, 2019)	3
Grafik 1.2.	Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul (Sumber: Bantul Dalam Angka BPS, 2019).....	5
Grafik 1.3.	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 (Sumber: Disdukcapil 2019, data diolah).....	10
Grafik 1.4.	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Sumber: Disdukcapil 2019, data diolah).....	16
Grafik 1.5.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2019 (Sumber: Disdukcapil 2019, data diolah).....	18
Grafik 1.6.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS 2019, diolah).....	27
Grafik 1.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 (Sumber: BPS, 2019).....	32
Grafik 1.8.	Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (juta rupiah) Tahun 2015-2019 (sumber: BPS, 2019).....	35
Grafik 1.9.	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS 2020, diolah).....	36
Grafik 3.10.	Jumlah dan Persentase OPD Pelaksana Urusan Wajib di Kabupaten Bantul	71
Grafik 3.11.	Jumlah indikator urusan wajib lama dan baru di LPPD Tahun 2019	124
Grafik 3.12.	Perbandingan nilai dan skoring capaian IKK urusan wajib tahun 2018 dengan 2019.....	125
Grafik 3.13.	Jumlah indikator urusan pilihan lama dan baru di LPPD Tahun 2019.....	152
Grafik 3.14.	Perbandingan nilai dan skoring capaian IKK urusan pilihan tahun 2018 dengan 2019.....	153

Grafik 6.15.	Anggaran dan Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Tahun 2019 (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)	235
Grafik 6.16.	Persentase Jumlah Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)	245
Grafik 6.17.	Persentase Jumlah Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019. (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)....	246
Grafik 6.18.	Persentase Jumlah Mitra Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019. (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)....	248
Grafik 6.19.	Anggaran dan Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Tahun 2019	256
Grafik 7.20.	Sebaran SDM Menurut Tingkat Pendidikan.....	343
Grafik 7.21.	Kunjungan Website dan Pengikut Media OSsial tahun 2019 ...	350
Grafik 7.22.	Kejadian Bencana	355
Grafik 7.23.	Sebaran SDM Menurut Tingkat Pendidikan pada Sub Urusan Bencana.....	358
Grafik 7.24.	Sebaran Satgas Menurut Tingkat Pendidikan	359
Grafik 7.25.	Sebaran Satgas Menurut Jenis Kelamin.....	359
Grafik 7.26.	Sebaran Kompetensi Satgas PBK	360
Gambar 7.27.	Peta Wilayah Manajemen Kebakaran	360
Gambar 7.28.	Foto Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial	368
Grafik 8.29.	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2019.....	375
Grafik 8.30.	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Realisasi Tahun 2018	377
Grafik 8.31.	Hasil pengukuran capaian tahun 2019 dibandingkan dengan target RPJMD.....	379

Grafik 8.34. Grafik Jumlah Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis (Sumber: Bappeda, BKAD 2019, data diolah).....	388
--	-----

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah *Vortenlanden* yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu **Bantulkarang** untuk kawasan selatan, **Denggung** untuk kawasan utara, dan **Kalasan** untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal **20 Juli 1831** atau **Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa)** secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama **Bantulkarang**. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama **Raden Tumenggung Mangun Negoro** kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal penetapan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantul (20 Juli) diperingati sebagai **Hari Jadi Kabupaten Bantul** setiap tahunnya. Selain itu, tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul, mengingat Perang Diponegoro

dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan *Stadsgemente Ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

B. Gambaran Umum Daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

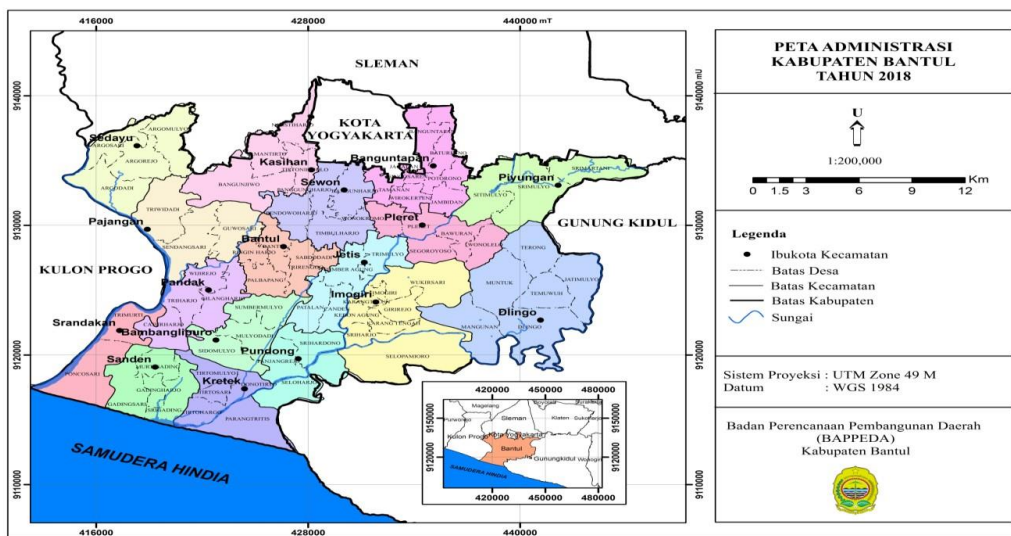
C. Kondisi Geografis Daerah

Kondisi geografis merupakan salah satu kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek kewilayahan. Kondisi geografis memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan potensi pengembangan wilayah. Melalui informasi terkait kondisi geografis diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima

kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas administratif (lihat **Gambar 1.1**) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Bantul, 2019)

Perbatasan wilayah administratif dengan kabupaten lain telah terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan batas wilayah administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permendagri penetapan batas tersebut masih perlu untuk diperbaharui. Pilar yang telah terpasang sebagai rangkaian tahap penegasan batas yang telah ditetapkan dalam permendagri masih relatif jauh jarak antar pilarnya sehingga belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas. Kabupaten Bantul bersama dengan Kabupaten/Kota di DIY yang berbatasan telah melaksanakan kegiatan perapatan pilar batas dalam upaya untuk pemutakhiran batas administrasi.

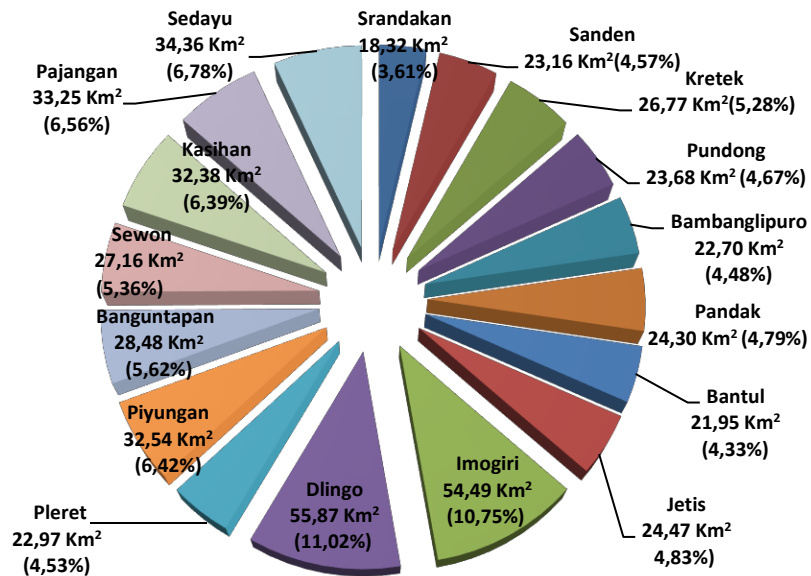
Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe, S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S. Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S. urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km² (15,91% dari

luas DIY) dan terbagi atas 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km² (11,02%) sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan yaitu 18,32 Km² (3,61%).Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada **Grafik 1.2**.

Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 desa dan 933 pedukuhan dengan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terletak di Kecamatan Imogiri, yaitu 8 desa dan 72 pedukuhan. Sedangkan kecamatan dengan dengan jumlah desa dan pedukuhan paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan, yaitu 2 desa dan 43 pedukuhan.

Berdasarkan statusnya, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) sebanyak 41 desa dan desa perkotaan (urban area) sebanyak 34 desa. Secara rinci status desa di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada **Grafik 1.2**.



Grafik 1.2. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul (Sumber: Bantul Dalam Angka BPS, 2019)

Tabel 1.1. Status Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Kecamatan	Status Desa			
		Desa Perdesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Srandakan	Poncosari (24 dusun)	11,86	Trimurti (19 dusun)	6,46
2	Sanden	Sri Gading(20 dusun)	7,57	Gadingsari (18 dusun)	8,12
				Gadingharjo (6 dusun)	3,08
				Murtigading (18dusun)	4,39
3	Kretek	Tirtohargo (6 dusun)	3,62	Donotirto (13dusun)	4,70
		Parangtritis (11 dusun)	11,87		
		Tirtosari(7 dusun)	2,39		
		Tirtomulyo (15 dusun)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 dusun)	11,10	Srihardono (17 dusun)	6,87
		Panjang Rejo(16 dusun)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumber Mulyo(16 dusun)	8,20	Sidomulyo (15 dusun)	8,05
				Mulyodadi (14dusun)	6,45
6	Pandak	Caturharjo (14dusun)	5,93	Wijirejo (10dusun)	4,68
		Triharjo (10dusun)	6,43		
		Gilangharjo (15dusun)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 dusun)	8,78	Triwidadi (22 dusun)	12,71
				Sendangsari (18 dusun)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 dusun)	2,32	Palbapang (10 dusun)	5,52
				Ringinharjo (6 dusun)	2,77
				Bantul (12 dusun)	5,24
				Trirenggo (17 dusun)	6,10
9	Jetis	Patalan (20 dusun)	5,65	Trimulyo (12 dusun)	7,11
		Canden (15 dusun)	5,36	Sumber Agung (17 dusun)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro(18 dusun)	22,75	Kebonagung (5)	1,87
		Sriharjo (13 dusun)	6,32	Karangtalun (5 dusun)	1,21
		Karangtengah (6 dusun)	2,88	Imogiri (4 dusun)	0,83
				Wukirsari (16 dusun)	15,39
				Girirejo (5 dusun)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 dusun)	9,52	Dlingo (10 dusun)	9,16
		Muntut (11 dusun)	12,85		
		Temuwuh (12 dusun)	7,67		
		Jatimulyo (10 dusun)	8,91		
		Terong (9 dusun)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 dusun)	3,75	Baturetno (8 dusun)	3,94
		Jagalan (2 dusun)	0,27	Banguntapan (11 dusun)	8,33
		Singosaren (5 dusun)	0,67		
		Wirokerten (8 dusun)	3,86		
		Jambidan (7 dusun)	3,76		
		Potorono (9 dusun)	3,90		

No	Kecamatan	Status Desa			
		Desa Perdesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
13	Pleret	Bawuran (7 dusun)	4,97	Wonokromo (12 dusun)	4,34
		Wonolelo (8 dusun)	4,54	Pleret (11)	4,25
		Segoroyoso (9 dusun)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 dusun)	9,40	Srimulyo (22 dusun)	14,56
				Srimartani (17 dusun)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo(16 dusun)	6,98	Bangunharjo (17 dusun)	6,79
		Timbulharjo (16 dusun)	7,78	Panggungharjo (14 dusun)	5,61
16	Kasih	Tamantirto (10 dusun)	6,72	Tirtonirmolo (12 dusun)	5,13
		Ngestiharjo (12 dusun)	5,10		
		Bangunjiwo (19 dusun)	15,43		
17	Sedayu	Argodadi (14 dusun)	11,21	Argosari (13 dusun)	6,37
		Argomulyo (14 dusun)	9,55	Argorejo (13 dusun)	7,23
Jumlah		41 desa	289,66 (28.966 ha)	34 desa	217,19 (21.719 ha)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (diolah), 2019

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari;
- Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
- Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material

vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;

- Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki kemiringan 0 – 2% (seluas 31.425 ha atau 62% dari luas wilayah Kabupaten Bantul) yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara, lihat **Tabel 1.2**. Wilayah timur dan barat umumnya memiliki kemiringan 2% hingga 40% dengan luas sebesar 15.251 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40%. Wilayah yang memiliki lahan miring diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar dengan kemiringan kurang dari 2% terletak di Kecamatan Sedayu, Banguntapan, dan Sewon.

Tabel 1.2. Tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas kemiringan tanah/lereng (ha)						Jumlah
		0 – 2%	2 - 8%	8-15%	15–25%	25–40%	>40%	
1	Srandakan	1.680	152	-	-	-	-	1.832
2	Sanden	2.100	216	-	-	-	-	2.316
3	Kretek	1.883	288	-	27	11	468	2.677
4	Pundong	1.387	171	-	90	108	612	2.368
5	Bambanglipuro	2.198	72	-	-	-	-	2.270
6	Pandak	2.124	306	-	-	-	-	2.430
7	Pajangan	815	661	1.046	162	394	247	3.325
8	Bantul	2.180	-	-	15	-	-	2.195
9	Jetis	2.192	81	-	144	-	30	2.447
10	Imogiri	1.436	585	279	900	954	1.295	5.449
11	Dlingo	72	1.946	268	572	1.433	1.296	5.587
12	Banguntapan	2.848	-	-	-	-	-	2.848
13	Pleret	873	431	365	55	547	26	2.297
14	Piyungan	2.129	702	-	-	423	-	3.254
15	Sewon	2.708	-	-	8	-	-	2.716
16	Kasih	2.262	-	598	182	161	35	3.238
17	Sedayu	2.538	227	300	138	233	-	3.436
TOTAL		31.425	5.838	2.856	2.293	4.264	4.009	50.685

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul sebagian besar kurang dari 100 meter dari permukaan laut, yaitu seluas 39.932 Ha, sedang sisanya sebesar 10.753 Ha memiliki ketinggian 100–500 meter dari permukaan laut yang sebagian besar terletak di Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Piyungan. Wilayah di Kabupaten Bantul yang didominasi dengan ketinggian 100–500 meter adalah Kecamatan Dlingo, sedangkan kecamatan Imogiri dan Piyungan memiliki luas yang hampir sama antara wilayah dengan ketinggian dibawah 100 meter dan wilayah dengan ketinggian 100-500 meter, lihat **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3. Luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl)					Jumlah
		0 – 7m	7 – 25m	25–100m	100-500m	>500m	
1.	Srandakan	1.05	776	-	-	-	1.832
2.	Sanden	1.235	1.081	-	-	-	2.316
3.	Kretek	924	1.462	190	101	-	2.677
4.	Pundong	-	1.930	239	199	-	2.368
5.	Bambanglipuro	-	1.482	788	-	-	2.270
6.	Pandak	-	1.312	1.118	-	-	2.430
7.	Pajangan	-	221	2.652	452	-	3.325
8.	Bantul	-	-	2.195	-	-	2.195
9.	Jetis	-	-	2.436	11	-	2.447
10.	Dlingo	-	-	815	4.772	-	5.587
11.	Banguntapan	-	-	2.373	475	-	2.848
12.	Pleret	-	-	1.952	345	-	2.297
13.	Piyungan	-	-	1.907	1.347	-	3.254
14.	Sewon	-	-	2.716	-	-	2.716
15.	Kasih	-	-	2.608	630	-	3.238
16.	Sedayu	-	-	3.287	149	-	3.436
17.	Imogiri	-	791	2.386	2.272	-	5.449
TOTAL		3.215	9.055	27.662	10.753	-	50.685

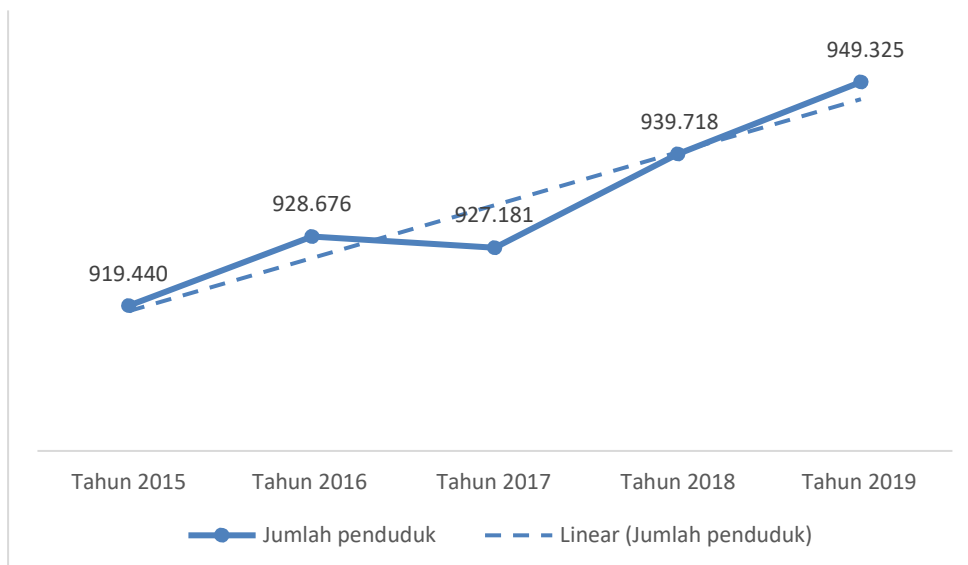
Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

D. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul memperlihatkan tren peningkatan, lihat **Grafik 1.3**. Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 919.440 jiwa, turun di tahun 2017 dan meningkat lagi di tahun 2018 hingga pada tahun 2019 mencapai 949.325 jiwa.

Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul per kecamatan tersaji pada **Tabel 1.4**: Dilihat dari data ini, persebaran penduduk di Kabupaten Bantul memperlihatkan sebaran yang tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di wilayah kecamatan yang memiliki jarak relatif dekat dan berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang menjadi pusat daya tarik di DIY. Wilayah tersebut antara lain seperti Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Jumlah penduduk berkurang seiring dengan peningkatan jarak terhadap Kota Yogyakarta.



Grafik 1.3. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 (Sumber: Disdukcapil 2019, data diolah)

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Srandakan	31.301	31.244	31.276	31.164	31.218
2	Sanden	32.702	32.494	31.924	31.967	31.972
3	Kretek	31.101	31.082	30.837	30.855	30.863
4	Pundong	35.202	35.484	35.448	35.668	35.908
5	Bambanglipuro	41.165	41.385	41.201	41.621	41.880
6	Pandak	51.307	51.770	51.492	51.781	52.013
7	Bantul	63.161	63.124	62.788	63.669	64.365
8	Jetis	57.573	57.474	57.408	58.206	58.549
9	Imogiri	62.299	62.419	62.531	63.179	63.542
10	Dlingo	39.129	38.666	38.502	39.092	39.537
11	Pleret	46.609	46.663	46.825	47.499	48.170
12	Piyungan	50.517	50.846	51.051	51.692	52.333
13	Banguntapan	107.318	107.548	107.596	110.126	111.955
14	Sewon	96.937	97.420	97.034	98.506	99.807
15	Kasih	95.719	100.330	100.222	102.175	103.527
16	Pajangan	34.264	34.674	34.894	35.465	36.040
17	Sedayu	43.136	46.053	46.152	47.053	47.646
Jumlah		919.440	928.676	927.181	939.718	949.325

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul (diolah), 2019

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Data kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 (**Tabel 1.5**) menunjukkan adanya tren peningkatan. Namun demikian ada setidaknya 3 (tiga) kecamatan yang kepadatan penduduknya mengalami penurunan di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2015. Kecamatan tersebut adalah Kretek, Sanden dan Srandakan.

Beberapa kecamatan menunjukkan angka kepadatan penduduk yang cenderung fluktuatif dan beberapa lainnya stabil meningkat. Kecamatan yang stabil mengalami peningkatan diantaranya adalah Imogiri, Piyungan, Pleret, Banguntapan, Pajangan dan Sedayu. Peningkatan ini perlu diwaspadai karena semakin meningkatnya penambahan penduduk, akan meningkatkan potensi alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman dan berimplikasi pada menurunnya potensi daya dukung lingkungan ataupun munculnya permasalahan-

permasalahan lain sebagai eksekusi dari penambahan penduduk.

Tabel 1.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Per Kecamatan Tahun 2015-2019 dalam satuan jiwa/km²

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa/km ²)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Srandakan	1.708,57	1.705,46	1.707,21	1.701,09	1.704,04
2	Sanden	1.412,00	1.403,02	1.378,41	1.380,27	1.380,48
3	Kretek	1.161,79	1.161,08	1.151,92	1.152,60	1.152,90
4	Pundong	1.486,57	1.498,48	1.496,96	1.506,25	1.516,39
5	Bambanglipuro	1.813,44	1.823,13	1.815,02	1.833,52	1.844,93
6	Pandak	2.111,40	2.130,45	2.119,01	2.130,91	2.140,45
7	Bantul	2.877,49	2.875,81	2.860,50	2.900,64	2.932,35
8	Jetis	2.352,80	2.348,75	2.346,06	2.378,67	2.392,68
9	Imogiri	1.143,31	1.145,51	1.147,57	1.159,46	1.166,12
10	Dlingo	700,36	692,07	689,14	699,70	707,66
11	Pleret	2.029,12	2.031,48	2.038,53	2.067,87	2.097,08
12	Piyungan	1.552,46	1.562,57	1.568,87	1.588,57	1.608,27
13	Banguntapan	3.768,19	3.776,26	3.777,95	3.866,78	3.931,00
14	Sewon	3.569,11	3.586,89	3.572,68	3.626,88	3.674,78
15	Kasih	2.956,11	3.098,52	3.095,18	3.155,50	3.197,25
16	Pajangan	1.030,50	1.042,83	1.049,44	1.066,62	1.083,91
17	Sedayu	1.255,41	1.340,31	1.343,19	1.369,41	1.386,67
Rata-rata		1.936,98	1.954,27	1.950,45	1.975,57	1.995,12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul (diolah), 2019

Persebaran penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bantul belum merata. Berdasarkan **Tabel 1.6** terlihat bahwa daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah yang berbatasan dengan kota Yogyakarta antara lain Kecamatan Banguntapan (3.931,00 jiwa/km²), Sewon (3.674,78 jiwa/km²), dan Kasihan (3.197,25 jiwa/km²). Sementara itu, kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (707,66 jiwa/km²). Selain itu, 3 (tiga) kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi juga memiliki luas wilayah yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Dlingo yang memiliki kepadatan penduduk terendah ataupun bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya seperti Imogiri, Sedayu, Pajangan dan Piyungan yang memiliki kepadatan penduduk dibawah rata-rata kepadatan penduduk kabupaten sebesar 1.995,12 jiwa/km² di tahun 2019.

Tabel 1.6. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Srandakan	18,32	31.218	1.704,04
2	Sanden	23,16	31.972	1.380,48
3	Kretek	26,77	30.863	1.152,90
4	Pundong	23,68	35.908	1.516,39
5	Bambanglipuro	22,7	41.880	1.844,93
6	Pandak	24,3	52.013	2.140,45
7	Pajangan	33,25	36.040	1.083,91
8	Bantul	21,95	64.365	2.932,35
9	Jetis	24,47	58.549	2.392,68
10	Imogiri	54,49	63.542	1.166,12
11	Dlingo	55,87	39.537	707,66
12	Banguntapan	28,48	111.955	3.931,00
13	Pleret	22,97	48.170	2.097,08
14	Piyungan	32,54	52.333	1.608,27
15	Sewon	27,16	99.807	3.674,78
16	Kasih	32,38	103.527	3.197,25
17	Sedayu	34,36	47.646	1.386,67
Jumlah/rata-rata		506,85	949.325	1.995,12

Sumber : Disdukcapil dan Bappeda 2019, data diolah

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan berprespektif gender. Kebijakan pada komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Data pada **Tabel 1.7** menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan atau meningkatkan pemberdayaan perempuan didalam kebijakan ekonomi.

Tabel 1.7. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
---------------	------------------------

	2015	2016	2017	2018	2019
Laki-laki	460.075	464.860	462.449	468.135	472.916
Perempuan	459.365	463.816	464.732	471.583	476.409
Jumlah	919.440	928.676	927.181	939.718	949.325

Sumber: Disdukcapil 2019, diolah

Tabel 1.8. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Srandakan	15.505	15.713	31.218
2	Sanden	15.763	16.209	31.972
3	Kretek	15.101	15.762	30.863
4	Pundong	17.658	18.250	35.908
5	Bambanglipuro	20.673	21.207	41.880
6	Pandak	26.112	25.901	52.013
7	Pajangan	18.000	18.040	36.040
8	Bantul	31.988	32.377	64.365
9	Jetis	29.111	29.438	58.549
10	Imogiri	31.583	31.959	63.542
11	Dlingo	19.649	19.888	39.537
12	Banguntapan	55.800	56.155	111.955
13	Pleret	24.246	23.934	48.180
14	Piyungan	26.041	26.292	52.333
15	Sewon	50.183	49.624	99.807
16	Kasih	51.749	51.778	103.527
17	Sedayu	23.754	23.892	47.646
Jumlah/rata-rata		506,85	472.916	476.419

Sumber: Disdukcapil 2019, diolah

Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bantul tidak merata, lihat **Tabel 1.8**. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 55.800 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 51.749 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 50.183 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 56.155 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 51.778 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 49.624 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Kretek sebanyak 15.101 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan

terendah adalah Kecamatan Srandakan sebanyak 15.713 jiwa.

c. Struktur Usia

Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat diterapkan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2015 hingga tahun 2019 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan prosentase berada pada kisaran 60-70%. Kelompok umur muda (0-14 tahun) mengikuti dengan prosentase di kisaran 21-22%. Sementara itu, penduduk kelompok usia lanjut (diatas 64 tahun) memiliki proporsi terkecil. Gambaran proporsi sebaran penduduk berdasarkan komposisi usia sebagaimana tersaji pada **Tabel 1.9**.

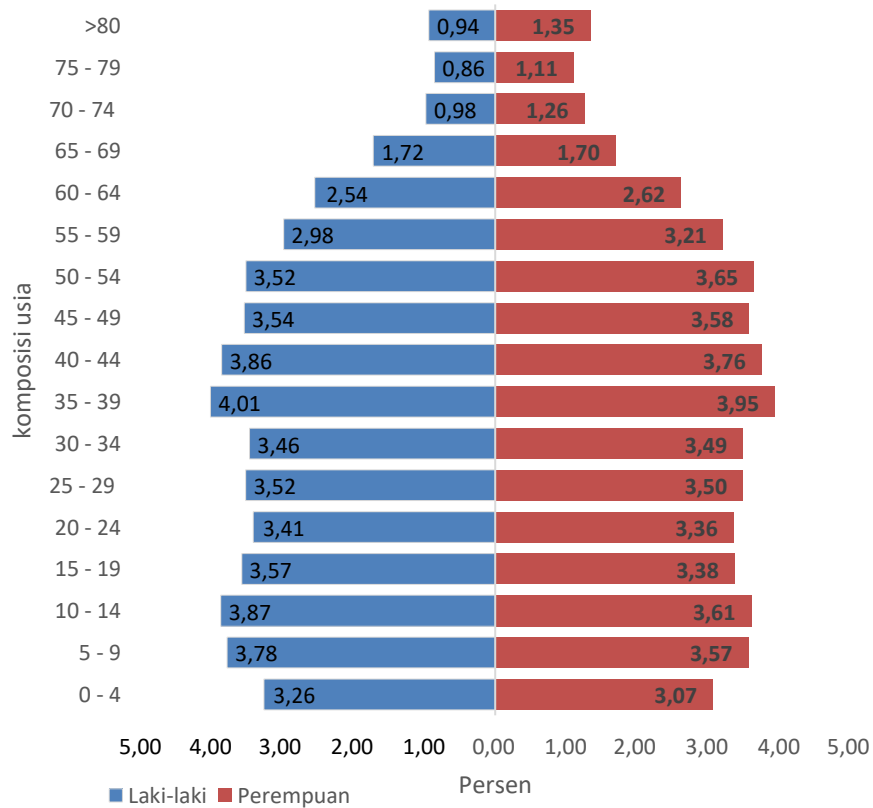
Tabel 1.9. Komposisi Usia Penduduk Pada Tahun 2015-2019

Usia (th)	Jumlah Penduduk									
	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
0 -14	21,53	197.912	21,25	197.308	21,19	196.441	21,13	198.537	21,17	200.936
15 - 65	68,99	634.324	69,00	640.818	68,82	638.072	69,10	649.344	68,93	654.360
> 65	9,48	87.204	9,75	90.550	9,99	92.668	9,77	91.837	9,90	94.029
Jumlah	100	919.440	100	928.676	100	927.181	100	939.718	100	949.325

Sumber: Disdukcapil 2019, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dalam perencanaan pembangunan, untuk kelompok usia muda agar lebih diperhatikan dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar. Sementara kelompok umur produktif yang proporsinya juga cukup besar, kebijakan ekonomi seperti perluasan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan menjadi lebih dominan. Sementara itu penduduk usia lanjut (64 tahun ke atas),

menunjukkan proporsi yang kecil. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Hal ini perlu diantisipasi dari sekarang sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia, serta kebutuhan sosial dasar lainnya.



Grafik 1.4. Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019
(Sumber: Disdukcapil 2019, data diolah)

Grafik piramida penduduk pada **Grafik 1.4** semakin menunjukkan bahwa pada tahun 2019, komposisi penduduk di Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia produktif dan usia muda. Berdasarkan **Tabel 1.9** dan **Grafik 1.4** maka kondisi penduduk di Kabupaten Bantul sejalan dengan prediksi dimana Indonesia pada tahun 2020 – 2030 akan mengalami bonus demografi, kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif.

Dengan komposisi jumlah penduduk tersebut maka Kabupaten Bantul akan menikmati *decade Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Pemerintah Kabupaten Bantul harus dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin dengan membuat kebijakan investasi pada bidang pendidikan (formal dan non formal) untuk mempersiapkan SDM yang berdaya saing tinggi, kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi, kebijakan akses permodalan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang juga berorientasi pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang berkembang di era milenial saat ini. Kesempatan ini bukannya tidak memiliki konsekuensi negatif bila tidak menjadi perhatian dan pertimbangan karena Pemerintah Kabupaten Bantul akan memiliki jumlah tenaga kerja yang melimpah dan bila tidak dipersiapkan akan menjadi masalah pelik bagi pemerintah.

d. Jenis Pekerjaan

Penduduk Kabupaten Bantul usia 15 tahun ke-atas paling banyak bekerja pada sektor lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 258.815 jiwa atau 47,79%. Sektor kedua terbanyak ada pada perdagangan sebesar 119.857 atau 22,13%. Kemudian, jumlah penduduk Kabupaten Bantul paling sedikit bekerja pada sektor Real Estate. Data penduduk berdasarkan jenis lapangan pekerjaan utama tersaji pada **Tabel 1.10**.

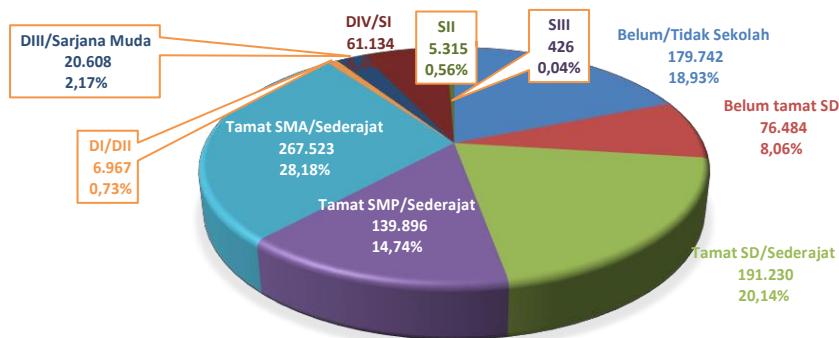
Tabel 1.10. Penduduk berdasarkan jenis lapangan pekerjaan utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Penduduk Usia 15 Tahun Ke-Aatas	
	Jumlah	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	258.815	47,79
Pertambangan dan Penggalian	1.131	0,21
Industri Pengolahan	90	0,02
Pengadaan Listrik, Gas, uap/Air Panas dan Udara Dingin	88	0,02
Konstruksi	1.013	0,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	119.857	22,13
Transportasi dan Pergudangan	1.356	0,25
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan Minum	84	0,02
Informasi dan Komunikasi	109	0,02
Jasa Keuangan dan Asuransi	81	0,01
Real estat	45	0,01
Jasa Perusahaan	92.252	17,04
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	33.774	6,24
Jasa Pendidikan	7.587	1,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.568	0,47
Jasa Lainnya	22.682	4,19
Jumlah	541.532	100

Sumber: Disdukcapil 2019, diolah

e. Pendidikan

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 267.523 jiwa atau 28,18%, sedangkan yang paling sedikit adalah Srata III yaitu sebesar 426 atau 0,04% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.



Grafik 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2019
(Sumber: Disdukcapil 2019, data diolah)

E. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

a) Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 13,43%. Kontribusi sektor ini ada di bawah kontribusi sektor industri pengolahan yang sebesar 15,24%. Beberapa hal yang perlu dicatat di tahun 2019 dalam bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan produksi tanaman pangan ditargetkan sebesar 0,102%, realisasinya sebesar 3,83%;
- Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura ditargetkan sebesar 1,08%, realisasinya sebesar 1,09%;
- Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan ditargetkan sebesar 0,25%, realisasinya sebesar 0,57%;
- Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, dan unggas) ditargetkan sebesar 0,8%, realisasinya sebesar 1,57%;
- Pertumbuhan produksi perikanan ditargetkan sebesar 1,40%, realisasinya sebesar 1,41%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian antara lain penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, rendahnya tingkat penerapan teknologi anjuran, penurunan kondisi infrastruktur pertanian, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Produksi kedelai, pada tahun 2019 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, lihat **Tabel 1.11**. Penurunan produksi kedelai mencapai 23,26 % atau 438 ton.

Penurunan ini di sebabkan karena faktor panjangnya musim kemarau selama tahun 2019, sehingga mengalami kemunduran tanam, dimana petani sudah menyiapkan benih siap tanam, tetapi hujan tidak kunjung turun. Faktor air yang menjadi sumber kehidupan tanaman kedelai dimana dibutuhkan pada saat masa pengisian polong tetapi tanaman kekurangan air, jadi pengisian polong tidak penuh sehingga menyebabkan produktivitas kedelai menurun

Tabel 1.11. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, dan Kedelai

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket.
			2018	2019**	
1	Padi Sawah	Luas Panen	31.182,3	29.524	Ha
		Produktivitas (GKG)	60,06	63,56	ku/ha
		Produksi (GKG)	187.285	187.655	Ton
		Produksi beras	-	120.099	ton
2	Padi Ladang	Luas Panen	197	23	Ha
		Produktivitas (GKG)	45,56	50,10	ku/ha
		Produksi (GKG)	898	115	Ton
		Produksi beras	575	73.6	Ton
3	Padi	Luas Panen	31.379,3	29.597	Ha
		Produktivitas (GKG)	59,97	63.55	ku/ha
		Produksi (GKG)	188.183	188.089	Ton
		Produksi beras	120.474,757	120.377	Ton
4	Jagung	Luas Panen	3.565,1	4934	Ha
		Produksi (pipilan) kering)	26.086	34.903	Ton
		Produktivitas	73,17	70,74	ku/ha
5	Kacang tanah	Luas Panen	2.586,4	2.704,8	Ha
		Produksi (wose kering)	4.068	4.065	Ton
		Produktivitas	15,73	15.03	ku/ha
6	Kedelai	Luas Panen	1.213,6	909	Ha
		Produksi (wose kering)	1.883	1445	Ton
		Produktivitas	15,52	15.90	ku/ha

Sumber: DPPKP, 2019

**Angka Sementara

Hasil perhitungan analisis perhitungan PPH sebesar 93,7. Skor tersebut naik dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 91,7. Peningkatan tersebut mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul semakin meningkat, dengan kata lain semakin beragam dan berimbang, Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah beragam

diantara 9 kelompok utama.

Tabel 1.12. Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Kkal/ Kapita	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
			%	%AKE)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.172,1	56	53,3	0,5	28,1	26,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	57,2	3	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	280,3	13	12,7	2,0	26,9	25,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	80,0	4	3,6	0,5	1,9	1,8	5,0	1,8
5	Buah/Biji Berminyak	57,3	3	2,6	0,5	1,4	1,3	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	198,3	10	9,0	2,0	19,0	18,0	10,0	10,0
7	Gula	27,7	1	1,3	0,5	0,7	0,6	2,5	0,6
8	Sayur dan Buah	190,4	9	8,7	5,0	45,7	43,3	30,0	30,0
9	Lain-lain	20,8	1	0,9	-	-	-	-	-
	Total	2.084,2	100	94,7	11,5	125,1	118,5	100,0	93,7

Sumber: DPPKP, 2019

b) Perikanan

Perikanan di Kabupaten Bantul juga memiliki potensi yang cukup besar. Produksi perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap, dimana perikanan tangkap terdiri dari tangkap laut dan perairan umum (lihat **Tabel 1.13**).

Tabel 1.13. Produksi perikanan Tahun 2017 – 2019 dalam Ton

No.	Perikanan	2017	2018	2019**
1	Perikanan Tangkap	885,35	768,44	802,85
2	Perikanan Budidaya	11.546,74	12.291	12.440,59
	Jumlah	12.432,094	13.059,44	13.243,45

Sumber: DPPKP, 2019

**Angka Sementara

Produksi perikanan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, peningkatan produksi diperoleh dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Peningkatan produksi tangkap tahun 2019 bila dibandingkan dengan produksi tahun 2018 adalah sebesar 4,48 % atau 34,41 ton menjadi 802,85 ton. Sedangkan perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149.597 ton dari 12.291 ton pada tahun 2018 menjadi 12.440,59 ton pada tahun 2019.

Peningkatan produksi perikanan budidaya ini merupakan imbas positif dari penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Selain itu faktor lain adalah adanya fasilitasi bantuan sarpras budidaya baik dari APBN Pusat maupun APBD I DI Yogyakarta berupa kolam bulat, terpal, benih dan pakan kepada 65 kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bantul yang meningkatkan luas panen perikanan budidaya dan meningkatkan produksi perikanan.

c) **Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Potensi ekonomi daerah yang sangat mendukung dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal serta memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah ini didukung dengan keanekaragaman jenis obyek wisata alam, religius, budaya, dan buatan. Kawasan pantai selatan yang menjadi salah satu ikon utama pariwisata Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi tiga zona dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai (1) kawasan wisata alam pantai, (2) wisata budaya/religius, dan (3) wisata buatan/minat khusus. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sesuai dengan Ripparda Kabupaten Bantul, sehingga diharapkan dapat lebih berkembang dan memberi nilai strategis terhadap perekonomian Kabupaten Bantul.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada 2019 mencapai Rp.31.756.578.250,00 atau meningkat sebesar 9,25% dari perolehan tahun 2018 yang berjumlah Rp.29.066.376.750,00.

Tahun 2019, Kabupaten Bantul mencatatkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata sebesar 22,87% dari tahun 2018. Peningkatan kunjungan wisata ini disumbang oleh wisatawan domestik sebesar 22,87% dan mancanegara sebesar 16,76%. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bantul seperti tersaji pada **Tabel 1.14**.

Tabel 1.14. Peningkatan Kunjungan Wisata Tahun 2019

Wisatawan	Jumlah Kunjungan (orang)		Peningkatan kunjungan (%)
	2018	2019	
Domestik	4.200.961	5.162.124	22,87
Mancanegara	3.461	4.041	16,76
Jumlah	4.204.442	5.166.165	22,87

Sumber: Dinas Pariwisata, 2019

Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2019 antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi, dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata. Program-program yang dilaksanakan selain bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan promosi pariwisata, juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemitraan stakeholder dalam pengembangan pariwisata, yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu pengembangan desa-desa wisata sebagai alternative tourism di Kabupaten Bantul juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, di mana pada tahun 2019 jumlah desa wisata telah mencapai 38 lokasi, meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 37 lokasi. Kemunculan desa wisata ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Data tentang daya tarik wisata dapat dilihat pada **Tabel 1.15**.

Tabel 1.15. Daya tarik wisata dan usaha wisata Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2019

No	Daya Tarik Wisata	2016	2017	2018	2019	Satuan	Keterangan
1	Alam	20	22	25	32	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir, air terjun, hutan pinus
2	Buatan	54	59	59	84	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Desa Desa Wisata

No.	UsahaPariwisata	2016	2017	2018	2019	Satuan	Keterangan
1	Hotel bintang	1	2	3	3	Unit	
2	Hotel non-bintang	94	117	133	56	Unit	
3	Restoran/rumah makan	199	225	261	142	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	67	33	Unit	
5	Transportasi Wisata	4	5	5		Unit	
6	Jasa hiburan dan rekreasi	22	57	63		Unit	
7	Tempat Penyelenggaraan Pertemuan,Konferensi, (MICE)	2	7	16		Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata, 2019

d) Perdagangan

Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2019 terdapat 25 pasar dalam kondisi baik, 33 pasar desa, 32 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional yang modern ada 24 pasar,

antara lain: pasar Bantul, Imogiri, Niten, Dlingo, Jejeran, Pijenan, Barongan, Piyungan, Pleret, Celep, Sungapan, Panasan, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 27A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Tradisional, Pemerintah Kabupaten Bantul telah dan tetap berkomitmen untuk lebih mengedepankan aspek peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan pasar tradisional dan toko tradisional. Dalam upaya menjaga kesinambungan hal tersebut, aspek permodalan, kelembagaan dan kepemilikan lahan pasar tradisional menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Terkait dengan ekspor, pada tahun 2019 kondisi kinerja nilai ekspor adalah sebesar US\$151.040.882,4 mengalami kenaikan sebesar 32,18% dibanding tahun 2018, lihat **Tabel 1.16**. Ekspor ini dilakukan dengan tujuan negara Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Adapun komoditi ekspor unggulannya adalah tekstil, furniture, dan handycraft.

Tabel 1.16. Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2018 & 2019

Bulan	Jumlah Eksporthir		Volume Ekspor		Nilai	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Januari	53	50	1.155.056,23	1.442.151,76	6.455.771,99	14.347.340,13
Februari	42	59	844.405,11	1.264.395,45	7.184.745,20	14.531.118,74
Maret	60	54	1.414.344,80	1.158.769,42	10.833.172,50	11.037.306,50
April	65	61	1.540.693,40	1.575.753,09	9.749.026,69	12.897.820,82
Mei	63	64	1.485.849,49	1.874.843,20	10.808.099,30	13.425.203,67
Juni	52	50	1.047.518,09	934.124,96	8.153.195,40	8.681.213,88
Juli	55	69	1.133.120,59	1.662.881,35	11.017.224,80	14.258.660,54
Agustus	58	66	1.077.531,22	1.359.516,52	9.664.964,97	12.832.277,46
September	54	64	1.158.203,65	1.467.132,77	9.957.473,33	13.137.510,02
Oktober	53	58	1.229.322,87	1.389.822,37	93.96.432,47	10.890.817,73
November	55	63	1.170.117,51	1.279.786,25	10.072.592,10	13.091.699,15
Desember	47	64	1.266.924,48	1.236.547,45	10.978.411,50	11.909.913,74
Jumlah	657	722	14.523.087,40	16.645.724,60	114.271.110,00	151.040.882,40

Sumber: Dinas Perdagangan, 2019

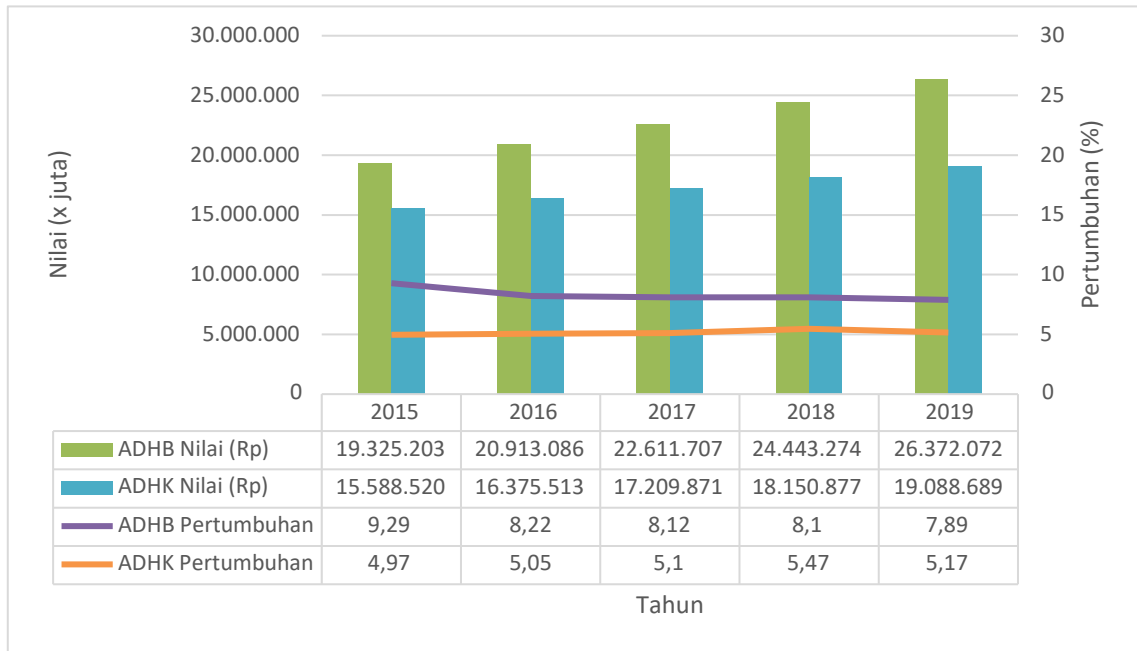
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB dihitung dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai ADHB di Kabupaten Bantul adalah sebesar 7,89% (angka sangat sementara) atau mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai nilai 24,443 triliun rupiah, lihat **Grafik 1.6**. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan air, konstruksi dan jasa pendidikan.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga konstan tahun 2019 mencapai 19,088 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 5,17 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 18,150 triliun rupiah, lihat **Grafik 1.6**. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.



Grafik 1.6. Nilai dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS 2019, diolah)

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,53% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang mampu tumbuh 5,47%, lihat **Tabel 1.17**. Hal ini dikarenakan sekitar 58,82% atau 10 dari total 17 kategori penyumbang pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2019 masih dibawah pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,6% namun diatas Nasional sebesar 5,02%.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik

dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) *real estate*; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (11) jasa lainnya.

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, menunjukkan tren perlambatan dan pertumbuhannya berada di bawah hampir semua sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor sekunder dan sektor tersier.

Tabel 1.17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29
K	Jasa Keuangan	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97
L	Real Estat	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42
P	Jasa Pendidikan	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09
PDRB		4,97	5,05	5,10	5,47	5,53

Sumber: BPS 2019, diolah

Ket : *(angka sementara); **(angka sangat sementara)

b) Laju Inflasi

Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 2,71, lihat **Tabel 1.18**. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan angka nasional. Pencapaian inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY dan nasional, hal ini menandakan tingkat tingkat keberhasilan Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya penendalian inflasi daerah.

Tabel 1.18. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Prov. Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2016	2,26	2,29	3,02
2	2017	3,96	4,20	3,61
3	2018	2,61	2,66	3,13
4	2019	2,71	2,77	2,72

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

F. Indikator Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu

dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebesar 80,01 atau berada pada capaian sangat tinggi. Selain itu, capaian IPM Kabupaten Bantul di tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi IPM Kabupaten Bantul mulai tahun 2014-2019 memperlihatkan tren peningkatan, artinya kinerja pembangunan daerah semakin dirasakan dan memiliki manfaat bagi masyarakat di dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tabel nilai IPM tahun 2014 hingga 2019 seperti tersaji pada **Tabel 1.19**.

Tabel 1.19. Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Nilai IPM Kabupaten Bantul	Nilai IPM DIY
2014	77,11	76,81
2015	77,99	77,59
2016	78,42	78,38
2017	78,67	78,89
2018	79,45	79,53
2019	80,01	79,99

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak kepada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan bahkan sampai masalah kerawanan sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan di daerah.

Tabel 1.20. Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2014 - 2019

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
-------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2014	15,89	2,19	0,48	301.986
2015	16,33	3,16	0,89	312.514
2016	14,55	2,02	0,41	332.057
2017	14,07	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	1,87	0,43	381.538

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

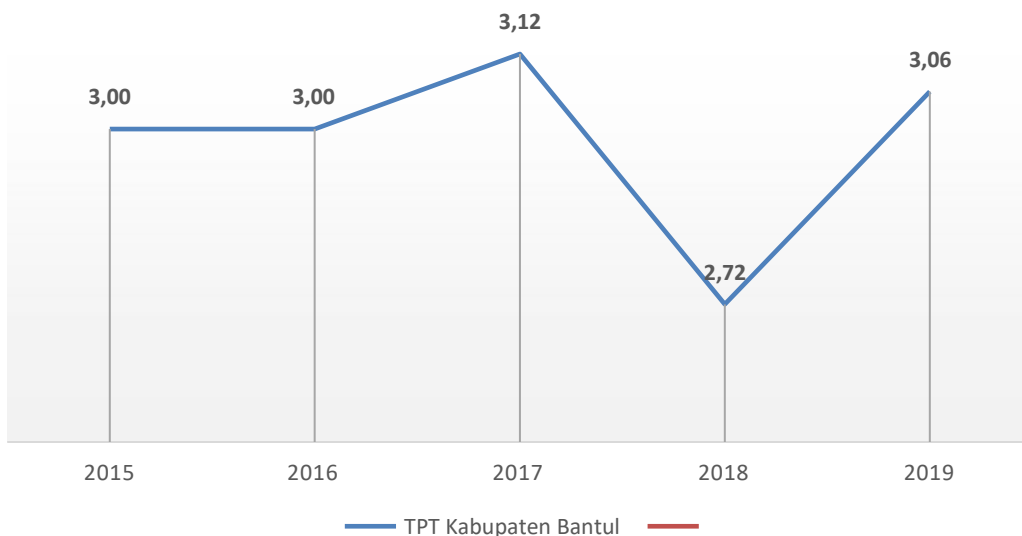
Data angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya tren penurunan hingga tahun 2019 menjadi 12,92, lihat **Tabel 1.20**. Pada tahun 2019 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten selain melaksanakan Program-program penanggulangan kemiskinan juga memfokuskan pada perbaikan data DTPPFM atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) , yaitu memaksimalkan entry data ke dalam aplikasi SIKS NG yang merupakan hasil dari Musyawarah tingkat Desa untuk cleaning data inklusi dan eklusi error. Selain itu dalam program penanggulangan kemiskinan lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, tambahan pemenuhan asupan gizi, program tersebut sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul di tahun 2019 focusing pada perbaikan data penerima manfaat (sasaran penerima). Melalui Sistem Informasi Manajemen Monitoring Penanggulangan Kemiskinan (SI MISKIN), telah dilakukan pemetaan sasaran program penanggulangan kemiskinan
2. Rehab rumah tidak layak huni yang ditangani oleh Dinas PUPKP, Dinas Sosial, Pemerintah Desa serta sumber pendanaan lain yaitu optimalisasi peran CSR dan pengelolaan Zakat Daerah.
3. Program Boga Sehat, yaitu Program pemberian tambahan asupan makanan bergizi bagi lansia miskin absolut dan penyandang disabilitas untuk menambah pemenuhan 2100 kalori. Program ini dilaksanakan mulai bulan 1 Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk program tambahan bagi warga miskin dan

lanjut usia terlantar juga mendapatkan tambahan anggaran dari CSR.

3. Angka Pengangguran

Pada tahun 2019, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bantul adalah sebesar 3,06% (lihat **Grafik 1.7**). Tren angka TPT sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi dan angka capaian terbaik ada di tahun 2018, yakni sebesar 2,72%. Angka TPT Kabupaten Bantul di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,34% dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, angka pengangguran ini masih ada dibawah angka pengangguran DIY sebesar 3,14%. Kategori penganggur pada TPT meliputi: (1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, (4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Grafik 1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 (Sumber: BPS, 2019)

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang diakibatkan dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan atau yang telah memasuki usia kerja. Bertambahnya penduduk usia kerja harus diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul khususnya yang berkaitan dengan masalah pengangguran adalah meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan usaha baru dengan membekali ketrampilan untuk penduduk agar mampu berusaha mandiri. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi pengangguran tersebut. Penduduk yang putus sekolah maupun yang tidak bersekolah lagi sebaiknya diberikan pelatihan dan ketrampilan sebagai modal utama dalam bekerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bantul yang diproyeksikan mengalami peningkatan pada Tahun 2019 tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian DIY dan Nasional. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diperkirakan akan meningkat menjadi 5,26 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 5,27 persen. Hal ini disebabkan secara makro kondisi perekonomian nasional diperkirakan akan tumbuh seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada percepatan pengembangan daerah-daerah. Beberapa faktor lain yang diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul adalah:

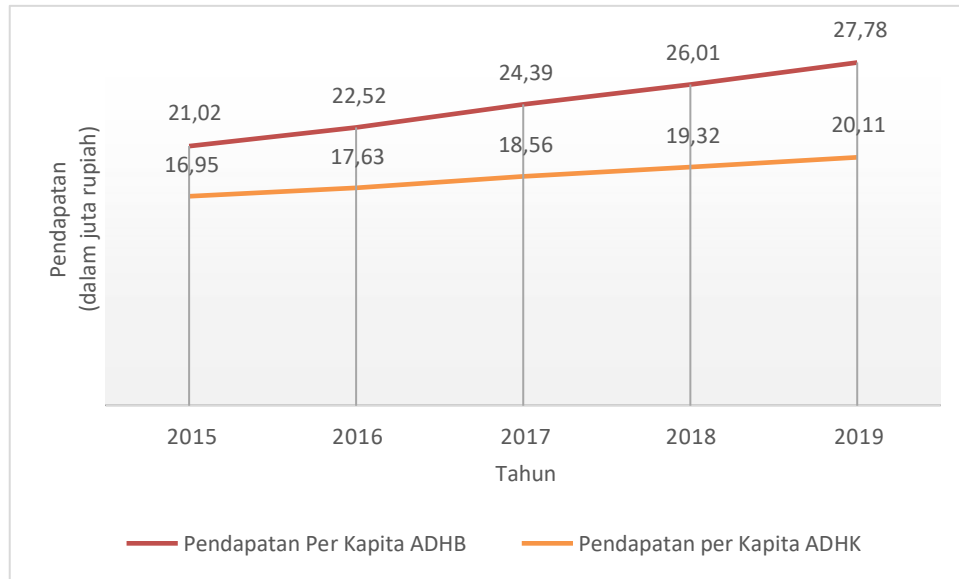
1. Peningkatan daya saing investasi daerah melalui khususnya kemudahan penanaman modal melalui penguatan pembangunan Kawasan Industri Piyungan dan KPI Sedayu-Pajangan.

2. Pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Bantul ke arah sektor tersier melalui penciptaan peluang dan lapangan kerja baru sehingga akan berdampak terhadap pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas.
3. Peningkatan peran desa-desa dalam pembangunan daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan. Pendapatan penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk di suatu wilayah. Salah satu komponen dalam nilai tambah tersebut adalah upah dan gaji yang diterima masyarakat sebagai balas jasa tenaga kerja.

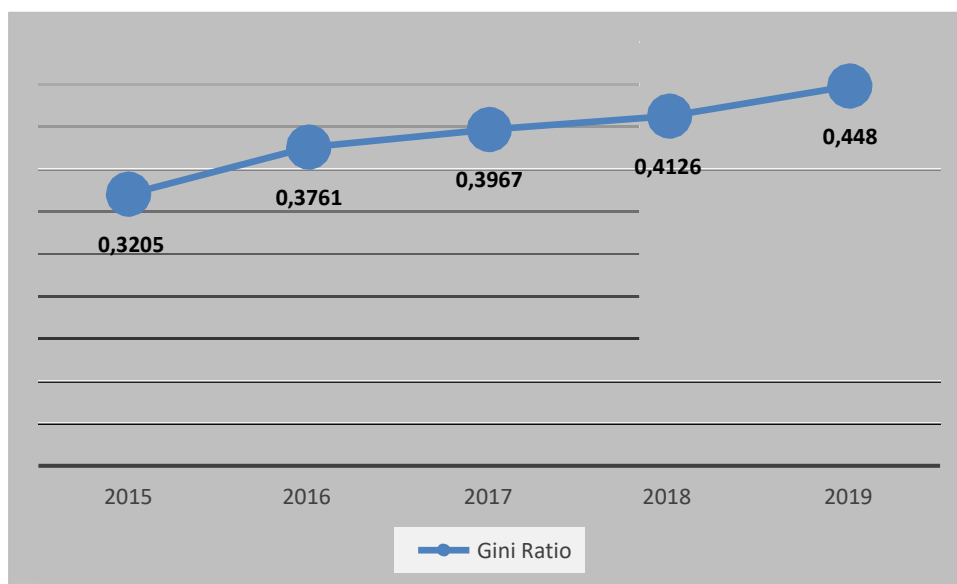
Pendapatan per Kapita nominal (berdasarkan ADHB) dan pendapatan riil (berdasarkan ADHK) Kabupaten Bantul sejak tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tren peningkatan (lihat **Grafik 1.8**). Pendapatan per kapita nominal pada tahun 2019 sebesar 27,78 juta rupiah dan pendapatan riil sebesar 20,11 juta rupiah. Pendapatan ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan per kapita ini dapat diasumsikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Bantul sehingga mampu memperbaiki daya beli masyarakat.



Grafik 1.8. Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (juta rupiah) Tahun 2015-2019 (sumber: BPS, 2019)

6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah penghitungan gini rasio. Pada tahun 2018 Gini Ratio Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,4 atau meningkat 0,015 poin (ketimpangan semakin melebar). Pada tahun 2019, meningkat sebesar 0,035 poin. Berdasarkan kriteria Oshima, angka *gini ratio* di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4). Angka gini ratio Kabupaten Bantul tahun 2015 – 2019 tersaji pada **Grafik 1.9**.



Grafik 1.9. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS 2020, diolah)

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tahun 2017, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengacu pada Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan/penyesuaian terhadap RPJMD dikarenakan beberapa hal yakni: a) adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga diperlukan perubahan terhadap perangkat daerah dan target indikator kinerja; b) perubahan substansi dan sistematika RPJMD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; c) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kedepan mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

A. Visi dan Misi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- a. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. **Nasionalisme** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f. **Religius** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana;
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman, harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

- a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;

- b. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- d. Memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- b. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- c. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- d. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul seperti tersaji pada **Tabel**

2.21. Indikator target dari dampak pencapaian sasaran program, secara agregat dari semua misi dalam mencapai visi jangka menengah, atau sering disebut sasaran utama, disajikan pada **Tabel 2.22**.

Tabel 2.21. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Umur Harapan Hidup Angka Harapan Lama sekolah
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas Terwujudnya destinasi pariwisata yang berbudaya saing dan unggul Terciptanya industri kreatif yang berkualitas Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Angka kemiskinan Pertumbuhan ekonomi Gini Ratio Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Cakupan industri kreatif Pertumbuhan produksi tanaman pangan Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda unggas)

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Desa Tangguh Bencana Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Angka Kriminalitas
5	Meningkatkat tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Angka Kriminalitas Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Tabel 2.22. Target Pencapaian Sasaran dan Realisasi Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	57 (Cukup)	65 (Baik)	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,26	73,28	73,30	73,31	73,32	73,33
Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kemiskinan	Persen	14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66
Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6
Gini Ratio	Angka	0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,305	0,3025
Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	5	6	7	8	9	10
Cakupan industri kreatif	Persen	25	30	35	40	45	50
Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1005	0,1010	0,1015	0,102	0,1025	0,103
Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,000	1,025	1,05	1,075	1,100	1,125
Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Angka	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Angka	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	N/A	72	74	76	78	80
Indeks Kualitas	Angka	39	45	50	56	63	72

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lingkungan Hidup							
Desa Tangguh Bencana	Persen	20	22,66	25,34	28	30,66	33,34
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	80	81	82	83	84	85
Angka Kriminalitas	Persen	0,040	0,038	0,035	0,030	0,028	0,027
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	40	50	60	70	80	90

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi, diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (ALE-ALI) dan analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1). Kekuatan

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu di atas capaian nasional;
- b) PDRB per kapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan;
- c) Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis;
- d) Pertumbuhan kunjungan wisatawan tinggi;
- e) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga;
- f) Angka Partisipasi Murni dan APK cukup baik;
- g) Angka Kriminalitas rendah;
- h) Posisi strategis Bantul sebagai ‘halaman depan’ dalam paradigma pembangunan DIY “*Among Tani dagang Layar*”;
- i) Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta).

2). Kelemahan

- a) Ketimpangan pendapatan ada kecenderungan meningkat;
- b) Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, di atas Provinsi DIY dan nasional;
- c) Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- d) Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal;
- e) Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah;
- f) Daya saing produk belum optimal;
- g) Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal;
- h) Pengembangan kawasan-kawasan strategis belum optimal;
- i) Trend rasio guru dan siswa menurun;
- j) Trend penyakit tidak menular meningkat;
- k) Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi;
- l) Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat;
- m) Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah.

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1). Peluang

- a) Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional antar negara (AFTA, MEA, dan lain-lain);
- b) DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata;
- c) Adanya agenda pembangunan nasional melalui *Nawa Cita*;
- d) Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul

- (pembangunan bandara NYIA dan JJLS);
- e) Pemerintah Provinsi DIY menjadikan pantai Selatan DIY merupakan halaman depan dalam pengembangan wilayah;
- f) Adanya peluang bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.

2). Ancaman

- a) Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana alam;
- b) Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA;
- c) Persaingan antar kabupaten/kota dalam pengembangan produk daerah termasuk destinasi wisata.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut disajikan pada **Tabel 2.23**.

Tabel 2.23. Matrik Analisa SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional. 2. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 3. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis 4. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tinggi. 5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga. 6. Angka Partisipasi Murni dan APK cukup baik. 7. Angka Kriminalitas cukup rendah 8. Posisi strategis Bantul sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan pendapatan (gini ratio) kecenderungan menurun. 2. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, diatas Provinsi DIY dan nasional. 3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian. 4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal 5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah. 6. Daya saing produk belum optimal 7. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal 8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal 9. Trend ratio guru dan siswa menurun 10. Trend penyakit tidak menular meningkat 11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>‘halaman depan’ dalam paradigma pembangunan DIY</p> <p>9. Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta)</p>	<p>12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat</p> <p>13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah</p>
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll) 2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata. 3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui <i>Nawa Cita</i>. 4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA, JLS, Pelabuhan) 5. Adangya peluang bagi Bantul untuk ikt serta mensukseskan SDg’s sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG’s. 6. Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan pengembangan kawasan 	<p>STRATEGIS-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan segala potensi ekonomi dan produk Bantul untuk menembus pasar internasional. 2. Peningkatan kualitas hidup sebagai basis untuk mendukung kondisi nasional maupu sebagai bagian dari promosi wisata daerah. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan efek pengganda pertumbuhan bagi semua lapisan masyarakat. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai target-target SDG’s. 5. Peningkatan sarana-prasarana dan akses untuk mendukung pembangunan kawasan selatan Bantul sebagai halaman depan DIY. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal untuk mendukung pariwisata daerah. 7. Pengembangan kawasan strategis daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan kualitas masyarakat Bantul. 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 2. Optimalisasi penataan ruang dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan pengembangh ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan potensi destinasi wisata dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan potensi sektor unggulan, industri kecil dan daya saing produk di pasar regional dan internasional. 4. Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka untuk mempersiapkan kualitas masyarakat dalam menghadapi persaingan regional dan internasional. 5. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pengembangan produk unggulan daerah. 6. Peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerntah pusat. 7. Pengembangan kualitas dan potensi sumberdaya manusia yang menjadi daya dukung bagi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 8. Peningkatan peran serta masyarakat dan kehidupan keluarga dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan pembangunan.
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bantul 	<p>STRATEGIS-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi program pengentasan

<p>merupakan kawasan rawan bencana</p> <p>2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA.</p> <p>3. Persaingan antar kabupaten/kota dalam pengembangan produk daerah termasuk pengembangan destinasi wisata.</p>	<p>seluruh komponen masyarakat dalam rangka melakukan upaya mitigasi bencana.</p> <p>2. Peningkatan kualitas SDM dan produk IKM dalam rangka ekspansi di pasar regional dan internasional.</p> <p>3. Pengembangan potensi dan kawasan strategis dalam rangka memperkuat daya saing daerah.</p>	<p>kemiskinan dengan pengembangan produk unggulan setempat.</p> <p>2. Pemetaan dan penataan kawasan potensial dan kawasan rawan bencana.</p> <p>3. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.</p>
---	--	---

Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2016-2021

Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan selain mempertimbangkan hasil analisa SWOT di atas, juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut meliputi:

a. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) Bantul 2015-2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan enam sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di enam sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling

memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bantul didukung oleh pengembangan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK Bantul diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui dua strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Fokus penanaman modal tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam *Roadmap* Investasi RUPMK Bantul sebagai berikut



b. Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul 2016-2021.

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No. 42 Tahun 2013).

Berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi 2015-2019, pendekatan multisektoral menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan. Meskipun aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam *output* rencana aksipangan dan gizi, proses pencapaian aspek ini sangat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam program dan pelaksanaannya. Demikian pula, aspek pemerataan akses pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan beragam melalui program yang saling terintegrasi (multisektor) merupakan

perhatian utama agenda internasional dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan prinsipnya “*No one leave behind*”.

Pembangunan pangan dan gizi secara nasional telah dimulai sejak tahun 2001 dengan program-program yang tersusun sebagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDG's). Selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan dan gizi saat ini, 2015-2019, melanjutkan tren positif pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multisektor. Program-program kesehatan tetap menjadi *leading sector* dalam peningkatan status kesehatan masyarakat ditunjang dengan siergisme program-program unit kerja lainnya dalam rangka memenuhi *sufficient conditions* pencapaian status gizi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2.24. Strategi dan arah kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Strategi 1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. 2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	Arah Kebijakan • Meningkatkan kualitas SDM birokrasi • Mengembangkan layanan birokrasi yang prima • Meningkatkan mutu SDM dan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Berkepribadian Luhur			
Tujuan Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Sasaran 1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Strategi 1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan 2. Peningkatan cakupan	Arah Kebijakan • Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan. • Meningkatkan ketersediaan

	pangan dan kualitas gizi yang berimbang	dan keragaman pangan secara berkelanjutan.
	3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	• Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
	4. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	• Meningkatkan prestasi olahraga
	Peningkatan keselamatan transportasi	Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi
2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing pendidikan.	• Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.
	2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar	• Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan.
	3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.	• Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti.
		• Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini

Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat. 2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu 3. Validasi data warga kurang mampu	• Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usah • Meningkatkan kesejahteraan keluarga • Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat
	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah 2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk • Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi. • Meningkatkan kontribusi belanja • Mengurangi kesenjangan pendapatan • Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif
	3. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	• Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata • Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata

4. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Akselerasi pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat 2. Pengembangan peternakan berbasis industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani • Meningkatkan kualitas Sumberdaya Peternakan
6. Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Peningkatan produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan

Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat 2. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas 3. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana 4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 	<p>Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat.</p> <p>Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.</p> <p>Pengembangan edukasi kebencanaan</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana. • Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat. • Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup • Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.. • Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana • Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Misi 5 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, Aman, Progresif Dan Harmonis Serta Berbudaya Istimewa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 2. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama 2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat <p>Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama • Meningkatkan pemahaman hukum. • Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya

Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2016-2021

C. Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2018, isu-isu strategis pembangunan 2019, prioritas pembangunan Nasional dan DIY serta Tema Pembangunan Kabupaten Bantul 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan
3. Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin
4. Pemantapan Reformasi Birokrasi
5. Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah melalui pengembangan pariwisata dan industri kreatif
6. Pemantapan Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis
9. Penanggulangan Bencana
10. Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
11. Pengembangan Budaya Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2019 ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021. Adapun penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2019 dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.25** berikut:

Tabel 2.25. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

MISI RPJMD 2016-2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2019
Misi 1 RPJMD Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Pemantapan Reformasi Birokrasi
Misi 2 RPJMD Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan
Misi 3 RPJMD Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.	Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah melalui pengembangan pariwisata dan industri kreatif Pemantapan Ketahanan Pangan
Misi 4 RPJMD Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis Penanggulangan Bencana
Misi 5 RPJMD Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.	Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Pengembangan Budaya Daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 (diolah)

Untuk mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantul 2019 dirumuskan dalam *Quick Win* sebagai berikut :

1. Peningkatan prestasi akademik dan SDM yang berkarakter dan berbudaya

Target pembangunan Kabupaten Bantul pada sektor pendidikan adalah

cerdas. Salah satu ukuran kecerdasan dalam pendidikan adalah capaian prestasi akademik. Posisi Kabupaten Bantul dalam peringkat SD dan SMP dalam lingkup DIY belum optimal yakni pada posisi IV pada tingkat SD dan SMP pada posisi III. Pada tahun 2019 ditargetkan posisi prestasi akademik pada level SD di peringkat II dan SMP pada peringkat III melalui program peningkatan prestasi akademik. Selain aspek kecerdasan, peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada pengembangan karakter dan budaya siswa melalui peningkatan bahan ajar berbasis muatan lokal.

2. Pelayanan kesehatan berbasis digital

Kesehatan menjadi salah satu target sasaran pembangunan daerah, yaitu sehat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 salah satunya dilakukan melalui pengembangan dan penguatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan (pelayanan berbasis digital) dengan sasaran pada pelayanan tingkat puskesmas dan RSUD, sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat.

3. Bantul Universal Akses 2019

Bantul Universal Akses 2019 dimaksudkan pada akses air minum, permukiman, dan sanitasi. Konsep ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang digagas oleh PBB dengan target hingga tahun 2030. Konsep ini merupakan dasar bagi pengelolaan lingkungan secara global. Selain itu, ada segitiga kunci dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya irisan dari pemenuhannya kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Sustainable Development Goals oleh pemerintah Indonesia dimaknai dengan berbagai program. Salah satu program yang digagas pemerintah khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Program Akses Universal. Program ini juga dikenal sebagai 100-0-100. Ada filosofi di balik angka ini yaitu di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman

kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan PAS dan optimalisasi zakat

Guna lebih mendorong penurunan pada angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 difokuskan program dan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui PAS dan optimalisasi zakat. Produk Andalan Setempat (PAS) merupakan salah satu program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan potensi produk-produk andalan yang dimiliki masyarakat khususnya masyarakat miskin agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi sehingga diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pengoptimalan zakat merupakan salah satu kebijakan dilakukan untuk menempatkan masyarakat miskin dan penganggur menjadi sasaran utama dari implementasi dan pemanfaatan zakat.

5. Bantul Smart City (Bantul *Command Center* dan Kampung Digital)

Bantul Smart City merupakan salah satu program dalam rangka mendukung implementasi E-Government di Kabupaten Bantul. Konsep Bantul Smart City menempatkan keutamaan pelayanan publik yang berbasis elektronik untuk memperkuat transparansi, kemudahan dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan Bantul *Command Centre* dan peningkatan jumlah Kampung Digital.

6. Reformasi pelayanan publik (*one stop service*, Akuntabilitas Desa, dan SIM SEPAKAT).

Peningkatan reformasi birokrasi pada semua lini perangkat daerah dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, penguatan akuntabilitas desa dan penerapan aplikasi terintegrasi dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja pada penyelenggaraan pemerintah.

7. Pengembangan obyek wisata dan penguatan industri kreatif

Sektor industri dan pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi

besar dalam perekonomian daerah. Pada sektor pariwisata diarahkan pada diversifikasi obyek wisata dan penambahan obyek wisata baru untuk lebih meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sedangkan pada sektor industri diarahkan pada menciptakan wirausahawan baru dengan fokus pada pengembangan industri kreatif.

8. Keragaman pangan, optimalisasi lahan pekarangan, dan pemantapan LP2B

Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap padi atau beras dalam pola konsumsi masyarakat. Selain itu dengan ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang perlu dilakukan upaya untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lahan pekarangan dalam pengembangan pertanian khususnya hortikultura,

9. Kawasan Pariwisata, Heritage, dan Kawasan Industri Piyungan

Kawasan strategis pada sektor pariwisata, industri dan kebudayaan perlu dikembangkan. kawasan pariwisata yang didorong untuk lebih berkembang adalah Kawasan Pansela dan Kawasan Songgo Langit. Sedangkan pengembangan heritage sebagai salah satu warisan budaya lebih dioptimalkan melalui Pengembangan Kawasan Heritage yang mengacu pada Perdais DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Pantai Samas-Parangtritis dan Kawasan Kerto-Pleret. Pengembangan kawasan industri dilaksanakan melalui pengembangan investasi daerah. Optimalisasi Kawasan Industri Piyungan diarahkan pada pengembangan dan pemenuhan infrastruktur kawasan sehingga dapat meningkatkan potensi investasi di Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing PD tersebut merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Rencana program merupakan rencana program yang diselenggarakan oleh PD, yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Dalam rangka percepatan pencapaian target tersebut perlu dilakukan berbagai inovasi program/kegiatan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Bantul Universal Akses 2019 menunjukkan target pemerintah daerah untuk mencapai terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

a. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Prioritas pembangunan kewilayahan disusun dengan beberapa pertimbangan strategis, diantaranya terkait dengan aspek kewilayahan yang menjadi prioritas nasional dan prioritas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Identifikasi arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dilakukan melalui penelaahan terhadap RPJMN Tahun 2015-2019, Rancangan RKPD DIY Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2019.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Selanjutnya dalam perspektif prioritas pembangunan kewilayahan, prioritas pembangunan kewilayahan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 juga harus mengakomodir kebutuhan nasional dan pemerintah provinsi dalam pengembangan kewilayahan.

- **Aspek Kewilayahan Prioritas Nasional (RPJMN 2015-2019)**

Secara lebih jelasnya kegiatan strategis pembangunan perwilayahan yang menjadi target nasional (RPJMN 2015-2019) adalah, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Infrastruktur
2. Telekomunikasi dan informatika.
3. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
4. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya.
5. Penurunan Angka kematian ibu dan program PHBS lebih ditingkatkan.
6. Program kesehatan reproduksi pada remaja.
7. Pengintegrasian Jamkesda dan JKN
8. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional dan rujukan daerah.

Kemudian berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Prioritas Pengembangan Kewilayahan adalah:

- a. Peningkatan konektivitas dan TIK;
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
- e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar;
- f. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa;
- g. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;

- h. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- i. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- j. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- k. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan;
- l. Meningkatkan aksesibilitas air;
- m. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- n. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- o. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- p. Memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- q. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- r. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- s. Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- t. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- u. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber;
- v. Menjamin kesuksesan pemilu;
- w. Memperkuat pertahanan wilayah nasional;
- x. Meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi

- **Aspek kewilayahan Prioritas DIY (RKPD DIY 2019)**

Pembangunan Kewilayahan provinsi pada prinsipnya yaitu pembangunan yang bersifat spasial yang mengarah pada pembangunan wilayah Kabupaten/Kota. Adapun arah pengembangan kewilayahan yang menjadi target DIY adalah, sebagai berikut:

1. Wilayah DIY termasuk didalamnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan yang saat ini berkembang secara alamiah menyebar kewilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan karakteristik yang hampir samayang disebut sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Fungsi hinterland sekitar KPY menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan wilayah DIY terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan manajemen distribusi barang dan komoditas dan pengembangan infrastruktur wilayah dari dan menuju hinterland mendukung peningkatan pemasaran komoditas industri kreatif, pertanian, perikanan, hasil hutan, dan lain sebagainya;
3. Pengembangan pola kerjasama antar wilayah, diantaranya Kabupaten Bantul sebagai bagian dari pengembangan aktivitas wisata yang memanfaatkan potensi alam berupa pantai dan mengembangkan industri kreatif yang menjadikan Kabupaten Bantul sebagai trigger pengembangan aktivitas pariwisata khususnya dalam seni dan budaya;
4. Pengembangan koridor ekonomi strategis meliputi koridor pantai selatan, koridor Temon-Prambanan, koridor Tempel-Parangtritis dan pengembangan koridor kawasan bentang alam karst dan gumuk pasir di sekitar wilayah Kabupaten Gunungkidul, sebagian Bantul dan Kulonprogo, serta penetapan kawasan pusaka yang mendukung keistimewaan DIY. Peran DIY dalam mendukung koridor Temon-Prambanan fokus pada perencanaan

sarana dan prasarana angkutan jalan rel dan lokasi stasiun kereta api dengan kajian trase Utara-Selatan dan Timur-Barat;

5. Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan daya saing wilayah, melalui pengembangan produk/komoditas lokal wilayah, peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, bantuan rumah layak huni, pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan, pelatihan keterampilan, bantuan permodalan dan peningkatan kesempatan kerja;
 6. Penurunan ketimpangan wilayah dalam aspek pengembangan wilayah harus memperhatikan fungsi sebuah wilayah, Bantul sebagai salah satu wilayah yang memberikan peran dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan;
 7. Kestabilan Daya Dukung Lingkungan dipengaruhi banyak faktor yang akan berdampak pada keberlanjutan Pembangunan. Daya dukung lingkungan dipengaruhi diantaranya keberagaman potensi sumber daya alam seperti keberadaan gumpul pasir yang perlu dilindungi dan dilestarikan, penggunaan lahan untuk pertanian dan permukiman seperti tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Sleman dan Bantul, dan adanya bahaya alami seperti daerah rawan banjir dan gempa bumi serta bahaya tsunami di daerah pesisir yang berpotensi di wilayah Kabupaten Bantul;
 8. Tindaklanjut pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA)
- **Aspek kewilayahan Prioritas Kabupaten Bantul Tahun 2019**

Berdasarkan arahan kebijakan pembangunan perwilayahan Nasional dan DIY, dan target RPJMD Kabupaten Bantul pada tahun 2019 serta RTRW Kabupaten Bantul, maka arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah:

 1. Perluasan aksesibilitas, fasilitasi dan bantuan akan layanan

umum seperti pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan dengan penekanan pada maksimalisasi peran dan kontribusi pemerintah daerah serta swasta

2. Kebijakan pengawasan dan pengendalian lahan pertanian (dalam bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan) menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk segera dilakukan dan pada Tahun 2019 direncanakan pelaksanaan komunikasi dan pendataan pemilik tanah/lahan pertanian sesuai dengan hasil pemetaan.
3. Pembukaan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian dengan mengoptimalkan pengembangan pertanian, pariwisata, industri kreatif dan perdagangan.
4. Percepatan dan pengembangan jalan jalur lintas selatan untuk percepatan penyelesaiannya dalam rangka mendukung pergeseran paradigma among tani dagang layar.
5. Penataan Kawasan Pantai Selatan diarahkan pengembangan pariwisata dalam rangka menangkap interkoneksi dibangunnya Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo dan perlindungan kawasan Geo Heritage Gumuk Pasir Parangtritis.
6. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis Ekonomi sektor pariwisata dan industri yang meliputi:
 - a). Pengembangan Kawasan Industri Piyungan : pembangunan akses jalan masuk, sinkronisasi pemetaan perluasan lahan (Revisi RTRW Kabupaten Bantul), fasilitasi komunikasi Pengelola KI dengan PLN, PDAM, dan Fasilitasi pelayanan AMDAL.
 - b). Kawasan Peruntukan Industri Pajangan yang juga termasuk Bantul Kota Mandiri : sinkronisasi pemetaan lahan pada Revisi RTRW Kabupaten Bantul;
 - c). Kawasan Peruntukan Industri Sedayu: sinkronisasi pemetaan

lahan pada Revisi RTRW Kabupaten Bantul

Pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya dengan pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota yang meliputi: penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi infrastruktur, pengendalian konversi lahan terbangun, reformasi birokrasi dan pengembangan pariwisata dan industri kreatif.

Pendekatan prioritas kewilayahan lebih fokus pada memberikan skala prioritas melalui pertimbangan beberapa variabel meliputi: nilai inflasi, angka kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

Selain kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi target DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan program prioritas yang dibiayai melalui sharing pembiayaan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kesepakatan trilateral desk Musrenbang DIY.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

BAB III
URUSAN KONKUREN,
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

Terbitnya Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada bergesernya poros otonomi daerah dari semula berada di pemerintahan kabupaten menjadi di pemerintahan provinsi. Hal ini ditandai dengan ditariknya beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi maupun ke pusat. Beberapa kewenangan urusan pemerintah kabupaten yang ditarik antara lain meliputi urusan kehutanan, energi sumber daya mineral, pendidikan menengah, sebagian urusan kelautan dan perikanan.

Pendekatan konkuren masih digunakan didalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dalam hal pembagian urusan. Model pembagian urusan terbagi ke dalam 3 (tiga) kriteria, antara lain urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Namun demikian, urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non dasar tidak dibedakan didalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berjumlah 24 urusan dimana 6 urusan merupakan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 urusan.

a. Ringkasan Urusan Wajib

Hingga tahun 2019, jumlah urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebanyak 24 urusan yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib non pelayanan dasar, lihat **Tabel 3.26**. Pelaksanaan urusan wajib didalam

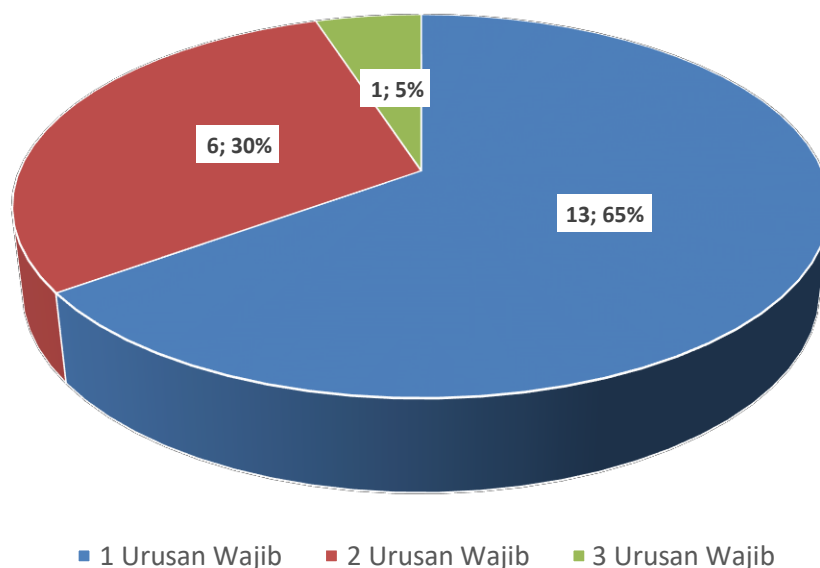
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul merupakan upaya pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bantul.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mengalami restrukturisasi. OPD di Kabupaten Bantul setelah restrukturisasi berjumlah 45 dari sebelumnya 54 di tahun 2016. Berkurangnya jumlah OPD juga merupakan salah satu implikasi dari terbitnya Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana ada beberapa kewenangan urusan pemerintahan yang ditarik ke provinsi dan pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan restrukturisasi OPD sebagai tindak lanjut penyesuaian.

OPD di Kabupaten Bantul, tidak semuanya melaksanakan urusan wajib. OPD yang melaksanakan urusan, beberapa diantaranya ada yang melaksanakan 2 (dua) jenis urusan wajib dan ada yang hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga OPD yang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika. OPD yang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib sebanyak 6 OPD, antara lain (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta (6) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa. OPD yang melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak 13 OPD, antara lain (1) Dinas Kesehatan; (2) RSUD Panembahan Senopati; (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (4) Dinas Kebudayaan; (5) Bappeda; (6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan

Perindustrian; (7) Dinas Lingkungan Hidup; (8) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; (9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; (10) Dinas Perhubungan; (11) Satuan Polisi Pamong Praja; (12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta (13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. OPD yang melaksanakan urusan wajib seperti tersaji pada **Grafik 3.10** dan **Tabel 3.26**.



Grafik 3.10. Jumlah dan Persentase OPD Pelaksana Urusan Wajib di Kabupaten Bantul

Jumlah keseluruhan OPD yang melaksanakan urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 20 OPD, lihat **Grafik 3.10** dan **Tabel 3.26**. Pelaksana urusan wajib yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (urusan pendidikan; urusan kepemudaan dan olahraga); Dinas Kesehatan, dan RSUD Panembahan Senopati (urusan kesehatan); Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman); Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (urusan penataan ruang; urusan pertanahan); Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat); Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (urusan sosial; urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan; urusan kearsipan); Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan); Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik; dan urusan persandian); Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (urusan koperasi dan usaha kecil menengah; urusan perindustrian); Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup); Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (urusan pangan); Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; urusan pemberdayaan masyarakat desa); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (urusan penanaman modal); Dinas Perhubungan (urusan perhubungan); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Statistik); serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (urusan tenaga kerja).

2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2019 telah ditetapkan kedalam RKPD Tahun 2019. Program dan kegiatan ini merupakan hasil perencanaan yang disusun dalam kerangka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebanyak 176 program yang dijabarkan kedalam kegiatan yang berjumlah 557 kegiatan. Penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan seperti tersaji didalam **Tabel 3.26**.

Tabel 3.26. Kategori dan jenis urusan wajib, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA		PROGRAM		KEGIATAN		
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN		
Pelayanan Dasar	1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		
						2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		
						3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		
						2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	Pengadaan barang bercorak kesenian
								5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
								6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
								8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
								9	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
						11	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	12	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
						13	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
						14	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD
						15	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
				6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP
						17	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar
						18	Perijinan SD dan SMP Baru
						19	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						20	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar
						21	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar
						22	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
						23	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD
						24	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal
						25	Pengembangan Pendidikan Dasar SD
						26	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD
						27	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD
						28	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD
						29	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI
						30	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						31	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP
						32	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
						33	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS
						34	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
						35	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
			7	Program Pendidikan Non Formal		36	Penyelenggaraan pendidikan non formal
						37	Pengembangan Pendidikan non formal
						38	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B
						39	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
			8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		40	Evaluasi standar pelayanan minimal
						41	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN			
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN		
Pelayanan Dasar	2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	42	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		
						43	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan		
						44	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)		
						45	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan		
						46	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia		
						47	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi		
						10	Program Peningkatan Nilai Akademik	48	Penambahan Pelajaran
								49	Peningkatan Metode Pengajaran
						11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	Peningkatan Peran Orangtua
				51	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				
				52	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				
				53	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						55	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						56	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
				13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
				14	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58	Penyusunan sistem manajemen mutu
						59	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	60	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi
				16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	61	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
						62	Peningkatan kesehatan masyarakat
						63	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
						64	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						65	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan
						66	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden
						67	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek
						68	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong
						69	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro
						70	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I
						71	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II
						72	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I
						73	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II
						74	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I
						75	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	NO	PROGRAM	KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB			NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						76	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I
						77	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II
						78	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I
						79	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II
						80	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret
						81	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan
						82	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I
						83	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II
						84	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III
						85	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I
						86	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						87	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I
						88	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II
						89	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan
						90	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I
						91	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II
						92	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan
						93	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden
						94	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek
						95	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong
						96	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro
						97	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	NO	PROGRAM	KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB			NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						98	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II
						99	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I
						100	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II
						101	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I
						102	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II
						103	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I
						104	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II
						105	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I
						106	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II
						107	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret
						108	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						109	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I
						110	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II
						111	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III
						112	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I
						113	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II
						114	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I
						115	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II
						116	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan
						117	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I
						118	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II
						119	Operasional Rumah Sakit

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	120	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
				18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	121	Promosi Kesehatan
						122	Pemberdayaan masyarakat sehat
				19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	123	Peningkatan status gizi
				20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	124	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
				21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	125	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
						126	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
						127	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
				22	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	128	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
						129	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
						130	Pelayanan Kesehatan Rujukan
				23	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	131	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				24	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	132	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
						133	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
						134	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
				25	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	135	Pendampingan Jamkesda
						136	Kemitraan pelayanan kesehatan
				26	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	137	Pelayanan kesehatan anak dan Balita
				27	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	138	Pelayanan kesehatan Lansia
				28	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	139	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
				29	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	140	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
		RSUD Panembahan Senopati		30	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	141	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Pelayanan Dasar	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	31	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	142	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya
						143	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok
						144	Pengelolaan BLUD RSUD
				32	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						146	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						147	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
				33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
						149	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						150	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						151	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						152	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
				34	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	153	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
						154	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				35	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	155	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
				36	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	156	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
						157	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
						158	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
				37	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	159	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku
				38	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	160	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						161	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air
			39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		162	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
						163	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah
						164	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
			40	Program Pengendalian Banjir		165	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai
			41	Program Pembangunan Gedung		166	Pembangunan Gedung
			42	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		167	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
						168	Peningkatan jalan
			43	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong		169	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				44	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	170	Pembangunan infrastruktur perdesaan
				45	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	171	Pengembangan Jasa Konstruksi
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		46	Program Perencanaan Tata Ruang	172	Peningkatan Teknologi Informasi
						173	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
						174	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
						175	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
						176	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
						177	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan
						178	Studi tentang Tata Ruang
				47	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	179	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
						180	Pengembangan data pemanfaatan ruang
						181	Pengawasan Pemanfaatan Ruang

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Pelayanan Dasar	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	48	Program Pengembangan Perumahan	182	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
						183	Penyelenggaraan pengembangan perumahan
						184	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
						185	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
						186	Penanganan Kawasan Kumuh
						187	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Pelayanan Dasar	5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	51	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	188	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						189	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						190	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
						49	Program Lingkungan Sehat Perumahan
				50	Program pengelolaan areal pemakaman	187	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
						192	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						193	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						194	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						195	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
				53	Program peningkatan disiplin aparatur	196	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
				54	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	197	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
				55	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	198	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
						199	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				56	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	200	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						201	Pemberdayaan Linmas
				57	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	202	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah
				58	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	203	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat
				59	Program Penegakan Perda	204	Operasi Penegakan Perda
						205	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						207	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						208	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
				61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	209	Pembangunan gedung kantor
						210	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						211	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						212	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						213	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
				62	Program peningkatan disiplin aparatur	214	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
				63	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	215	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
				64	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	216	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
						217	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
				65	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	218	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
						219	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam
						220	Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial
						221	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam
						222	Pengembangan desa siaga bencana
						223	Gladi posko dan gladi lapang
						224	Pengembangan budaya sadar bencana

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						225	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana
						226	Penguatan kapasitas satgas BPBD
						227	Penguatan FPRB
						228	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
						229	Pembentukan Desa Tangguh Bencana
						230	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan
						231	Pengembangan Sekolah Siaga Bencana
						232	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana
			66	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		233	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
						234	Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran
			67	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana		235	Relokasi Korban Bencana ALam
						236	Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam
						237	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Pelayanan Dasar	6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	238	Rekonstruksi Pasca Bencana
						239	Rehabilitasi Pasca Bencana
						240	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						241	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						242	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
						243	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
						244	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						245	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						246	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						247	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			69	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	
			70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				71	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	249	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				72	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	250	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin
						251	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin
						252	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan
				73	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	253	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
						254	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
						255	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN			
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN		
Non Pelayanan Dasar	7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	256	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi		
						74	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	257	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
								258	Pendampingan Kegiatan Karang taruna
								259	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional
						75	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	260	Updating Keluarga Miskin
								261	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan
								262	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
								263	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
								264	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
								265	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
		77	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	266	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						267	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						268	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			78	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	269	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	
			79	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	270	Kegiatan Pembinaan LPK	
					271	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	
					272	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	
					273	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	
					274	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	
					275	Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja	
					276	Pelatihan Menjahit	
					277	Pelatihan Mekanik	
					278	Pelatihan Teknisi	
					279	Pelatihan Meubelair	

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						280	Pelatihan Juru Las
						281	Pelatihan Software
						282	Pelatihan Tata Boga
						283	Pelatihan Batik Tulis
						284	Pelatihan Bahasa Inggris
				80	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	285	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan
						286	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
				81	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	287	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
						288	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
						289	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
						290	Pendampingan dewan pengupahan
						291	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah
						292	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial
						293	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						294	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja
						295	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja
				82	Program Penempatan Tenaga Kerja	296	Penyuluhan ketenagakerjaan
						297	Penempatan pencari kerja
				83	Program Perluasan Kerja	298	Kegiatan terapan teknologi tepat guna
						299	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur
						300	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat
						301	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri
Non Pelayaann Dasar	8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	302	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak
						303	Pengembangan Kabupaten Layak Anak
						304	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	9	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	85	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	305	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
						306	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
						307	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
						308	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)
				86	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	309	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
						310	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
						311	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
						312	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
						313	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	NO	PROGRAM NAMA PROGRAM	KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB				NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	10	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	88	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	314	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
						315	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						316	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						317	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
						318	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
						319	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
						320	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						321	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						322	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan
						323	Pemutakhiran Data
90	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	324	Inventarisasi tanah kas desa				
91	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	92	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	325	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY
						326	Pemanfaatan Tanah SG
						327	penyelesaian konflik-konflik pertanahan
						328	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						329	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						330	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						331	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						332	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						333	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
						334	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
		335	Kerjasama pengelolaan persampahan				
		336	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						337	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
						338	Evaluasi Adipura
			97	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		339	Pengkajian dampak lingkungan
						340	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
						341	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan
			98	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		342	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
						343	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
						344	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
			99	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		345	Pengembangan data dan informasi lingkungan
						346	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
						347	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup
						349	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup
						350	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						351	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						352	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
						353	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						354	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						355	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						356	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
						357	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				101	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
				102	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	358	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)
						359	Pelayanan Mutasi Penduduk
						360	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
						361	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
						362	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM
			103	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		363	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
						364	Sinkronisasi Kebijakan
						365	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
			104	Program Pengelolaan Data Kependudukan		366	Pemutakhiran Data Kependudukan
						367	Publikasi Kebijakan Kependudukan
						368	Penyusunan Buku Profil Kependudukan
						369	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
						370	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	105	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	371	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
						372	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
						373	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
						374	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
						375	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
						376	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan
						377	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna
						378	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
						379	Penyelenggaraan lomba desa
						380	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
						381	Pendampingan kegiatan TMMD
				106	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	375	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
				107	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	378	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
						379	Penyelenggaraan lomba desa
						380	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
						381	Pendampingan kegiatan TMMD

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						382	Bantul Ekspo dan karnaval
						383	Pengembangan desa siaga
						384	Pengembangan Kerjasama Desa
				108	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	385	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)
				109	Program pemberdayaan masyarakat	386	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
						387	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
Non Pelayaann Dasar	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	110	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	388	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						389	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
				111	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390	Pembangunan gedung kantor
						391	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						392	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						393	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						394	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
				112	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Keluarga Berencana	395	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
						396	Pelayanan KIE
						397	Pembinaan Keluarga Berencana
						398	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
						399	Pemantapan mekanisme operasional
						400	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
						401	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
						402	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
				113	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	403	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
						404	Lomba forum PIK remaja
						405	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				114	Program pelayanan kontrasepsi	406	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
				115	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	407	Pendampingan Forum IMP
				116	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	408	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
						409	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)
						410	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
						411	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA
						412	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
				117	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	413	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS
				118	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	414	Analisa Data dan Dampak Kependudukan
						415	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayanan Dasar	15	Perhubungan	Dinas Perhubungan	119	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	416	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
						417	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						418	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						419	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
						420	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
				120	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						422	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						423	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
						424	Pengadaan Kendaraan Bermotor
						425	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
121	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				122	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	426	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				123	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	427	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
						428	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
						429	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
				124	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	430	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
						431	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
						432	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan
						433	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
				125	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	434	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
				126	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	435	Pengadaan pagar pengaman jalan
						436	Pengadaan Flashing Lamp

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	16	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	126	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	437	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
				127	Pengembangan Kelalu-lintasan	438	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB
						439	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas
						440	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas
						441	"Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu
				128	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	442	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						443	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
				129	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	444	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						445	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
				130	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	446	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		131	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	447	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						448	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
						449	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
						450	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
				132	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	451	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
						452	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
				133	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	453	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
				134	Program kerjasama informasi dengan mas media	454	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
						455	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Non Pelayaann Dasar	17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	135	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						457	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			136	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		458	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
						459	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						460	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						461	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						462	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			137	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		463	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			138	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		464	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
			139	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif		465	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				140	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	466	Pengembangan Kewirausahaan
				141	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	467	Peningkatan Promosi UMKM
				142	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	468	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
						469	Peningkatan Manajemen Perkoperasian
						470	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi
						471	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA
Non Pelayaann Dasar	18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	143	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						473	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						474	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
				144	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	475	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						476	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						477	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						478	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			145	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		479	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			146	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		480	Penyusunan sistem manajemen mutu
						481	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
						482	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			147	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		483	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
						484	Peningkatan Promosi Penanaman Modal
						485	Pengembangan Potensi Penanaman Modal

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				148	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	486	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						487	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal
				149	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	488	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
				150	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	489	Sosialisasi pengelolaan perijinan
						490	Operasional pelayanan perijinan
						491	Pendataan dan penetapan perijinan
						492	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan
						493	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan
						494	Pengelolaan perijinan online
						495	Survei kepuasan masyarakat
						496	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo
						497	Lokakarya penanganan pengaduan
						498	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan
						499	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	19	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	151	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	500	Pengembangan potensi pemuda
				152	Program peningkatan peran serta kepemudaan	501	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
						502	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda
				153	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	503	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
				154	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	504	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
				155	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	505	Pengembangan olahraga rekreasi
						506	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Non Pelayaann Dasar	20	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	157	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	508	Pemberdayaan KID dan PPID
				158	Program pengembangan data/informasi	509	Penyusunan dan pengelolaan data daerah
						510	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	21	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	159	Pengkajian dan Pengembangan Persandian	511	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian
						512	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi
	22	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	160	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	513	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						514	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
						515	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						516	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						517	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						518	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
						519	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
						520	Pemutakhiran Data
162	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	519	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
163	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	520	Pemutakhiran Data				

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						521	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				164	Program Pengembangan Nilai Budaya	522	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
						523	Pembuatan Film Dokumenter
				165	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	524	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
				166	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	525	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
						526	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
						527	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
						528	Pengelolaan Tata Nilai
				167	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	529	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya
						530	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya
						531	Rehab Cagar Budaya
Non Pelayaann Dasar	23	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	532	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
						533	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

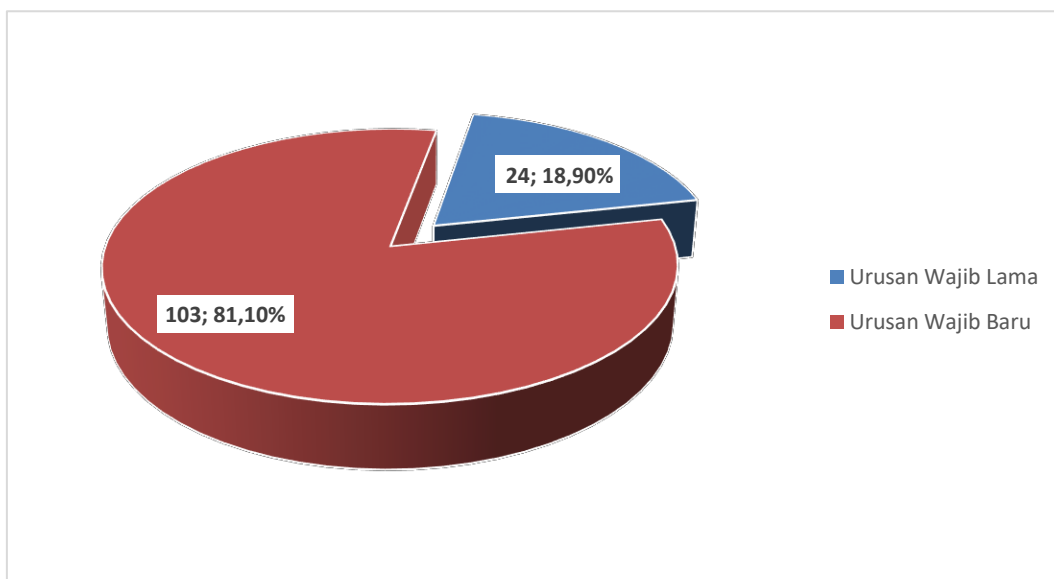
KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						534	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
			169	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		535	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
						536	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
						537	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
						538	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			170	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		539	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			171	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		540	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
			172	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		541	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan
						542	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
						543	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
						544	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

KATEGORI URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
	NO	JENIS URUSAN WAJIB		NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Non Pelayaann Dasar	24	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	173	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	545	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
						546	Pengembangan Sarpras Perpustakaan
						547	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan
						548	Peningkatan Promosi Perpustakaan
						549	Pengklasifikasian data
						550	Kajian sistem administrasi kearsipan
						551	Pengawasan Kearsipan
						552	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
						553	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
						554	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip
						555	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
						556	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis
						557	Peningkatan Pelayanan Kearsipan
				174	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		
				175	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		
				176	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		

Sumber: BKAD 2019, diolah

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

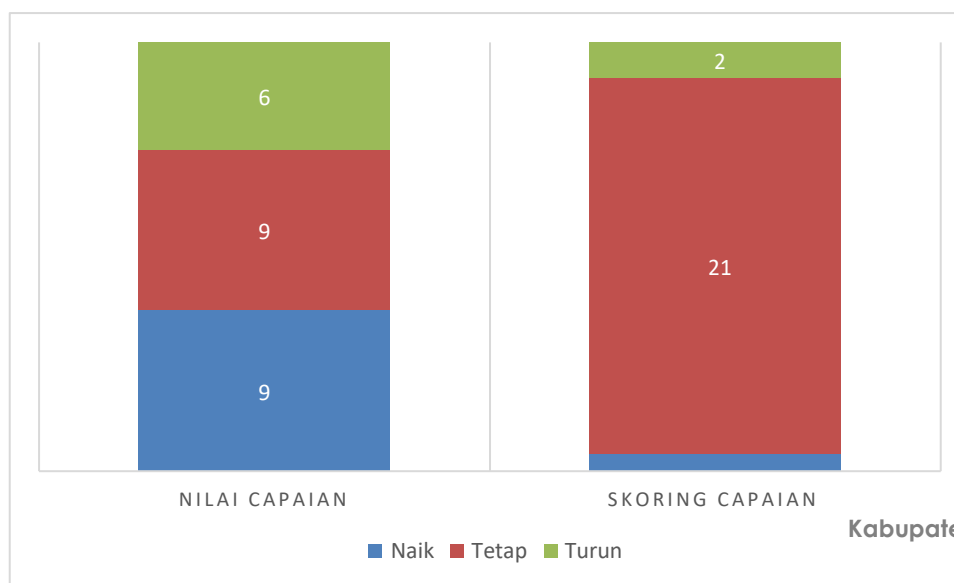
Penyusunan LPPD tahun 2019 berpedoman pada SE Kemendagri 120.04/6977/OTDA tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019. Terbitnya pedoman ini berimplikasi pada perubahan yang sangat signifikan terhadap sistematika pelaporan pada laporan kesesuaian materi maupun indikator kinerja kunci, baik pada tataran pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Jumlah indikator kinerja kunci urusan wajib pada tataran pelaksana kebijakan berubah dalam hal jumlah maupun uraian indikator. Indikator urusan wajib tersebut meningkat 189,55% menjadi 127 indikator dari sebelumnya berjumlah 67 indikator, dimana sekitar 81,10% (103 indikator) merupakan indikator baru dan 18,90% (24 indikator) merupakan indikator lama (lihat **Grafik 3.11**).



Grafik 3.11. Jumlah indikator urusan wajib lama dan baru di LPPD Tahun 2019

Capaian indikator urusan wajib pada LPPD tahun 2019 tidak semuanya bisa ditentukan kategori tingkat capaiannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar indikator urusan wajib (81,10%)

merupakan indikator baru sehingga tidak bisa diperbandingkan. Selain itu, standarisasi tingkat capaian terhadap indikator tersebut juga belum dapat diketahui. Perbandingan terhadap nilai capaian indikator urusan wajib lama (indikator yang ada di LPPD 2018 dan LPPD 2019), diketahui bahwa sebanyak 9 indikator mengalami peningkatan, 9 indikator tetap, serta 6 indikator mengalami penurunan di tahun 2019. Di sisi lain, skoring terhadap indikator tersebut menunjukkan bahwa ada 1 indikator mengalami kenaikan, 21 tetap dan 2 indikator menurun skoringnya. Hasil analisa perbandingan nilai dan skoring capaian antara indikator urusan wajib di tahun 2018 dan 2019 tersaji pada **Grafik 3.12**.



Grafik 3.12. Perbandingan nilai dan skoring capaian IKK urusan wajib tahun 2018 dengan 2019

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 6822 pegawai. Urusan pendidikan memiliki jumlah pegawai terbanyak sebesar 4442 pegawai, diikuti dengan urusan kesehatan sebanyak 1580 pegawai.

Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Kabupaten Bantul relatif sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase pegawai yang memiliki jenjang pendidikan tinggi (D-I – S3) sebesar 83,85%, sedangkan jenjang pendidikan rendah (SD – SMA) hanya sebesar 16,15%. Golongan pegawai juga menunjukkan bahwa sebesar 51,41% memiliki golongan III dan 37,23% memiliki golongan IV. Pada kategori jabatan struktural dan fungsional, proporsi pegawai bantul terbanyak yakni jabatan fungsional sebesar 70,87% yang melaksanakan urusan pendidikan dan kesehatan. Jumlah pegawai, pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Kabupaten tersaji pada **Tabel 3.27**.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.27. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, pejabat struktural dan fungsional dalam pelaksanaan urusan wajib di Kabupaten Bantul

Urusan Wajib	Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan							Golongan						Pejabat Struktural Dan Fungsional									
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan					
															II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
Pendidikan	4442	1	32	433	15	300	102	3371	186	2	21	191	1924	2306	0	1	1	4	15	0	278	3800	0	343
Kesehatan	1.580	6	24	245	18	1	782	330	173	1	13	298	1.143	126	0	1	3	10	54	26	304	984	0	198
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135	6	9	71	0	0	5	20	24	0	7	54	61	13	0	2	2	6	20	3	97	1	0	4
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10	0	0	3	0	0	3	2	2	0	0	3	5	2	0	0	0	1	4	1	4	0	0	0
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	80	2	7	33	0	0	4	21	13	0	1	17	54	8	0	2	1	7	17	0	52	0	0	1
Sosial	29	0	0	9	1	0	1	10	8	0	0	4	20	5	0	1	1	4	9	0	13	0	0	1
Tenaga Kerja	56	0	3	17	0	0	6	25	5	0	1	9	35	11	0	1	1	2	11	1	22	15	0	3
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	1	2	4	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0
Pangan	8	0	0	1	0	0	2	4	1	0	0	2	4	2	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0
Pertanahan	9	0	1	1	0	0	0	6	1	0	0	2	5	2	0	0	0	1	4	0	4	0	0	0
Lingkungan Hidup	113	2	14	59	0	0	2	24	12	0	9	64	32	8	0	1	1	3	13	2	89	0	0	4
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54	0	0	24	0	0	8	16	6	0	0	9	39	6	0	1	1	3	11	0	31	4	0	3
Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	0	0	6	0	0	2	4	2	0	0	1	9	4	0	0	0	1	3	0	10	0	0	0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29	0	0	8	0	0	3	13	5	0	0	1	24	4	0	1	1	2	9	0	15	0	0	1
Perhubungan	55	1	0	31	0	4	0	14	5	0	1	22	27	5	0	1	1	3	8	0	36	6	0	0

Kabupaten Bantul Tahun 2019

Urusan Wajib	Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan							Golongan							Pejabat Struktural Dan Fungsional								
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan					
								/ S1							II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
Komunikasi dan Informatika	37	0	0	5	0	1	3	25	3	0	0	7	27	3	0	1	1	1	7	0	17	3	0	7
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32	1	1	15	0	0	0	3	12	0	2	10	12	8	0	1	1	2	7	0	19	1	0	1
Penanaman Modal	33	0	0	7	0	0	3	16	7	0	0	4	23	6	0	1	1	4	11	0	12	4	0	0
Kepemudaan dan Olahraga	11	2	1	1	0	0	1	4	2	0	0	4	4	3	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0
Statistik	9	0	0	0	0	0	1	4	4	0	0	1	6	2	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0
Persandian	5	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	1	3	1	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0
Kebudayaan	33	0	1	7	0	0	7	12	6	0	0	8	20	5	0	1	1	3	9	0	17	1	0	1
Perpustakaan	31	0	0	8	1	2	7	9	4	0	0	5	23	3	0	1	1	2	5	0	12	10	0	0
Arsip	10	0	0	1	0	0	5	4	0	0	0	2	5	3	0	0	0	1	3	0	1	5	0	0
Total	6.822	21	93	988	35	308	948	3.942	484	3	55	720	3.507	2.540	0	17	18	66	236	34	1.049	4.835	0	567
Persentase (%)			16,15				83,85				0,81	10,55	51,41	37,23	0	0,25	0,26	0,97	3,46	0,5	15,38	70,87	0	8,31

Sumber: BKPP 2019, diolah

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan urusan wajib adalah sebesar Rp1.020.682.911.104,00. Anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Sepanjang tahun 2019, alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp907.790.749.464,32 atau sebesar 88,94%. Alokasi dan realisasi keuangan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 dengan status unaudited. Alokasi dan realisasi anggaran per urusan wajib sebagaimana tersaji pada **Tabel 3.28**.

Alokasi anggaran belanja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar adalah sebesar Rp824.825.702.259,00 atau 80,81% dari total anggaran penyelenggaraan urusan wajib. Sedangkan alokasi anggaran penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebesar Rp195.857.208.845,00 atau 19,19%. Serapan anggaran pada urusan wajib pelayanan dasar adalah sebesar Rp719.529.467.346,97 atau 87,23% dari total anggaran. Serapan anggaran pada urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebesar Rp188.261.282.117,35 atau 96,12% dari total anggaran.

Proporsi alokasi belanja pada urusan pendidikan dan kesehatan di Pemerintahan Kabupaten Bantul relatif cukup tinggi. Hal ini diperlihatkan dengan alokasi belanja pada urusan pendidikan sebesar Rp208.219.135.188,00 atau 20,40% dari total anggaran belanja urusan wajib sedangkan pada urusan kesehatan sebesar Rp310.530.397.672,00 atau 30,42% dari total anggaran belanja urusan wajib. Alokasi dan realisasi anggaran urusan wajib tersaji pada **Tabel 3.28**.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

Tabel 3.28. Alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 pada penyelenggaraan urusan wajib

NO	JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
Wajib Pelayanan Dasar		824.825.702.259,00	719.529.467.346,97	87,23
1	Pendidikan	208.219.135.188,00	195.397.271.438,51	93,84
2	Kesehatan	310.530.397.672,00	297.924.450.583,26	95,94
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.078.508.345,00	180.374.197.270,00	90,15
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.011.703.422,00	2.772.294.045,00	92,05
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	86.853.898.150,00	27.201.040.391,00	31,32
6	Sosial	16.132.059.482,00	15.860.213.619,20	98,31
Wajib Non Pelayanan Dasar		195.857.208.845,00	188.261.282.117,35	96,12
1	Tenaga Kerja	29.707.171.565,00	28.585.091.292,50	96,22
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	944.328.090,00	934.071.490,00	98,91
3	Pangan	756.230.000,00	751.784.000,00	99,41
4	Pertanahan	2.512.332.043,00	2.191.353.139,00	87,22
5	Lingkungan Hidup	32.796.079.200,00	31.239.041.482,74	95,25
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.767.730.550,00	9.655.279.547,00	98,85
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.071.874.300,00	9.009.431.700,00	99,31
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.690.779.200,00	11.505.422.392,00	98,41
9	Perhubungan	35.186.409.700,00	33.702.583.512,30	95,78
10	Komunikasi dan Informatika	20.050.508.057,00	19.218.712.667,09	95,85
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.706.624.952,00	4.548.097.117,00	96,63
12	Penanaman Modal	4.189.135.189,00	4.139.009.736,00	98,80
13	Kepemudaan dan Olahraga	19.036.197.178,00	17.932.386.340,50	94,20
14	Statistik	720.485.000,00	693.803.400,00	96,30
15	Persandian	805.233.577,00	777.812.184,00	96,59
16	Kebudayaan	6.899.113.668,00	6.762.274.328,00	98,02

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
17	Perpustakaan	5.336.871.702,00	4.976.603.689,22	93,25
18	Arsip	1.680.104.874,00	1.638.524.100,00	97,53
Jumlah		1.020.682.911.104,00	907.790.749.464,32	88,94

Sumber : BKAD 2019, diolah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun yang disusun berdasarkan atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan perencanaan pada urusan wajib pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana prasarana merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendukung kelancaran didalam pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan. Hingga tahun 2019, kondisi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan urusan wajib yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul belum semuanya tergolong baik. Namun demikian, pemerintah melalui OPD masing-masing telah berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kondisi sarana prasarana dengan melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana dimana didalamnya terdapat kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana.

8. Permasalahan dan solusi

Berikut ini beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan urusan wajib, lihat **Tabel 3.29**.

Tabel 3.29. Permasalahan dan solusi pada pelaksanaan urusan wajib.

Urusan	Permasalahan	Solusi
Pendidikan	Masih banyak SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi SPM	Dilaksanakan pembangunan ruang/gedung perpustakaan secara bertahap.
	Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM
	Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
	Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing
Kesehatan	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Masih di atas target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan / <i>update knowledge</i> EKG untuk dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per puskesmas 2. Pemeriksaan EKG untuk ibu hamil DIWAJIBKAN minimal 1 kali atau sesuai indikasi 3. Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai regio puskesmas 4. Pengadaan USG untuk Puskesmas 5. Rujukan ibu hamil ke Puskesmas yang mempunyai USG (rujukan horizontal), pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda sesuai Perda yang baru 6. Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes dioptimalkan, gunakan SPO dan check list binwasdal yang telah disusun, SPO punishment nakes yang bermasalah 7. Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian kematian ibu tidak berulang 8. Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko 9. Penyusunan SOP pendampingan rujukan (follow up) 10. Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS dan BPJS kesehatan
	Peningkatan Tajam Kasus DBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan

Urusan	Permasalahan	Solusi
		melepas nyamuk Wolbacia
		2. Mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue
		3. Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD
		4. Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN
		5. Melakukan dan koordinasi di tingkat kecamatan
		6. Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan.
		7. Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue
		8. Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik.
		9. Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE
		10. KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor
		11. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN
	Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa	1. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada OPD di Kab Bantul 2. Skrining kepada masyarakat umum yang dilakukan puskesmas 3. Deteksi dini pada penderita retardasi mental 4. Pengobatan dan pemantaun 5. keteraturan minum obat.
	Banyak pasien HIV AIDS yang loss to follow up	Validasi data layanan LFU (Lost Follow Up) dan kerjasama dengan Pendukung Sebaya telah ditingkatkan dengan harapan pasien LFU dan alpa dapat ditekan untuk masa yang akan dating
Pekerjaan umum dan penataan ruang	Banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten bukan kelasnya, sehingga mengurangi umur konstruksi jalan kabupaten terutama di jalur jalur penambangan galian C. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang	- Mengidentifikasi fasilitas umum/ fasilitas sosial yang sudah ada Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C.

Urusan	Permasalahan	Solusi
	telah terbangun	
	Pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga perlu didukung oleh tenaga terampil yang bersertifikat.	Sosialisasi pada masyarakat untuk ikut menjaga kondisi infrastruktur yang ada.
	Banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten bukan kelasnya, sehingga mengurangi umur konstruksi jalan kabupaten terutama di jalur jalur penambangan galian C.	Pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi.
	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang telah terbangun	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Ruang
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan	Penanganan kawasan permukiman kumuh perlu kolaborasi dengan berbagai sektor
	Keterbatasan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak huni	Sinkronisasi penanganan rumah tidak layak huni dengan data miskin
	Pemakaman umum belum bisa digunakan karena belum ada peraturan pengelolaannya	Penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan pemakaman umum
Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait alam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
	Dalam rangka memenuhi rasio Linmas dengan RT, terkendala masih kurangnya penghargaan terhadap keberadaan Linmas, sehingga minat untuk menjadi anggota Linmas masih kurang. Sementara anggota Linmas yang masih berusia Muda belum dapat secara permanen menjadi anggota, hal ini karena dituntut kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka untuk pindah domisili.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menambah minat masyarakat menjadi anggota Linmas dengan menambah fasilitas antara lain pengadaan seragam Linmas dan Kartu Anggota Linmas. 2. Optimalisasi anggota Linmas untuk melakukan fungsi Linmas dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) di lingkungannya.
	Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan <i>stakeholder</i> lainnya dalam penanganan dan pengelolaan	1. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kelembagaan dalam memaksimalkan penanganan dan

Urusan	Permasalahan	Solusi
	bencana	<p>pengelolaan bencana sehingga bisa menekan resiko bencana.</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam proses pencegahan dan penanganan bencana di Kabupaten Bantul</p>
	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.	Menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk menanggulangi bencana baik dari pra bencana sampai pasca bencana
	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat	Meningkatkan dan mengaktifkan jaringan informasi dan komunikasi yang ada, baik secara verbal (komunikasi lewat radio. Whatshapp aplikasi dll) maupun non verbal (sosialisasi, simulasi, publikasi lewat media baliho atau slogan dll) sehingga informasi dapat sampai pada masyarakat
	Tingkat bencanaan Kabupaten Bantul memiliki tingkat kerawanan tinggi	BPBD Kabupaten Bantul harus memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC), Pusdalops Penanggulangan Bencana, dan unit pelaksana tugas pemadam kebakaran untuk menjawab tingginya intensitas kejadian kebakaran di Kabupaten Bantul. Pilihan diatas didasarkan atas kebutuhan penanggulangan bencana yang sistematis, terencana, dan terpadu
Sosial	Rujukan dan pengambilan pasien atau klien baik ke RSJ maupun ke panti tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan pemakaman jenazah terlantar karena berupa layanan kepada masyarakat sesuai dengan kejadian/kasus di lapangan. Hal ini juga dipengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya.
	Pada Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah, data Prelist yang akan di entry hasil verifikasinya tidak dapat di proses oleh aplikasi yang dari tnp2k	Melakukan Bimtek entru prelist dan sosialisasi MPM (mekanisme Pemutahiran Mandiri)
	Beberapa kader desa yang berperan melakukan purifikasi belum paham dengan mekanisme yang dilaksanakan	Melakukan bimtek kepada kader desa petugas verifikasi di lapangan

Urusan	Permasalahan	Solusi
Tenaga kerja	Kesempatan kerja yang masih terbatas.	Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui <i>job canvassing</i> dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja <i>on-line</i> lebih ditingkatkan.
	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.	Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut. 2. Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.
	Inkonsistensi antar peraturan/perundangan terkait ketenagakerjaan	Intensifkan konsultasi ke K/L baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pangan	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak pada semua klaster.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi sosialisasi, advokasi, dan KIE menuju Bantul Kota Layak Anak sampai ke tingkat desa 2. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli anak. 3. Mengoptimalkan fungsi fasilitator forum anak terutama untuk pendampingan forum anak di kecamatan dan desa
	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Pelatihan untuk SDM penanganan korban kekerasan.
Pangan	Belum semua Pekarangan dimanfaatkan secara baik	Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA
	Masih adanya Desa Rawan Pangan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Perlunya dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
	Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
	Kurangnya pemanfaatan pangan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan pangan berbasis sumberdaya lokal 2. Pelatihan inovasi pengolahan pangan berbasis sumber daya local sehingga bisa meningkatkan nilai jual
Belum beragamnya pola konsumsi pangan saat masih terfokus pada beras	Mendorong diversifikasi pangan dengan pangan local	
Masih terbatasnya informasi harga dan pasokan pangan yang sangat	Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan yang rutin dan	

Urusan	Permasalahan	Solusi
	dibutuhkan untuk pengendalian stabilitas harga dan pasokan pangan guna menunjang Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat yang terjamin dan terjangkau.	informatif
	Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan oleh masyarakat guna mewujudkan Distribusi pangan yang merata dan terjangkau	Pengembangan dan Pembedayaan Distribusi Pangan Masyarakat
Pertanahan	Juknis nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di wilayah DIY baru terbit pada bulan Oktober 2019 menjadi factor penghambat penatausahaan / pensertifikatan tanah desa	Sosialisasi dan koordinasi intensif dan sinerginas antar pihak desa, DPTR, Panitikismo, BPN dan pihak terkait pelaksanaan pensertifikatan tanah desa di wilayah Kabupaten Bantul
	Pemanfaatan tanah belum semua sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi aturan terkait pemanfaatan tanah kepada masyarakat 2. Mngintensifkan pengendalian Pemanfaatan tanah dengan melibatkan pihak desa dan stakeholder terkait
	Adanya medan / lahan yang sangat ekstrim (pegunungan, jurang dan lainnya) sehingga menjadi permasalahan terkait teknis pelaksanaan dalam pengukuran tanah	Pemanfaatan sistem teknologi untuk pengukuran di masa mendatang
Lingkungan hidup	Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul dalam upaya peningkatan kualitas air sungai 2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai 3. Pembinaan terhadap penaatan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha
	Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan	Penambahan luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat.
	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah <i>mindset</i> cara pandang mayarakat terhadap sampah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan	Permasalahan	Solusi
	sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)	<p>(penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menggiatkan dan menguatkan kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap desa 3. Peningkatan peran BUMDes dalam unit usaha penanganan sampah 4. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan hidup
Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0 – 16 tahun belum tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan dinas pendidikan untuk melakukan kerjasama mendata anak yang belum memiliki KIA. 2. Memberikan sosialisasi kepada guru dan orang tua
	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan kegiatan jemput bola akta kelahiran 2. Membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi
	Pemuthakiran data kependudukan belum optimal	Menciptakan inovasi smart on , untuk proses input perubahan data menggunakan IT (HP)
	Kesadaran masyarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah yang mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid dan akurat	Menerbitkan KTP baru (ktp dengan status baru) bagi penduduk bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut. Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten bantul
	Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian masih rendah, masyarakat hanya mengurus akta kematian jika akan dibutuhkan	Sosialisasi dan menciptakan inovasi Akasi Simpati (Pembuatan akta kematian sehari jadi)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya sinergitas pemangku kepentingan untuk program KB sehingga program KKBPK mengalami stagnasi	Keterlibatan secara intens lintas sektor
	Kurangnya jumlah PKB	Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader

Urusan	Permasalahan	Solusi
	Angka <i>unmet need</i> masih cukup tinggi 10,55%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2. penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontak)
	Masih tergantungnya pelayanan pemasangan kontrasepsi pada Baksos BKKBN Perwakilan DIY, sehingga akseptor MOP berubah menjadi MOW.	Menganggarkan untuk pelaksanaan MOP di tahun mendatang.
	Ada beberapa akseptor MOP yang mengalami kegagalan di tahun 2017, hal ini mengakibatkan kekhawatiran kegagalan MOP pada akseptor.	Memberikan pemahaman kepada calon akseptor melalui KIE.
	Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi Remaja. 2. Peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan perihal Kesehatan Reproduksi.
	Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R) belum berjalan secara maksimal	Penguatan kelembagaan dengan peningkatan manajemen kelembagaan dan anggaran
	Pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum sesuai dengan harapan.	Pembinaan Kelompok UPPKS melalui Workshop, Study Banding dan Pelatihan
	Pelaporan data keluarga masih belum optimal	Bimtek pada wali data
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih banyak sarana Pengelola Air Bersih (PAB) yang belum dapat berfungsi secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat. 2. Peningkatan pemeliharaan 3. Penguatan Kelembagaan
	Belum optimalnya pengelolaan profil desa	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profil Desa
	Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan pelaksanaan di tingkat desa dalam mengelola bantuan kenangan kepada Pemerintah Desa(BKK&P2MD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat
	Belum terlaksananya kegiatan Lomba	Mendorong dan meningkatkan

Urusan	Permasalahan	Solusi
	Desa di tingkat Kecamatan sesuai dengan Permendagri No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa(Lomba Desa)	kapasitas peran kecamatan dalam menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai Permendagri No 81 Tahun 2015
	Kekuatan perencanaan pembangunan desa belum secara maksimal didasarkan atas potensi dan masalah yang ada di desa	Mengadakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal pelaksanaan musrenbangdes
	Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai 2. Intensifikasi pelatihan
	Sulitnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat/ warga binaan	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui best practice pelaku usaha dan memberikan materi tentang kewirausahaan pada warga binaan peserta program.
	Belum optimalnya program pengembangan ekonomi lokal desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi pembentukan bumdes 2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes 3. Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa(KUEMD) 4. Optimalisasi pengelola pasar desa
	Dengan berakhirnya program PNPM maka belum ada payung hukum untuk UPK(Unit Pelaksana Kegiatan) dan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	Di konsultasikan kenotaris untuk pembentukan badan hukum
Perhubungan	Semakin menurunnya sarana dan kualitas angkutan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi terhadap awak angkutan umum dan masyarakat. 2. Revitalisasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum
	Kelaiakan kendaraan yang kurang	Peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
	Terjadi kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu pada jam-jam tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait (Polres, PU) dalam upaya penanganan peningkatan arus yang terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu lintas. 2. Melakukan peremajaan prasarana guna melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa traffic cone, road barrier, rambu portable dan tali pembatas
	Kurangnya kesadaran tertib lalu lintas	1. Melaksanakan Pengawasan dan

Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>pengendalian parkir</p> <p>2. Melaksanakan pam insidentil dalam rangka pengamanan lalu lintas pada event tertentu.</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media</p>
	Belum optimalnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, <i>guardrail</i> , <i>flashing lamp</i> dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU
	Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memenuhi standar pelayanan	Melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara angkutan umum.
Komunikasi dan Informatika	Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul	Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi Fiber Optic yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE
	Belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master Plan IT, juga	Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul
	Belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.	Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.
	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.	Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
	tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul.
	Kurangnya SDM Koperasi yang kompeten dan bersertifikat	Fasilitasi pelatihan kompetensi
	Belum adanya penilaian kinerja bagi koperasi (masih terbatas KSP/USP)	Pemeringkatan koperasi
	Masih terdapat koperasi belum taat terhadap aturan (perizinan, NPWP, dll)	Mendorong koperasi patuh terhadap aturan (pengawasan kepatuhan)
	Kesulitan pengurusan izin melalui OSS	Pendampingan bagi koperasi dalam mengurus izin di OSS
	Kurang optimalnya peran Dekopinda	Mendorong Dekopinda berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi
	Masih kurangnya inovasi produk dan	Diadakan pelatihan peningkatan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan	Permasalahan	Solusi
Penanaman modal	pemasaran produk bagi UMKM	inovasi dan pemasaran secara online maupun mengikuti pameran.
	Masih kurangnya pengetahuan terkait manajemen bisnis bagi UMKM	Diadakan pelatihan manajemen kewirausahaan
	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul
		Percepatan operasionalisasi sarana dan prasarana Kawasan Industri Piyungan, pembentukan Kawasan Industri di Kawasan Peruntukan Industri Sedayu dan Pajangan, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital sebagai daya tarik utama investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul
Kepemudaan dan Olahraga		Percepatan proses perizinan dengan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OSS
	Sulitnya menemukan pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor pembangunan, yang memiliki kiprah atau pengaruh kepada masyarakat.	Melakukan kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda pelopor, dan mendampingi mereka agar dapat lolos dan sukses dalam seleksi tingkat nasional.
	Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang kepemudaan dan olahraga	Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai proses penyusunan regulasi kepemudaan dan olahraga.
Persandian	Pelajar berprestasi olahraga Kabupaten Bantul sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain, karena Kabupaten Bantul belum mampu memberikan fasilitas yang lebih baik kepada atlet berprestasi.	Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerimaan siswa baru dari atlet berprestasi dan pemberian beasiswa bagi mereka.
	Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, terutama belum memiliki Gedung Olahraga dan kolam renang standar nasional.	Diusulkan pembangunan Gedung Olahraga dan kolam renang yang memiliki standar nasional.
	Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN
	Masih terbatasnya personil sandi	Peningkatan kualitas dan kompetensi

Urusan	Permasalahan	Solusi
	terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman.	personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian.
Perpustakaan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi	1. Meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat 2. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam promosi perpustakaan dengan pembentukan Satgas Literasi
	Belum optimalnya sarana prasarana Perpustakaan Daerah (terbatasnya ruang baca dan koleksi perpustakaan), Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Perpustakaan komunitas serta TBM, dan Pojok Baca	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perpustakaan, missal dengan dibangunnya Pojok Baca, penambahan koleksi perpustakaan
Kearsipan	Belum semua OPD memiliki SDM Kearsipan/ Arsiparis	1. Rekrutment PHL dan mengusulkan formasi Arsiparis 2. Bimtek Kearsipan
	Belum Optimalnya Sarpras Pengolahan Arsip di OPD	3. Pemenuhan Sarpras pengelolaan arsip secara bertahap oleh OPD
	Pengelolaan Arsip di masing-masing OPD belum sesuai standar	1. Implementasi UU, Perda dan Perbup Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan. 2. Dilakukakn Pendampingan kearsipan, pengawasan kearsipan serta monev penyelenggaraan kearsipan di OPD.

Sumber: Bappeda 2019

b. Ringkasan Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 6 urusan yakni kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; transmigrasi. Urusan pilhan yang dilaksanakan tersaji pada **Tabel 3.30**.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan pilihan di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh 5 (lima) OPD, lihat **Tabel 3.30**. Dari kelima OPD yang

Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>melaksanakan urusan pilihan, hanya Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pilihan lebih dari 1 (satu) urusan, yakni urusan pertanian serta urusan kelautan dan perikanan. Keempat OPD lainnya hanya melaksanakan 1 (satu) urusan saja. Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata; urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan; urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian; serta urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>

2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pilihan di tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui OPD dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RKPD. Keseluruhan program yang dilaksanakan pada urusan pilihan adalah sebanyak 32.. Program tersebut dilaksanakan dalam 78 kegiatan. Penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2019 tersaji pada **Tabel 3.30**.

Tabel 3.30. Jenis urusan pilihan, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019

NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN				
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN			
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1	Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya			
					2	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan			
					3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan			
					4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap			
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			
					6	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi			
					7	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			
					8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			
					9	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			
				10	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			
			4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata			
			5	Program pengembangan pemasaran pariwisata					

NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN			
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN		
3	Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	6	Program pengembangan destinasi pariwisata	13	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata		
					14	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		
					15	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata		
					16	Pengembangan daerah tujuan wisata		
					17	Peningkatan daya tarik Wisata		
					18	Peningkatan Pelayanan Kepariwisata		
					7	Program pengembangan Kemitraan	19	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata
							20	Pemberdayaan Desa Wisata
							21	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
							22	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
							23	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
					8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
							25	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
			26	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				
			27	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				
			28	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				
			9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			11	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	30	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
					31	Pengembangan Agribisnis Tembakau
					32	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan
					33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)
					34	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman
					35	Pengembangan Agribisnis Pertanian
			12	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	36	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
					37	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
			13	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	38	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan
					39	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan
					40	Peningkatan Kesehatan Ternak
			14	Program peningkatan produksi hasil peternakan	41	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah
			15	Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	42	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran

NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	43	Peningkatan Prasarana Pertanian
					44	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17	Program Potensi Energi	45	Pendataan Potensi Energi
5	Perdagangan	Dinas Perdagangan	18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					47	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
					48	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
			19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
					50	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					51	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					52	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					53	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			21	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55	Penyusunan sistem manajemen mutu
					56	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

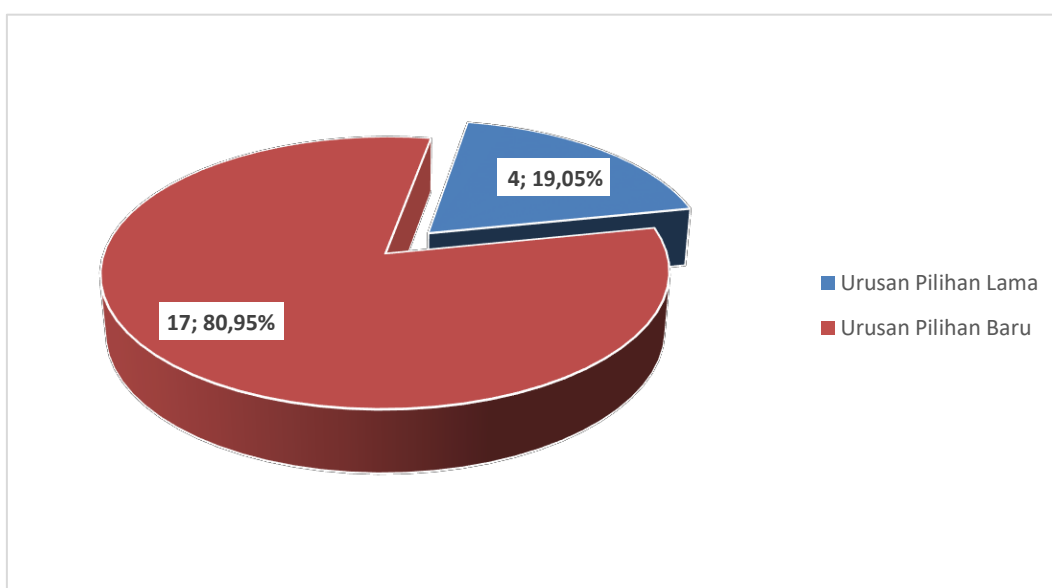
NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			22	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	57	Pelayanan Kemetrolagian Daerrah
			23	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	58	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
					59	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah
			24	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	60	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
					61	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang
					62	Peningkatan pelayanan perdagangan
			25	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	63	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
					64	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
			26	Program Pemberdayaan Pedagang	65	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar
			27	Program Penataan Pasar Rakyat	66	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat
					67	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI
					68	Revitalisasi Pasar Rakyat
					69	Insentififikasi Pendapatan Pasar
6	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	28	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	70	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri
			29	Program pengembangan industri kecil dan menengah	71	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul

NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					72	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM
					73	Pengembangan Pemasaran IKM
					74	Pengembangan Industri Kreatif
			30	Program penataan struktur industri	75	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri
			31	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	76	Pemberdayaan IKM Sentra
					77	Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
7	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32	Program transmigrasi regional	78	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi

Sumber: BKAD 2019, diolah.

3. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

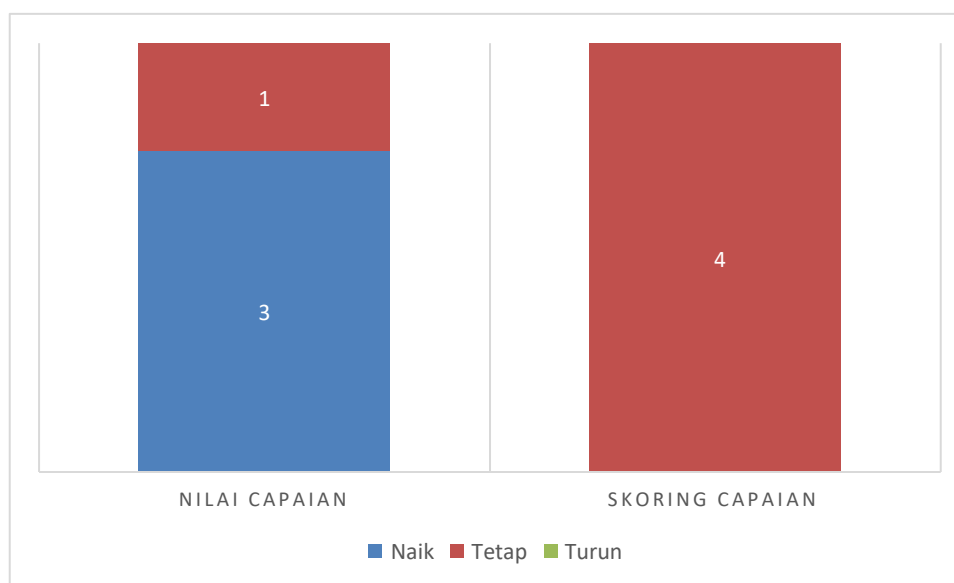
Jumlah indikator kinerja kunci urusan pilihan pada tataran pelaksana kebijakan berubah dalam hal jumlah maupun uraian indikator. Indikator urusan pilihan tersebut meningkat 190,9% menjadi 21 indikator dari sebelumnya berjumlah 11 indikator, dimana sekitar 80,95% (17 indikator) merupakan indikator baru dan 19,05% (4 indikator) merupakan indikator lama (lihat **Grafik 3.13**).



Grafik 3.13. Jumlah indikator urusan pilihan lama dan baru di LPPD Tahun 2019

Capaian indikator urusan pilihan pada LPPD tahun 2019 tidak semuanya bisa ditentukan kategori tingkat capaiannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar indikator urusan pilihan (80,95%) merupakan indikator baru sehingga tidak bisa diperbandingkan. Selain itu, standarisasi tingkat capaian terhadap indikator tersebut juga belum dapat diketahui. Perbandingan terhadap nilai capaian indikator urusan pilihan lama (indikator yang ada di LPPD 2018 dan LPPD 2019), diketahui bahwa sebanyak 9 indikator mengalami peningkatan, 9 indikator tetap, serta 6 indikator mengalami

penurunan di tahun 2019. Di sisi lain, skoring terhadap indikator tersebut menunjukkan bahwa ada 1 indikator mengalami kenaikan, 21 tetap dan 2 indikator menurun skoringnya. Hasil analisa perbandingan nilai dan skoring capaian antara indikator urusan wajib di tahun 2018 dan 2019 tersaji pada **Grafik 3.14**.



Grafik 3.14. Perbandingan nilai dan skoring capaian IKK urusan pilihan tahun 2018 dengan 2019

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Kabupaten Bantul Tahun 2019

Jumlah pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menangani urusan pilhan adalah sebanyak 364 pegawai. Kualifikasi pendidikan pegawai pada urusan pilihan relatif cukup baik dimana lebih dari setengahnya atau 50,39% memiliki jenjang pendidikan tinggi atau diatas SMA, sisanya sekitar 49,61% memiliki jenjang pendidikan rendah atau dibawah SMA. Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan rendah sebagian besar merupakan lulusan SMA yakni sebanyak 173 dari total 193 pegawai. Pada kelompok golongan, persentase terbanyak merupakan pegawai golongan III sebesar 48,63% diikuti golongan II sebesar 34,62%

Kabupaten Bantul Tahun 2019

kemudian berturut turut golongan IV (12,64%) dan golongan I (4,12%). Pada kelompok pejabat struktural dan fungsional, staf merupakan jumlah yang terbanyak sebesar 254 pegawai atau 69,78%. Jumlah terbanyak berikutnya adalah pegawai eselon IVA sebesar 40 pegawai atau 10,99%. Sedangkan pejabat fungsional yang menangani urusan pilihan hanya sebanyak 39 pegawai atau 10,71%. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, umlah pejabat struktural dan fungsional tersaji pada **Tabel 3.31**.

Tabel 3.31. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada urusan pilihan di Kabupaten Bantul

Urusan Pilihan	Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan								Golongan				Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional										
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan					
															II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
Kelautan dan Perikanan	17	0	0	6	0	0	1	6	4	0	0	7	8	2	0	0	0	1	4	1	11	0	0	0
Pariwisata	66	2	7	36	0	0	8	9	4	0	5	34	21	6	0	1	1	3	8	0	52	1	0	0
Pertanian	158	0	2	59	1	0	11	78	32	0	2	35	96	25	0	0	1	2	15	4	97	34	0	5
Perdagangan	109	3	6	69	0	0	1	20	10	0	8	46	45	10	0	1	1	3	10	1	86	4	0	3
Perindustrian	11	0	0	2	0	0	2	6	1	0	0	3	5	3	0	0	0	2	2	0	6	0	0	1
Transmigrasi	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Total	364	5	15	173	1	0	23	121	51	0	15	126	177	46	0	2	3	11	40	6	254	39	0	9
Persentase (%)			49,61				50,39				4,12	34,62	48,63	12,64	0	0,55	0,82	3,02	10,99	1,65	69,78	10,71	0	2,47

Sumber : BKPP, 2019

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 *unaudited*, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan urusan pilihan adalah sebesar Rp80.864.712.640,00. Sepanjang tahun 2019, alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp64.412.951.811,94 atau sebesar 79,66%. Alokasi dan realisasi anggaran per urusan pilihan tahun 2019 tersaji pada **Tabel 3.32**Tabel 3.28.

Realisasi belanja penyelenggaraan urusan pilihan terbesar adalah urusan perdagangan dengan nilai realisasi sebesar Rp22.347.518.722,59 atau 96,82% dari total anggaran belanja pada urusan perdagangan atau 34,69% dari total keseluruhan realisasi belanja pada urusan pilihan. Urusan pertanian memberikan sumbangsih terhadap rendahnya capaian realisasi belanja pada urusan pilihan dimana hanya sekitar 53,96% yang dapat terealisasi dari total anggaran pada urusan pertanian.

6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun yang disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perencanaan pada urusan pilihan pada tahun 2018 dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD dan RKPD.

NO	JENIS URUSAN PILIHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PELAKSANA	PROGRAM		KEGIATAN	
			NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN

Tabel 3.32. Alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 pada penyelenggaraan urusan pilihan

NO	JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
Pilihan		80.864.712.640,00	64.412.951.811,94	79,66
1	Kelautan dan Perikanan	2.639.667.600,00	2.586.496.908,07	97,99
2	Pariwisata	20.264.105.700,00	19.327.011.298,00	95,38
3	Pertanian	31.739.995.629,00	17.127.009.053,28	53,96
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	96.953.500,00	96.941.500,00	99,99
5	Perdagangan	23.081.597.211,00	22.347.518.722,59	96,82
6	Perindustrian	2.596.966.500,00	2.508.946.680,00	96,61
7	Transmigrasi	445.426.500,00	419.027.650,00	94,07
	Jumlah	80.864.712.640,00	64.412.951.811,94	79,66

Sumber : BKAD, 2019

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan urusan pilihan masih belum semuanya bagus. Beberapa sarana prasarana masih perlu untuk ditingkatkan kondisinya ataupun perlu untuk diperbaharui. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui OPD teknis yang menangani urusan pilihan telah menganggarkan dan melaksanakan program kegiatan untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana.

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dari penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pilihan tersaji pada **Tabel 3.33**.

Tabel 3.33. Permasalahan dan solusi pada penyelenggaraan urusan pilihan

Urusan	Permasalahan	Solusi
Kelautan dan perikanan	Kurang maksimalnya produksi perikanan tangkap karena pengaruh cuaca	1. Pelatihan teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair) dengan produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya 2. Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
	Meningkatnya alih fungsi lahan perikanan	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan tempat budidaya
	Masih adanya kejadian penyakit ikan	1. Pelatihan budidaya ikan CBIB sehingga dapat mencegah penyakit ikan 2. Peningkatan Pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan secara teratur
Pariwisata	Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah	Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPANDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
	Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kabupaten Bantul	Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata

Urusan	Permasalahan	Solusi
Pertanian	Belum optimalnya sarana dan prasarana obyek wisata	Penguasaan lahan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangnya, sehingga pembangunan destinasi wisata lebih optimal
	Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Perbanyak demplot dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan minat petani untuk menerapkan teknologi baru
	Regenerasi petani yang lambat	1. Sosialisasi, pembentukan dan pelatihan taruna tani 2. Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani
	Akses pasar belum mantap dan skala masih kecil	Pelatihan tentang pemasaran sehingga meningkatkan pengetahuan tentang strategi menembus pasar Dukungan terhadap terciptanya akses pasar dengan menjalin kemitraan
Perdagangan	Alih fungsi lahan pertanian.	Percepatan Perda LP2B dan Sertifikasi gratis lahan pertanian
	Belum optimalnya penanganan pascapanen.	Pelatihan penanganan pasca panen Dukungan terhadap inovasi baru dalam pengolahan hasil panen
	Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal.	Optimalisasi pengelolaan peternakan.
	Masih munculnya permasalahan pada komoditas bahan pokok, antara lain:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya gejolak harga cabai karena kurangnya pasokan • Gejolak harga bawang merah (produksi Bantul) kalah bersaing dengan kualitas kompetitor 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pasokan dengan kemitraan dengan pelaku usaha. • Fasilitasi dengan stakeholder/shareholder dalam memberikan nilai tambah produk cabai merah • Revitalisasi Pasar Lelang Bawang Merah di Parangtritis, Kretek
	Fungsi gudang dengan mekanisme resi belum optimal	1. Evaluasi pengelola gudang SRG 2. Optimalisasi pengelolaan gudang SRG
	Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Sibapok) belum bisa dilaksanakan oleh Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan	1. Kemitraan dengan kominfo dalam penyediaan jaringan internet 2. Peningkatan kapasitas admin sibapok untuk 5 pasar sampel (Pasar Bantul, Niten, Piyungan, Imogiri, Pijenan) 3. Monev kegiatan sibapok di 5 pasar sampel
Penataan dan pemanfaatan PSG belum optimal	Revitalisasi PSG : 1. Peningkatan Sarpras (panggung hiburan, public area, industri pariwisata, relokasi PKL) → kemitraan/program kolaboratif 2. Pengelolaan pedagang 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan PSG (aspek product, harga product,	

Urusan	Permasalahan	Solusi
	<p>Permasalahan daya saing pasar, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak bertambahnya/berkurangnya pengunjung pasar • Kurangnya daya saing pedagang pasar dengan toko modern dan pedagang keliling <p>Permasalahan kondisi sarpras pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empat puluh satu persen (13 pasar) dalam kategori kurang baik • Enam persen (2 pasar) dalam kategori rusak <p>Tiga puluh delapan persen (32 pasar) Penguasaan kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar rakyat dan kawasan PKL belum clear and clean</p> <p>Penataan dan pemanfaatan los pasar bantul lt.2 belum optimal</p> <p>Penyelenggaraan kemetrolgion yang belum optimal</p>	<p>aspek promosi, aspek tempat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulasi perubahan jam operasi pasar • promosi pasar antara lain melalui undian berhadiah dan promo/diskon secara berkala • mendorong pedagang pasar untuk melakukan inovasi teknik penjualan • Rehab sedang untuk Pasar Bantul, Pasar Niten, Pasar Piyungan, Pasar Sorobayan, Pasar Pijenan, Pasar Jodog, Pasar Turi, Pasar Pundong, Pasar Gatak, Pasar Barongan, Pasar Dlingo, Pasar Pleret dan Pasar Klitikan Niten • Rehab berat untuk Pasar Mangiran dan Pasar Gumulan • Fasilitasi penguasaan kepemilikan tanah kas desa dan Sultan Ground untuk pasar rakyat dan kawasan PKL. • Sewa tanah kas desa untuk pasar rakyat <p>Revitalisasi Lt.2 Pasar Bantul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Updating data wajib tera • Sosialisasi • Pengawasan kemetrolgion • Peningkatan kapasitas untuk SDM • Penyempurnaan gedung metrologi • Pengadaan alat standar kemetrolgion
Perindustrian	<p>Perkembangan sentra dan industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah belum optimal</p> <p>Keterbatasan pemenuhan bahan baku</p> <p>Belum optimalnya perkembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Sedayu- Pajangan</p>	<p>Dilakukan identifikasi potensi daerah yang bisa dijadikan basis Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Peningkatan kerjasama antara dengan model hexahelic (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha/asosiasi, Pelaku Usaha, Mass Media, Masyarakat, Dunia Pendidikan)</p> <p>Peningkatan sarana dan infrastruktur KPI Piyungan guna memudahkan akses dalam melakukan usaha dan untuk menarik minat para investor dan melaksanakan review Master Plan KPI Sedayu - Pajangan</p>
Transmigrasi	<p>Data Industri dan Industri Kreatif belum aktual dan faktual</p> <p>Alokasi penempatan transmigran tidak sesuai dengan animo calon transmigran</p>	<p>Dilaksanakan updating data Industri dan Industri Kreatif</p> <p>Memberikan gambaran lokasi daerah tujuan melalui penyuluhan, dan penajjakan kerja sama</p>

Urusan	Permasalahan	Solusi
	Adanya kebijakan untuk menanggulangi pola <i>costsharing</i>	ketransmigrasian ke daerah tujuan baru Konsultasi ke pusat untuk membuka kembali peluang keberlanjutan <i>cost sharing</i>

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan dan Fungsi Penunjang lainnya)

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul adalah sebanyak 7 (tujuh) fungsi, meliputi (1) Administrasi Pemerintahan, (2) Pengawasan, (3) Perencanaan, (4) Keuangan, (5) Kepegawaian, (6) Penelitian dan Pengembangan, dan (7) Fungsi lainnya.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 23 OPD yang terdiri dari (1) Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan; Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; Bagian Perekonomian; Bagian Hukum; Bagian Humas dan Protokol; Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Organisasi; Bagian Umum), (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (3) Badan keuangan dan Aset Daerah, (4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); (6) Inspektorat, (7) Kecamatan Bambanglipuro, (8) Kecamatan Banguntapan, (9) Kecamatan Bantul, (10) Kecamatan Dlingo, (11) Kecamatan Imogiri, (12) Kecamatan Jetis, (13) Kecamatan Kasihan, (14) Kecamatan Kretek, (15) Kecamatan Pajangan, (16) Kecamatan Pandak, (17) Kecamatan Piyungan, (18) Kecamatan Pleret, (19) Kecamatan Pundong, (20) Kecamatan Sanden, (21) Kecamatan Sedayu

(22) Kecamatan Sewon, dan (23) Kecamatan Srandakan.

2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui OPD dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RKPD. Keseluruhan program yang dilaksanakan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebanyak 170. Program tersebut dilaksanakan dalam 687 kegiatan. Penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2019 tersaji pada **Tabel 3.34**.

Tabel 3.34. Jenis urusan penunjang, OPD pelaksana, serta program dan kegiatan pada urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
					2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					3	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
					4	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	Pengadaan barang bercorak kesenian
					6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
					7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
					8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					9	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya
					10	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
					11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					12	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
			3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
					15	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum
					16	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	17	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
					18	Publikasi peraturan perundang-undangan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					20	Pengawasan produk hukum pemerintah desa
					21	Penyuluhan Hukum
					22	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
			5	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	23	Penyusunan Produk Hukum Daerah
					24	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara
					25	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten
					26	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah
			6	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	27	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah
					28	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
					29	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
			7	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	30	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
			8	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	31	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD
					32	Sistem Informasi Jasa Konstruksi
					33	Analisis Kebijakan Pembangunan
					34	Pelaporan Pembangunan
			9	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	35	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik
					36	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
					37	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik
					38	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
					39	Penyusunan dan Evaluasi Standard

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			10	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	40	Penerimaan Kunjungan Kerja
					41	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan
					42	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten
					43	Pengelolaan Informasi Media Massa
			11	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44	Penyelenggaraan Otonomi Daerah
					45	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah
			12	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	46	Pemberdayaan lembaga desa
					47	Update Data Monografi Desa
					48	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa
					49	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa
					50	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa
					51	Pedampingan Administrasi Desa
					52	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa
					53	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa
					54	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
					55	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa
			13	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	56	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa
					57	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					58	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
			14	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	59	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
					60	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
					61	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						Kemasyarakatan
					62	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
					63	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat
					64	Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin
					65	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan
					66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan
			15	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	67	Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					68	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat
					69	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					70	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat
					71	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat
					72	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat
					73	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah
					74	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah
					75	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah
			16	Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	76	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu
					77	Pendamping halaqoh & berbagai forum keagamaan lainnya
					78	Peningkatan Pemberdayaan kaum rois & penjaga masjid
					79	Kajian Kitab Keislaman

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					81	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
					82	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
			18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					84	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					85	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					86	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			20	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			21	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	89	Pembahasan rancangan peraturan daerah
					90	Rapat-rapat paripurna
					91	Reses
					92	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
					93	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD
					94	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya
					95	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
					96	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
					97	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2	Pengawasan	Inspektorat Daerah	22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					99	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	101	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
			25	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	102	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
					103	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
					104	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus
					105	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul
					106	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					108	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
					110	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					111	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
			28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	112	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			29	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
					114	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			30	Program perencanaan pembangunan daerah	115	Perencanaan penganggaran
					116	Perencanaan pembangunan sektoral
					117	Perencanaan pembangunan kewilayahan
			31	Program perencanaan pembangunan ekonomi	118	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri
					119	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32	Program perencanaan sosial dan budaya	120	Perencanaan pembangunan pemerintahan
					121	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
					122	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
			33	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	123	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
			34	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	124	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
					125	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD
			35	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	126	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
			36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					128	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
					129	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
			37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
					131	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					132	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					133	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			39	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	135	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
		136	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah			
		137	Penyaluran Belanja PPKD			
		138	Pendataan dan Pengelolaan Arsip			
40	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	139	Penyusunan analisa standar belanja			
		140	Penyusunan standar satuan harga			

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					141	Penyusunan KUA PPAS
					142	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
					143	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
					144	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
					145	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
					146	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
					147	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
					148	Peningkatan manajemen investasi daerah
					149	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
					150	Penyusunan anggaran kas
					151	Penerbitan SPD
					152	Penerbitan SP2D
					153	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
					154	Penyusunan neraca dinas / instansi
					155	Penyusunan SPT Tahunan
					156	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
					157	Operasional pajak daerah
					158	Penyusunan laporan semesteran
					159	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
					160	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
					161	Pengendalian PAD
					162	Optimalisasi pendapatan daerah
					163	Pelayanan pajak daerah
					164	Verifikasi Piutang Pajak Daerah
					165	Pendataan dan penetapan wajib pajak

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					166	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
					167	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
					168	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
					169	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
					170	Pemeliharaan Basis Data PBB P2
					171	Pengelolaan Belanja ASN
					172	Rekonsiliasi data laporan
					173	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
					174	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD
			41	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	175	Peningkatan SDM aparatur Pemda
					176	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
					177	Penataan aset
					178	Penghapusan barang daerah
					179	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
					180	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah
					181	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
					182	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	42	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
					184	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					185	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			43	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	186	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					187	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					188	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			44	Program peningkatan pengembangan sistem	189	Penyusunan laporan capaian kinerja,

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				pelaporan capaian kinerja dan keuangan		keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			45	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	190	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah
					191	Uji Kompetensi dan psikologi
					192	Pendidikan dan Pelatihan PNS
					193	Penyelenggaraan Pendidikan PNS
			46	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	194	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN
					195	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai
					196	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
					197	Pelaporan LP2P dan LHKPN
					198	Penilaian PNS
					199	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan
					200	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
			47	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	201	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS
					202	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional
					203	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT
6	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48	Program Kerjasama Pembangunan	204	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah
7	Fungsi Lainnya	Kecamatan Piyungan	49	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	205	Pengembangan sistem inovasi daerah
			50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					207	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			51	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	208	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					209	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					210	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					211	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			52	Program peningkatan pengembangan sistem	212	Penyusunan laporan capaian kinerja,

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				pelaporan capaian kinerja dan keuangan		keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			53	Program peningkatan pelayanan masyarakat	213	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
			54	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	214	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					215	Pengendalian keamanan lingkungan
					216	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					217	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					218	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					219	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					220	Rapat koordinasi unsur Muspika
					221	Pelaksanaan Rakorpem desa
					222	Musrenbang tingkat kecamatan
			55	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	223	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					224	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					225	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					226	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
					227	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
			56	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	228	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					229	Pembinaan Organisasi Perempuan
					230	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
		Kecamatan Dlingo	57	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	231	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
			44	Program peningkatan pengembangan sistem	189	Penyusunan laporan capaian kinerja,

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			58	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233	Konsultasi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
			59	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	234	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
			60	Program peningkatan pelayanan masyarakat	235	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
			61	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	236	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
					237	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
					238	Peningkatan pelayanan masyarakat
					239	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					240	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
					241	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					242	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					243	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					244	Rapat koordinasi unsur Muspika
					245	Musrenbang tingkat kecamatan
			62	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	246	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
					247	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					248	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					249	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					250	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
					251	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					252	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
			63	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat	253	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
			52	Program peningkatan pengembangan sistem	212	Penyusunan laporan capaian kinerja,

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					254	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					255	Pembinaan Organisasi Perempuan
					256	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
					257	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
					258	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecamatan Imogiri	64	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					260	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			65	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					262	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					263	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					264	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			66	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	265	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			67	Program peningkatan pelayanan masyarakat	266	Peningkatan pelayanan masyarakat
			68	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	267	Pengendalian keamanan lingkungan
					268	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					269	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					270	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					271	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					272	Musrenbang tingkat kecamatan
			69	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	273	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					274	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
			44	Program peningkatan pengembangan sistem	189	Penyusunan laporan capaian kinerja,

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					275	Pembinaan organisasi kepemudaan
					276	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
			70	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	277	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					278	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					279	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
					280	Pembinaan Organisasi Perempuan
					281	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
	Kecamatan Pandak		71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					283	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			72	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					285	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					286	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					287	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			73	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	288	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			74	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	289	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			75	Program peningkatan pelayanan masyarakat	290	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					291	Peningkatan pelayanan masyarakat
			76	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	292	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
					293	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					294	Pengendalian keamanan lingkungan
					295	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					296	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					297	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						sumber pendapatan daerah
					298	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					299	Rapat koordinasi unsur Muspika
					300	Pelaksanaan Rakorpem desa
					301	Musrenbang tingkat kecamatan
			77	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	302	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					303	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					304	Pembinaan organisasi kepemudaan
					305	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					306	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
					307	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					308	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
					309	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
			78	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	310	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					311	Pemberdayaan lembaga desa
					312	Pembinaan Organisasi Perempuan
					313	Pemberdayaan Petani
					314	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
					315	Pendampingan kegiatan TMMD
					316	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecamatan Bantul	79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					318	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			80	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	319	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
				Aparatur		
					320	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					321	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					322	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			81	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	323	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			82	Program peningkatan pelayanan masyarakat	324	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					325	Peningkatan pelayanan masyarakat
			83	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	326	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
					327	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					328	Pengendalian keamanan lingkungan
					329	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					330	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					331	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					332	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					333	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					334	Rapat koordinasi unsur Muspika
					335	Pelaksanaan Rakorpem desa
					336	Musrenbang tingkat kecamatan
			84	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	337	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					338	Pembinaan organisasi kepemudaan
					339	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					340	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
					341	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					342	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
					343	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					344	Penyelenggaraan lomba desa

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			85	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	345	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
					346	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					347	Pemberdayaan lembaga desa
					348	Pembinaan Organisasi Perempuan
					349	Pemberdayaan Petani
					350	Pendampingan kegiatan TMMD
	Kecamatan Kretek		86	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	351	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					352	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			87	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	353	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					354	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					355	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					356	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			88	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	357	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
				Program peningkatan pelayanan masyarakat	358	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					359	Peningkatan pelayanan masyarakat
			89	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	360	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					361	Pengendalian keamanan lingkungan
					362	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					363	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
					364	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					365	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					366	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					367	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						sumber pendapatan daerah
					368	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					369	Rapat koordinasi unsur Muspika
					370	Pelaksanaan Rakorpem desa
					371	Musrenbang tingkat kecamatan
			90	Program pembinaan sosial kemasayarakatan kecamatan	372	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					373	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
					374	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					375	Pembinaan organisasi kepemudaan
					376	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					377	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
					378	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					379	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
					380	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					381	Penyelenggaraan lomba desa
					382	Bantul Ekspo dan karnaval
					383	Pemberdayaan lembaga desa
			91	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	384	Pembinaan Organisasi Perempuan
					385	Pemberdayaan Petani
					386	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
		Kecamatan Bambanglipuro	92	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					388	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			93	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	389	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kepemudaan

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					390	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					391	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					392	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			94	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	393	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			95	Program peningkatan pelayanan masyarakat	394	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					395	Peningkatan pelayanan masyarakat
			96	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	396	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
					397	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					398	Pengendalian keamanan lingkungan
					399	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					400	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
					401	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					402	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					403	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					404	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					405	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					406	Rapat koordinasi unsur Muspika
					407	Pelaksanaan Rakorpem desa
					408	Musrenbang tingkat kecamatan
			97	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	409	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					410	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
					411	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan

Aparatur

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					412	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
					413	Pembinaan organisasi kepemudaan
					414	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					415	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					416	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
					417	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
					418	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					419	Penyelenggaraan lomba desa
					420	Bantul Ekspo dan karnaval
					421	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
			98	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	422	Pemberdayaan lembaga desa
					423	Pembinaan Organisasi Perempuan
					424	Pemberdayaan Petani
					425	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
					426	Pendampingan kegiatan TMMD
					427	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecamatan Jetis	99	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	428	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					429	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					431	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					432	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
			101	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	433	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			102	Program peningkatan pelayanan masyarakat	434	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
			107	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	435	Peningkatan pelayanan dan penyediaan

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					437	Pengendalian keamanan lingkungan
					438	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					439	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					440	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					441	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					442	Rapat koordinasi unsur Muspika
					443	Musrenbang tingkat kecamatan
			104	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	444	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					445	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					446	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
					447	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					448	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
					449	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					450	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
			105	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	451	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					452	Pemberdayaan lembaga desa
					453	Pembinaan Organisasi Perempuan
					454	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecamatan Kasihan	106	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	455	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					456	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			103	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	436	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					458	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					459	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					460	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			108	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	461	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			109	Program peningkatan pelayanan masyarakat	462	Peningkatan pelayanan masyarakat
			110	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	463	Pengendalian keamanan lingkungan
					464	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					465	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					466	Musrenbang tingkat kecamatan
					467	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah
			111	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	468	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					469	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					470	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
					471	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					472	Penyelenggaraan lomba desa
					473	Bantul Ekspo dan karnaval
					474	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
					475	Pembinaan Organisasi Perempuan
			112	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
		Kecamatan Pleret	113	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					477	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			114	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	478	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					503	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					480	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					481	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			115	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	482	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			116	Program peningkatan pelayanan masyarakat	483	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
			117	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	484	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					485	Pengendalian keamanan lingkungan
					486	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					487	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					488	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					489	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					490	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					491	Rapat koordinasi unsur Muspika
					492	Pelaksanaan Rakorpem desa
					493	Musrenbang tingkat kecamatan
			118	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	494	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
					495	Pembinaan organisasi kepemudaan
					496	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					497	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					498	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
			119	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	499	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
					500	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					501	Pembinaan Organisasi Perempuan
					502	Pemberdayaan Petani
					479	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					504	Pendampingan kegiatan TMMD
					505	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
		Kecamatan Pajangan	120	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					507	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			121	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	508	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					509	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					510	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					511	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			122	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	512	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			123	Program peningkatan pelayanan masyarakat	513	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					514	Peningkatan pelayanan masyarakat
			124	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	515	Pengendalian keamanan lingkungan
					516	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					517	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					518	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					519	Rapat koordinasi unsur Muspika
					520	Pelaksanaan Rakorpem desa
					521	Musrenbang tingkat kecamatan
			125	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	522	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
			126	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	523	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
					524	Pembinaan Organisasi Perempuan
					525	Pemberdayaan Petani
					526	Pendampingan kegiatan TMMD lainnya

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
						Penanggulangan Kemiskinan
					528	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecamatan Sanden	127	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	529	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					530	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
					531	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
			128	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	532	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					533	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					534	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					535	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			129	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	536	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			130	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	537	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			131	Program peningkatan pelayanan masyarakat	538	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
			132	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	539	Pengendalian keamanan lingkungan
					540	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					541	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					542	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					543	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					544	Rapat koordinasi unsur Muspika
					545	Musrenbang tingkat kecamatan
			133	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	546	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
					527	Pemberdayaan Tim Koordinasi

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
					547	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
					548	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					549	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
					550	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					551	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
			134	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	552	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
					553	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
					554	Pemberdayaan lembaga desa
					555	Pembinaan Organisasi Perempuan
		Kecamatan Sedayu	135	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	556	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					557	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			136	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	558	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					559	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					560	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
			137	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	561	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			138	Program peningkatan pelayanan masyarakat	562	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					563	Peningkatan pelayanan masyarakat
			139	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	564	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					565	Pengendalian keamanan lingkungan
					566	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					567	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					568	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					591	Rapat koordinasi unsur Muspika

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			140	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	570	Musrenbang tingkat kecamatan
					571	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					572	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					573	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					574	Penyelenggaraan lomba desa
					575	Bantul Ekspo dan karnaval
					576	Pemberdayaan lembaga desa
			141	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
	Kecamatan Sewon		142	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	577	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					578	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			143	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	579	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					580	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					581	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					582	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			144	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	583	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			145	Program peningkatan pelayanan masyarakat	584	Peningkatan pelayanan masyarakat
			146	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	585	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					586	Pengendalian keamanan lingkungan
					587	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					588	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					589	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					590	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					569	Rapat koordinasi unsur Muspika

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			147	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	592	Pelaksanaan Rakorpem desa
					593	Musrenbang tingkat kecamatan
					594	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					595	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
					596	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
					597	Pembinaan organisasi kepemudaan
					598	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					599	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					600	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					601	Penyelenggaraan lomba desa
					602	Bantul Ekspo dan karnaval
					603	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
					604	Pembinaan Organisasi Perempuan
			148	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	605	Pemberdayaan Petani
					606	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
					607	Pendampingan kegiatan TMMD
					608	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecamatan Srandakan	149	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	609	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					610	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			150	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	611	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					612	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					613	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					614	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			151	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	615	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			152	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	616	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			153	Program peningkatan pelayanan masyarakat	617	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
			154	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	618	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
					619	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					620	Pengendalian keamanan lingkungan
					621	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					622	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
					623	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					624	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					625	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					626	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					627	Rapat koordinasi unsur Muspika
					628	Pelaksanaan Rakorpem desa
					629	Musrenbang tingkat kecamatan
			155	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	630	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					631	Pembinaan organisasi kepemudaan
					632	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
					633	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					634	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
					635	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
					636	Penyelenggaraan lomba desa

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			156	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	637	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
					638	Pembinaan Organisasi Perempuan
					639	Pemberdayaan Petani
					640	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
		Kecamatan Banguntapan	157	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					642	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			158	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	643	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					644	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					645	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					646	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			159	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	647	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			160	Program peningkatan pelayanan masyarakat	648	Peningkatan pelayanan masyarakat
			161	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	649	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					650	Pengendalian keamanan lingkungan
					651	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					652	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					653	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					654	Musrenbang tingkat kecamatan
			162	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	655	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					656	Pembinaan organisasi kepemudaan
					657	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					658	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
			163	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
		Kecamatan Pundong	164	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
					660	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
					661	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			165	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	662	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
					663	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
					664	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
					665	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
			166	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	666	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
			167	Program peningkatan pelayanan masyarakat	667	Peningkatan pelayanan masyarakat
			168	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	668	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
					669	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					670	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
					671	Peningkatan pemberdayaan keagamaan
					672	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
					673	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
					674	Rapat koordinasi unsur Muspika
					675	Pelaksanaan Rakorpem desa
					676	Musrenbang tingkat kecamatan
			169	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	677	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
					678	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
					679	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			170	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	680	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
					681	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
					682	Bantul Ekspo dan karnaval
					683	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
					684	Pemberdayaan lembaga desa
					685	Pembinaan Organisasi Perempuan
					686	Pemberdayaan Petani
					687	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

Sumber : BKAD 2019, diolah

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO
----	------------------------	-----	----	--------------	----

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebanyak 810 pegawai. Kualifikasi pendidikan pegawai pada urusan pilihan relatif cukup baik dimana lebih dari setengahnya atau 60% memiliki jenjang pendidikan tinggi atau diatas SMA, sisanya sekitar 40% memiliki jenjang pendidikan rendah atau SMA kebawah. Jumlah pegawai pada kategori pendidikan tinggi didominasi oleh pegawai lulusan S1 sebanyak 307 pegawai, diikuti S2 sebanyak 114. Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan rendah sebagian besar merupakan lulusan SMA yakni sebanyak 290 dari total 324 pegawai.

Pada kelompok golongan, persentase terbanyak merupakan pegawai golongan III sebesar 62,35% diikuti golongan II sebesar 21,6% kemudian berturut turut golongan IV (13,46%) dan golongan I (2,59%). Pada kelompok pejabat struktural dan fungsional, staf merupakan jumlah yang terbanyak sebesar 295 pegawai atau 52,25%. Jumlah terbanyak berikutnya adalah pegawai eselon IVA sebesar 165 pegawai atau 21,83%. Sedangkan pejabat fungsional yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah hanya sebanyak 52 pegawai atau 6,88%. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional tersaji pada **Tabel 3.35**.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

Tabel 3.35. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada urusan penunjang pemerintahan daerah

OPD	Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan								Golongan				Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional										
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan					
															II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
Sekretariat Daerah	176	5	9	70	1	1	13	58	19	0	9	54	98	15	1	3	9	0	30	0	82	3	0	2
Sekretaris Daerah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten Pemerintahan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	11	0	0	4	0	0	2	3	2	0	0	2	6	3	0	0	1	0	3	0	7	0	0	0
Bagian Organisasi	12	0	0	5	0	0	0	5	2	0	0	3	8	1	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	15	0	0	2	0	0	2	9	2	0	0	1	13	1	0	0	1	0	3	0	10	0	0	1
Bagian Hukum	14	0	0	4	0	1	1	7	1	0	0	4	9	1	0	0	1	0	3	0	9	0	0	1
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	22	0	0	9	1	0	2	8	2	0	0	10	11	1	0	0	1	0	3	0	17	1	0	0
Bagian Administrasi Perekonomian	14	1	0	4	0	0	2	5	2	0	1	2	10	1	0	0	1	0	3	0	10	0	0	0
Bagian Administrasi Pemerintahan	12	0	1	4	0	0	1	3	3	0	1	4	5	2	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	12	0	0	3	0	0	1	7	1	0	0	1	10	1	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0
Bagian Administrasi Pembangunan	10	0	0	5	0	0	1	4	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0	0

Bagian	NO	JENIS URUSAN				OPD	NO	NAMA PROGRAM				NO	NAMA KEGIATAN			
Umum	50	4	8	30	1	6	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0
Staf Ahli	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0

OPD	Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan								Golongan				Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional										
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan					
															II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
Ba lan	198	1	6	56	1	0	27	71	36	0	5	38	130	25	0	3	3	10	39	0	113	20	0	10
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	54	1	2	18	0	0	7	17	9	0	3	9	36	6	0	1	1	4	9	0	28	10	0	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	109	0	3	32	0	0	16	45	13	0	2	25	75	7	0	1	1	4	18	0	72	8	0	5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35	0	1	6	1	0	4	9	14	0	0	4	19	12	0	1	1	2	12	0	13	2	0	4
Ke amatan	328	0	9	136	0	1	13	133	36	0	4	67	213	44	0	0	16	17	84	33	151	1	18	0
Kecamatan Bambanglipuro	18	0	0	11	0	0	0	5	2	0	0	2	14	2	0	0	1	1	4	2	10	0	0	0
Kecamatan Sewon	23	0	1	9	0	0	1	10	2	0	1	3	15	4	0	0	1	1	5	2	13	0	1	0
Kecamatan Sedayu	24	0	0	13	0	0	2	7	2	0	0	7	15	2	0	0	1	1	5	2	13	0	2	0
Kecamatan Sanden	18	0	0	7	0	0	2	8	1	0	0	2	14	2	0	0	1	1	5	1	9	0	1	0
Kecamatan Pundong	19	0	1	9	0	0	0	7	2	0	0	4	13	2	0	0	1	1	5	2	9	0	1	0
Kecamatan Pleret	20	0	0	9	0	0	0	9	2	0	0	4	13	3	0	0	1	1	5	2	10	0	1	0
Kecamatan Piyungan	18	0	1	6	0	0	0	9	2	0	0	5	9	4	0	0	1	1	5	2	9	0	0	0
Kecamatan Pandak	21	0	2	8	0	0	2	7	2	0	1	6	12	2	0	0	1	1	5	2	11	0	1	0
Kecamatan Pajangan	18	0	0	8	0	0	0	9	1	0	1	2	13	2	0	0	1	1	5	2	9	0	0	0
Kecamatan Kretek	18	0	0	9	0	0	0	6	3	0	0	2	14	2	0	0	1	1	5	2	8	0	1	0
Kecamatan Kasihan	22	0	1	9	0	0	1	6	5	0	1	5	12	4	0	0	0	1	5	2	13	0	1	0
Kecamatan Jetis	17	0	1	6	0	0	1	5	4	0	0	5	7	5	0	0	1	1	5	2	8	0	0	0
Kecamatan Imogiri	17	0	0	7	0	0	2	7	1	0	0	4	11	2	0	0	1	1	5	2	5	0	3	0
Kecamatan Dlingo	17	0	1	7	0	0	0	7	2	0	0	8	7	2	0	0	1	1	5	2	7	0	1	0
Kecamatan Bantul	19	0	0	7	0	1	1	8	2	0	0	3	14	2	0	0	1	1	5	2	8	1	1	0
Kecamatan Banguntapan	22	0	0	6	0	0	1	14	1	0	0	3	17	2	0	0	1	1	5	2	9	0	4	0
Kecamatan Srandakan	17	0	1	5	0	0	0	9	2	0	0	2	13	2	0	0	1	1	5	2	7	0	1	0

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
-----------	-----------------------------------	------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------

Kabupaten Bantul Tahun 2019

daerah

OPD	Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan								Golongan				Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional										
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan					
															II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
Sekretariat	55	0	3	21	0	0	4	19	8	0	3	8	36	8	0	1	4	0	9	0	40	0	0	1
Sekretariat DPRD	44	0	3	18	0	0	2	16	5	0	3	8	27	6	0	1	4	0	9	0	29	0	0	1
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sekretariat Badan Narkotika Nasional	10	0	0	3	0	0	2	3	2	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Inspektorat	50	0	1	7	0	0	4	26	12	0	0	8	28	14	0	1	5	0	3	0	9	28	0	4
Total	810	6	28	290	2	2	61	307	114	0	21	175	505	109	1	11	37	27	165	33	395	52	18	17
Persentase (%)			40				60				2,59	21,6	62,35	13,46	0,13	1,46	4,89	3,57	21,83	4,37	52,25	6,88	2,38	2,25

Sumber: BKPP, 2019

NO	JENIS URUSAN PENUNJANG	OPD	NO	NAMA PROGRAM	NO
----	------------------------	-----	----	--------------	----

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 *unaudited*, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebesar Rp144.590.013.172,00. Sepanjang tahun 2019, alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp129.906.124.936,37 atau sebesar 89,84%. Alokasi dan realisasi anggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2019 tersaji pada **Tabel 3.36**Tabel 3.28.

Alokasi anggaran terbesar penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah ada pada penyelenggaraan keuangan yakni sebesar Rp53.973.347.014,00 atau 33,73%. Alokasi anggaran terkecil ada pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebesar Rp494.995.000,00 atau 0,34%.

Realisasi belanja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah terbesar ada pada penyelenggaraan keuangan dengan nilai realisasi sebesar Rp49.033.329.323,09 atau 90,85% dari total anggaran belanja pada penyelenggaraan urusan keuangan atau menyumbang 37,75% dari total keseluruhan realisasi belanja pada fungsi penunjang. Penyumbang realisasi belanja terkecil ada di penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, yakni sebesar Rp484.422.500,00 atau 0,37% dari total keseluruhan realisasi belanja pada fungsi penunjang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.36. Alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan

JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
Penunjang	144.590.013.172,00	129.906.124.936,37	89,84
Administrasi Pemerintahan	50.920.700.678,00	43.284.649.476,28	85,00
Pengawasan	2.755.256.076,00	2.717.851.748,00	98,64
Perencanaan	8.869.517.000,00	8.094.563.982,00	91,26
Keuangan	53.973.347.014,00	49.033.329.323,09	90,85
Kepegawaian	12.232.753.771,00	11.114.254.137,00	90,86
Penelitian dan Pengembangan	494.995.000,00	484.422.500,00	97,86
Fungsi Lainnya	15.343.443.633,00	15.177.053.770,00	98,92
Jumlah	144.590.013.172,00	129.906.124.936,37	89,84

Sumber : BKAD, 2019

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun yang disusun berdasarkan atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan perencanaan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD dan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Bantul tiap tahun menyusun RKPD sebagai salah satu dokumen rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. RKPD juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD)

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan pada urusan penunjang pemerintahan daerah kondisinya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan tersaji pada **Tabel 3.37**.

Tabel 3.37. Permasalahan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
Administrasi Pemerintahan	Cakupan wilayah yang telah terdata dan terbakukan nama unsur rupabumi masih sedikit dikarenakan keterbatasan jumlah personil dan anggaran	Dilaksanakan bimtek dengan menyasar desa dan kecamatan agar kedepan kegiatan pendataan dan pembakuan rupabumi dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif desa maupun kecamatan dalam hal penganggaran kegiatan dan pelaksanaan teknis.
	Masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi terkait dengan aplikasi SAKTI	Koordinasi dengan admin aplikasi SAKTI BIG
	Sulitnya menyamakan jadwal kegiatan pimpinan daerah sehingga terkadang ada tidak dapat menghadiri koordinasi pimpinan secara langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuk tim sekretariat yang akan mempersiapkan rencana materi kegiatan dan penyusunan jadwal. 2. Dibuat SOP pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan daerah
	Belum semua pilar perapatan batas yang telah terpasang sudah diukur secara geodetik dikarenakan keterbatasan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi atau kerjasama dengan OPD terkait seperti Dispertaru yang juga membutuhkan adanya batas administratif Kabupaten Bantul. 2. Mengakses sumber anggaran lainnya yang memungkinkan seperti Dana Keistimewaan
	Belum adanya inovasi dalam rangka percepatan penyaluran KUR khususnya bidang pertanian	Semua perbankan diharapkan memberi fasilitas pembayaran pasca panen
	Masih lambatnya proses pengendalian kredit pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Diharapkan semua bank memberikan kemudahan penerbitan surat keterangan lunas kredit
	Penyusunan Laporan Berkala kondisi Ketahanan Pangan	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	<p>Daerah masih sulit untuk menentukan format baku yang dapat mengakomodir data OPD terkait.</p>	
	<p>Laporan Triwulan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) belum bisa disampaikan ke OJK</p>	<p>Proses pembuatan sistem laporan TPAKD secara online oleh pemerintah pusat</p>
	<p>Turunya Regulasi tentang tatacara izin pemberian TPP bagi Pemda pada bulan Oktober sehingga rencana Penyusunan Regulasi Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah (TPP) menjadi terlambat karena drat regulasi dengan sistem yang lama telah tersusun sejak September.</p>	<p>Menyusun regulasi dan sistem pemberian TPP sesuai dengan Kepmendagri yang keluar dan tetap menyusun regulasi dengan sistem pemberian yang sudah berjalan sembari menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p>
	<p>Regulasi tentang penyusunan Proses Bisnis kurang mendetail dan belum ada daerah yang menjadi pilot project / atau contoh Proses Bisnis Daerah sehingga di tahun 2019 dalam penyusunannya kurang maksimal.</p>	<p>Melakukan konsultasi atau mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB atau Kemendagri dan menyusun peta proses bisnis seperti yang dicontohkan oleh Kemenpan RB.</p>
	<p>Pada Tahun 2019 Pemerintah Pusat Mengeluarkan regulasi yang Harus Segera ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah Seperti PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Nomor Tahun 2016 dan Permendagri Nonor 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Sekretariat Daerah. Disisi lain Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan Penyederhaan Birokrasi, kebijakan tersebut kontra indikatif yang menjadikan kebingungan untuk mengambil keputusan tentang regulasi kelembagaan.</p>	<p>Tetap menyusun regulasi tentang kelembagaan sesuai dengan aturan terbaru serta melakukan pemetaan jabatan sesuai Surat Edaran tentang Penyederhanaan Birokrasi.</p>
	<p>Regulasi dari pusat belum ditindak lanjuti dengan turunan regulasi daerah (pergub), sehingga analisa kebijakan terkendala dalam pelaksanaannya terutama untuk</p>	<p>Menggunakan regulasi yang ada dengan tetap berkomunikasi dengan provinsi. Tetapi terlebih dahulu dilakukan FGD untuk menjaring materi dan pertimbangan lainnya dari</p>

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Perencanaan	Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Bantul.
	Kemampuan dan pengetahuan keprotokolan belum sepenuhnya dikuasai personil.	Peningkatan kemampuan keprotokolan
	Publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum terlaksana dengan optimal.	Perlunya koordinasi dan komunikasi dengan dinas kominfo untuk publikasi yang komprehensif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang capaian pembangunan di Kabupaten Bantul melalui media – media yang sudah ada melalui kegiatan pengelolaan informasi media masa
	Rasio jumlah paket pekerjaan dengan personel pokja pengadaan	Pembuatan jadwal perodesasi bulanan pengadaan B/J
	Proses pengadaan langsung belum menggunakan aplikasi e-pengadaan langsung	Asistensi dan bimteks e-pengadaan langsung ke OPD
	Aplikasi SPSE sering mengalami gangguan	Konsultasi dengan LKPP Jakarta
	Kompleksitas regulasi pengadaan B/J belum sepenuhnya dipahami	Bimtek, FGD, Forkom pengadaan barang dan jasa dan konsultasi, kajian bersama dan
	Masih adanya MoU yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara aktif berkoordinasi dengan OPD dan pihak terkait untuk menyusun perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut MoU yang telah disepakati bersama. 2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca tersepakatinya perikatan kerjasama
Pengawasan	Belum optimalnya implementasi tentang SPIP	Peningkatan implementasi SPIP melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penilaian risiko dan praktik dokumentasi SPIP pada OPD
	Tindak lanjut temuan belum optimal	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan aparaturnya terbatas	Pemberdayaan Aparatur dan tenaga pemeriksa
	Cakupan wilayah yang telah terdata dan terbakukan nama unsur rupabumi masih sedikit dikarenakan keterbatasan jumlah personil dan anggaran	Dilaksanakan bimtek dengan menasar desa dan kecamatan agar kedepan kegiatan pendataan dan pembakuan rupabumi dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif desa maupun kecamatan dalam hal penganggaran kegiatan dan pelaksanaan teknis.
	Sulitnya menyamakan jadwal kegiatan pimpinan daerah sehingga terkadang tidak dapat menghadiri koordinasi pimpinan secara langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuk tim sekretariat yang akan mempersiapkan rencana materi kegiatan dan penyusunan jadwal 2. Dibuap SOP pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan daerah
	Terdapat target Perda yang tidak tercapai sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah, dikarenakan mekanisme penetapan yang harus melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintahan pusat	Pembahasan dilanjutkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berikutnya
	Pencapaian target kegiatan Bantuan Hukum sangat dipengaruhi oleh banyaknya permasalahan yang diajukan/dikonsultasikan/dimint akan pendampingan hukum serta tingkat kerumitan permasalahan yang mengharuskan keterlibatan banyak pihak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan program-program kegiatan Bantuan Hukum kepada OPD, pemerintah desa dan masyarakat 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
	Dalam kegiatan lobby showroom belum dapat berjalan optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki sarana lobby yang rusak 2. Melakukan jemput bola bagi perajin yang akan mengisi produk
	Entry Upload SIKP untuk data calon debitur program KUR sangat rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Entry SIKP bagi Pendamping SIKP 2. Koordinasi dengan Kantor Perben Wilayah DIY
	Keberadaan LKM yang telah dibina oleh masing-masing OPD yang membidangi	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	Tindak lanjut dari Monev dikawasan Mangrove Baros belum optimal karena kurang ada respon dan dukungan dari Pemerintah Desa Tirtohargo	1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa
	Adanya penggantian system yang mendukung kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, dimana system yang baru belum memasukkan menu laporan pengadaan barang / jasa	Penyempurnaan system dengan memasukkan menu pengadaan barang / jasa
	Adanya penataan OPD baru maka beberapa personil mengalami mutasi maupun promosi sehingga masih perlu adanya pendampingan dan refreshing pengetahuan terkait dengan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas SDM dengan melaksanakan pendampingan dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak lain Yang Berkompeten
	Kekurangan personil pengelola pengadaan barang dan jasa	Mengangkat tenaga Non ASN
	Waktu Pengajuan proses pengadaan lelang terlambat (Triwulan III-IV)	Pembuatan jadwal perodesasi pengajuan berkas permohonan lelang
	Pejabat Pengadaan belum seluruhnya menyampaikan laporan pengadaan.	Membuat surat edaran Sekretris Daerah kepada OPD
	Aplikasi SPSE sering mengalami gangguan	Konsultasi dengan LKPP Jakarta
	Belum dipahaminya peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	Bimtek, FGD, Forkom pengadaan barang dan jasa
	Dengan adanya bagian baru yaitu Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang secara aktif melaksanakan tugas sejak 2 Januari 2017 akan tetapi belum disertai kelengkapan sarana dan prasarana kerja, serta jumlah tenaga/SDM yang belum tercukupi sebagaimana mestinya. Akibatnya pelaksanaan kegiatan kurang berjalan maksimal.	Mengupayakan tambahan tenaga baik ASN maupun non ASN.
	Juknis yang dipakai dalam	Dalam pengukuran SPM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	<p>pengukuran pencapaian SPM masih PP 65 tahun 2005, sementara dari kementerian teknis untuk beberapa bidang SPM sudah ditiadakan sehingga kesulitan untuk mengukur capaian SPM-nya.</p>	<p>sementara masih tetap menggunakan kebijakan yang lama.</p>
	<p>Kurangnya personil terutama di Subag Humas dan Tata Laksana Acara</p>	<p>Mengajukan Permohonan Tenaga Non PNS kepada Bupati.</p>
	<p>Belum memiliki ruang kerja yang memenuhi syarat yang mengakibatkan kurang nyaman dalam bekerja</p>	<p>Mengajukan rehabilitasi ruang kerja</p>
	<p>Belum maksimalnya pengelolaan surat-surat fax dan peralatannya akibat perubahan SOTK dan pengurangan personil</p>	<p>Mendayagunakan personil yang ada dalam pengoperasian mesin fax dan pengelolaan surat-surat fax sesuai kemampuan SDM</p>
	<p>Koordinasi pimpinan yang belum maksimal sehingga petugas teknis (staf) sering menunggu perintah sehingga penyelesaian suatu pekerjaan menjadi kurang maksimal</p>	<p>Perlu penguatan komunikasi dan koordinasi di internal unit kerja.</p>
Perencanaan	<p>Sistem aplikasi terintegrasi belum bisa mengendalikan kegiatan hanya masih untuk bekerja sebagai alat untuk membantu kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan aplikasi dengan berkoordinasi dan konsultasi Kemen.PAN dan BPPT sebagai pemilik aplikasi (MoU dengan Kemen PANRB, PKS dgn BPPT). 2. Bimtek dan pendampingan kepada Desa, dan PD.
	<p>Sistem aplikasi terintegrasi belum bisa mengendalikan kegiatan hanya masih untuk bekerja sebagai alat untuk membantu kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan aplikasi dengan berkoordinasi dan konsultasi Kemen.PAN dan BPPT sebagai pemilik aplikasi (MoU dengan Kemen PANRB, PKS dgn BPPT). 2. Bimtek dan pendampingan kepada Desa, dan PD.
Keuangan	<p>Permasalahan Pembayaran PBB P2 terkait dengan terbatasnya tempat pembayaran PBB P2 dan jam pembayaran yang tersedia pada jam kerja;</p>	<p>Mulai tanggal 7 Februari 2018 BKAD Bantul BKAD Bantul melakukan inovasi berupa penyediaan layanan jemput bola pembayaran PBB melalui layanan Mobil Keliling Pajak</p>

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	<p>Keterbatasan Akses Informasi Pajak Daerah</p> <p>Terbatasnya akses terhadap informasi tagihan, status pembayaran PBB dan informasi proses BPHTB yang masih terpusat di kantor layanan BKAD;</p>	<p>Bantul dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB dengan peningkatan kualitas layanan PBB yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah</p> <p>Sejak 27 Agustus 2018 BKAD Kabupaten Bantul meluncurkan LAPak Bantul (Layanan Aplikasi Pajak Bantul) yang merupakan Layanan berbasis android. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh informasi tagihan PBB P2, status pembayaran sampai dengan 5 tahun dan juga proses BPHTB melalui smartphone berbasis android;</p>
	<p>Belum terwujudnya disiplin anggaran kas dalam penyerapan belanja daerah;</p>	<p>Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan dan capaian realisasi keuangan dipergunakan dalam penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja perangkat daerah tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diterima oleh perangkat daerah.</p>
	<p>Terdapat perubahan aplikasi penatausahaan keuangan daerah dari Aplikasi Simda ke Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (Sepak@t). Menu dan proses pengaplikasian penatausahaan keuangan daerah pada Sepak@t sangat berbeda dengan menu dan pengaplikasian penatausahaan keuangan daerah di Simda Keuangan System cloud Sepak@t masih berada di BPPT Tangerang Selatan sehingga apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sangat tergantung dengan tim dari BPPT Tangerang Selatan;</p>	<p>Pendampingan dan konsultasi dengan Tim BPPT; Konsultasi melalui media social dengan Tim BPPT pada saat terjadi permasalahan penatausahaan keuangan daerah terutama system dalam aplikasi Sepak@t; Pendampingan penatausahaan keuangan daerah melalui aplikasi Sepak@t dengan pengelola keuangan di perangkat daerah;</p>

Fungsi Penunjang	Permasalahan	Solusi
	Kepatuhan wajib pajak rendah;	Menggunakan Sistem Teknologi Informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban pajak daerah dan Menegakkan law enforcement (memberikan sanksi),
	Beberapa Perangkat Daerah belum tepat dalam penempatan kode rekening, anggaran kas, dan penulisan nomenklatur kegiatan serta dalam pelaksanaannya yang tidak konsisten dengan aturan SHBJ;	Mengirimkan surat edaran kepada semua OPD untuk memperhatikan penempatan kode rekening, anggaran kas, dan penulisan nomenklatur. Melakukan Desk ke setiap Perangkat Daerah. Pengajuan revisi dan melebihi standar harga digunakan sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Kepegawaian	Kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indisipliner dalam rangka pembinaan pegawai masih rendah	Sosialisasi dan monitoring sampai ke UPT, Kecamatan dan Puskesmas
	Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kompetensi, penerbitan ijin belajar serta penataan kembali PNS yang sudah ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pilihan di tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui OPD dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RKPD. Keseluruhan program

yang dilaksanakan pada urusan pemerintahan umum adalah sebanyak 7. Program tersebut dilaksanakan dalam 15 kegiatan. Penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2017 tersaji pada **Tabel 3.38**.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.38. OPD pelaksana, serta program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019

Fungsi Penunjang		Permasalahan	Solusi
OPD	NO	PROGRAM	NO KEGIATAN
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
			2 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
			3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
			5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	7 Pendidikan Wawasan Kebangsaan
	5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	8 Pemantauan orang asing
			9 Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis
	6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	10 Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
			11 Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan
	7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	12 Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin
	8	Program pendidikan politik masyarakat	13 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
			14 Forkom Ormas, Orsos, dan LSM
			15 Pendidikan politik di masyarakat

Sumber : BKAD 2019, diolah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 15 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat SMA sebanyak 8 orang (46,67%) dan S1 sebanyak 8 orang (53,33%). Pangkat dan golongan bervariasi dari golongan II hingga golongan IV, lihat **Tabel 3.39**. Jumlah pejabat struktural dan fungsional juga bervariasi, lihat **Tabel 3.40**.

Tabel 3.39. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan								Golongan				
	SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV /S1	S2	S3	I	II	III	IV
15	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	3	11	1
15	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	3	11	1
		46,67					53,33			0	20	73,33	6,67

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2019, diolah

Tabel 3.40. Jumlah pejabat struktural dan fungsional di Kantor Kesatuan bangsa dan Politik

Σ Peg	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional									
	Eselon						Jabatan			
	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
15	0	0	1	0	3	0	11	0	0	0
15	0	0	1	0	3	0	11	0	0	0
	0	0	6,67	0	20	0	73,33	0	0	0

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2019, diolah

Fungsi Penunjang	4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Permasalahan	Solusi
------------------	---	--------

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 unaudited, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah sebesar Rp1.791.974.756,00. Sepanjang tahun 2019, alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp1.701.631.102,00 atau sebesar 94,96%.

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun yang disusun berdasarkan atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan perencanaan pada urusan penunjang pemerintahan daerah pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD dan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Bantul tiap tahun menyusun RKPD sebagai salah satu dokumen rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. RKPD juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKA-PD).

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan pada urusan penunjang pemerintahan umum kondisinya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersaji pada **Tabel 3.41**.

Tabel 3.41. Permasalahan dan solusi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Permasalahan	Solusi
Kegiatan Dialog Politik setelah Pemilu tidak berjalan sesuai Jadwal, karena tertunda dengan masa peralihan anggota DPRD dan alat kelengkapan dewan baru terbentuk di bulan Oktober 2019.	Kegiatan Dialog politik dapat diselesaikan pada TW IV (Oktober Nopember dan Desember 2019)
Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik baru dapat dipenuhi sebesar Rp 1.927,- per satu suara sah per tahun bagi partai politik yang mempunyai wakil di kursi DPRD, karena terjadi penambahan suara sah pada PEMILU 2019 (577.151) dibanding Pemilu 2014 (548.056)	Kekurangan akan diusulkan lewat anggaran biaya tambahan (ABT) TA 2020.

Sumber : Bappeda, 2019

D. Indikator kinerja kunci

Indikator kinerja kunci (IKK) dituangkan tersendiri didalam lampiran IKK.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
TAHUN 2019



BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi permasalahan, tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*). Program Prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program atau atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan OPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, sasaran pembangunan di pemerintah Kabupaten Bantul mengacu pada sasaran yang tertuang didalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, pendekatan prioritas Nawacita dan pendekatan prioritas daerah. Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Secara umum penetapan sasaran dan target kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Bantul sudah sesuai dan mendukung sasaran Nasional. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dari aspek sudut pandang, istilah dan cara pengukuran, namun tujuan dan semangat pembangunan yang diharapkan adalah sama. Pengelompokan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul yang mendukung agenda prioritas DIY dan prioritas nasional dapat dilihat pada **Tabel 4.42**.

Tabel 4.42. Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Prioritas Pembangunan DIY dan Nasional

NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	SASARAN DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL 2019	SASARAN DAERAH
Melakukan revolusi karakter bangsa	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya derajat kualitas SDM	Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	Mengatasi Ketimpangan Wilayah Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah, melalui pengembangan pariwisata dan industri kreatif	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul Terciptanya industri kreatif yang berkualitas
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air		Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pemantapan Ketahanan Pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	SASARAN DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL 2019	SASARAN DAERAH
<p>bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya</p> <p>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <p>Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara</p> <p>Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas</p>	<p>Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman</p> <p>Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu</p>	<p>Mengatasi Ketimpangan Wilayah Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta</p>	<p>Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan</p>	<p>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis</p> <p>Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</p> <p>Penanggulangan Bencana</p> <p>Pemantapan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</p> <p>Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat</p> <p>Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana</p> <p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas</p>

NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	SASARAN DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL 2019	SASARAN DAERAH
<p>korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p> <p>Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</p> <p>Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p>			<p>Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan</p> <p>Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa</p> <p>Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</p> <p>Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat</p>	<p>Pengembangan Budaya Daerah</p>	<p>Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah</p>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019 diolah



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan (*medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 menerima 3 (tiga) alokasi dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian serta Kementerian Dalam Negeri.

3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang meliputi tiga program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Hortikultura; Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; serta Program Program Bina Pembangunan Daerah.

Tugas pembantuan yang diterima diwujudkan dalam beberapa kegiatan, lihat **Tabel 4.43**. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dilaksanakan dalam wujud Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan meliputi tiga kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. Anggaran Tugas pembantuan pada kedua program tersebut berasal dari Kementerian Pertanian pada Ditjen Hortikultura dan Ditjen Tanaman Pangan. Sedangkan Program Bina Pembangunan Daerah, alokasi anggaran bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan diwujudkan dalam kegiatan Layanan Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah (*Base Line*).

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan tersaji pada Tabel

Tabel 4.43. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tugas Pembantuan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

No	Satker	Kementerian / Lembaga Pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)
1	Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta	Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Bawang Merah 2. Kawasan Aneka Cabai 3. Fasilitasi alsintan dan sarana prasarana pascapanen cabai dan bawang merah
2	Dinas Pertanian Provinsi DI.	Kementerian Pertanian Ditjen	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan	Program Peningkatan Produksi,	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka	1. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai

No	Satker	Kementerian / Lembaga Pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)
	Yogyakarta	Tanaman Pangan	Perikanan Kabupaten Bantul	Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kacang dan Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia [Base Line] 2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 3. Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat [Base Line]
					Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Jagung Hibrida 2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Jagung hibrida 3. Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat
3	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Program Bina Pembangunan Daerah	Layanan Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah (<i>Base Line</i>)	1. Implementasi Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Sumber anggaran dari tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berasal dari satuan kerja SP DIPA Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian dan SP DIPA Ditjen Tanaman Pangan. Anggaran Kementerian Pertanian serta SP DIPA Kementerian Dalam Negeri. Total Anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebesar Rp.2.084.684.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.691.520.200,00 atau sebesar 81,14%. Walaupun realisasi anggaran dalam pelaksanaan tugas pembantuan tidak mencapai 100%, namun realisasi fisik yang dihasilkan mencapai 100%. Sumber dan jumlah

anggaran yang digunakan dalam tugas pembantuan tersaji pada **Tabel 4.44**.

Tabel 4.44. Program, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan dalam Tugas Pembantuan

Program	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	Kementerian Pertanian	1.006.700.000	984.735.400	97,82	100
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian	77.984.000	77.984.000	100	100
Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1.000.000.000	628.800.800	62,88	100
Jumlah		2.084.684.000	1.691.520.200	86,9	100

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2019

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

OPD pelaksana tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di Tahun 2019 adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berjumlah 183 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SMP hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 5.45**.

Tabel 5.45. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

SD	SMP	Jenis Pendidikan					Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
0	2	59	19	71	32	-	183	2	44	108	29	183

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2019

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana prasarana yang digunakan didalam penyelenggaraan tugas pembantuan masih mencukupi. Namun demikian, beberapa sarana prasarana memang masih perlu untuk ditingkatkan ataupun diperbaharui.

9. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi secara umum dapat dilihat pada **Tabel 5.46.**

Tabel 5.46. Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pembantuan

Permasalahan	Solusi
Pada aspek perencanaan, belum semua kementerian/lembaga menyampaikan informasi awal pagu indikatif Tugas Pembantuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Proaktif dengan melakukan konsultasi ke Eselon I Kementerian/Lembaga - Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2019

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2019 tidak memberikan tugas pembantuan daerah pada bawahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



BAB VI**TUGAS UMUM PEMERINTAHAN****A. Kerja Sama Antar Daerah****1. Daerah yang Diajak Kerja Sama**

Kerja sama antar daerah merupakan salah satu kerangka strategis Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, serta sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan satu Daerah dengan dengan Daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama antar daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 termasuk dalam Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain atau disingkat KSDD, yaitu diartikan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Alasan perlunya dilakukan kerja sama antar daerah antara lain meliputi:

- Daerah yang bekerja sama dapat belajar bersama untuk memajukan daerahnya karena saling mentransfer kepandaian, keterampilan, dan informasi;
- Daerah yang bekerja sama memiliki posisi tawar yang lebih baik karena memiliki mitra untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingannya;
- Daerah yang bekerja sama dapat memperkecil atau mencegah

konflik, terutama di daerah yang secara administratif berbatasan dengan daerah lain karena daerah akan lebih toleran dengan mitranya;

- Daerah yang bekerja sama lebih merasakan keadilan karena adanya transparansi dalam melaksanakan kerja sama dan memiliki akses yang sama terhadap informasi serta hasil kerja sama;
- Daerah yang bekerja sama memiliki komitmen untuk memelihara hubungan baik dan saling menguntungkan; dan
- Daerah yang bekerja sama dapat mengurangi ego daerah sehingga menumbuhkan kebersamaan dalam bernegara.

Kerja sama antar daerah dilakukan untuk menghindari berbagai hal berikut:

- Ketidakseimbangan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah;
- Ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya alam dan kemerosotan kualitas lingkungan hidup;
- Konflik antar daerah perbatasan;
- Ketidaktertiban penggunaan lahan;
- Ketidakharmonisan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan (rekomendasi tata ruang, izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya);
- Ketidakefisienan kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 telah mengadakan beberapa kerja sama antar daerah yaitu dengan menjalin kerja sama dengan beberapa mitra dari Daerah lain, baik Daerah yang secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul maupun yang tidak berbatasan, dan diformalkan dalam perikatan kerja sama yang berbentuk 1 (satu) dokumen Kesepakatan Bersama serta 15 (lima belas) dokumen Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 6.47**.

Tabel 6.47. Mitra Kerja Sama dan Bentuk Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Dokumen Perikatan Kerja Sama	
		Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama
1	Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan	-	1
2	Pemerintah Daerah DIY Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	1	
3	Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1
4	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	-	1
5	Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Pemerintah Kabupaten Sleman, dan	-	2
6	Pemerintah DIY	-	5
7	Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh	-	1
8	Pemerintah DIY Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	-	1
9	Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1
10	Pemerintah DIY Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1
11	Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1
Jumlah Dokumen Perikatan Kerja Sama Antar Daerah		1	15

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

2. Dasar Hukum

Kerja sama daerah merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab XVII Bagian Kesatu, Pasal 363 sampai dengan Pasal 369, tentang Kerja Sama Daerah. Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan” dan Pasal 363 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain”. Kerja sama antar daerah atau kerja sama Daerah dengan Daerah lain lebih lanjut lagi diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yaitu dalam Bab II, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama antar daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul;

- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

3. Bidang Kerja Sama

Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan kerja sama yang bersifat wajib dan sukarela karena kerja sama dilaksanakan dengan Daerah lain yang secara administratif berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Kerja sama antar daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi berbagai bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana disajikan dalam **Tabel 6.48** berikut.

Tabel 6.48. Bidang dan Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja Sama
1	Transmigrasi	Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan
2	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemerintah Daerah DIY
3	Komunikasi dan informatika,	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta
4	Transmigrasi	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
5	Komunikasi dan informatika	Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja Sama
		Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Pemerintah Kabupaten Sleman, dan
6	Kepegawaian	Pemerintah DIY
7	Transmigrasi	Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh
8	Pengelolaan Satlinmas Rescue	Pemerintah DIY Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Sleman
9	Transmigrasi	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
10	Pengelolaan Sampah	Pemerintah DIY Pemerintah Kabupaten Sleman
11	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Jalan	Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

4. Nama Kegiatan

Tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif kerja sama antar daerah tahun 2019 dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga pada Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah.

5. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah

Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan tugas umum pemerintahan bidang kerja sama antar daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melalui Sub Bagian

Kerja Sama melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang kerja sama daerah, dan bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kerja sama daerah meliputi kerja sama daerah dengan daerah lain (kerja sama antar daerah), antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Dalam bidang kerja sama daerah, Sub Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah bidang kerja sama daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang kerja sama daerah;
- d. penyiapan bahan pembinaan administratif bidang kerja sama daerah;
- e. penyiapan bahan kajian potensi kerja sama daerah;
- f. pengembangan kerja sama daerah dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar daerah kepada pemerintah provinsi;
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerja sama daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian;
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait tugas dan fungsinya.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 12 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 6.49**.

Tabel 6.49. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

SD	SMP	Jenis Pendidikan					Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
1	-	4	1	3	3	-	12	1	4	5	2	12

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

Keseluruhan pegawai yang mengampu tugas bidang kerja sama daerah (meliputi kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga) di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 3 orang, dengan kualifikasi pendidikan tercatat dari SMA dan S2, serta pangkat dan golongan yaitu golongan II hingga golongan IV, sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 6.50**.

Tabel 6.50. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

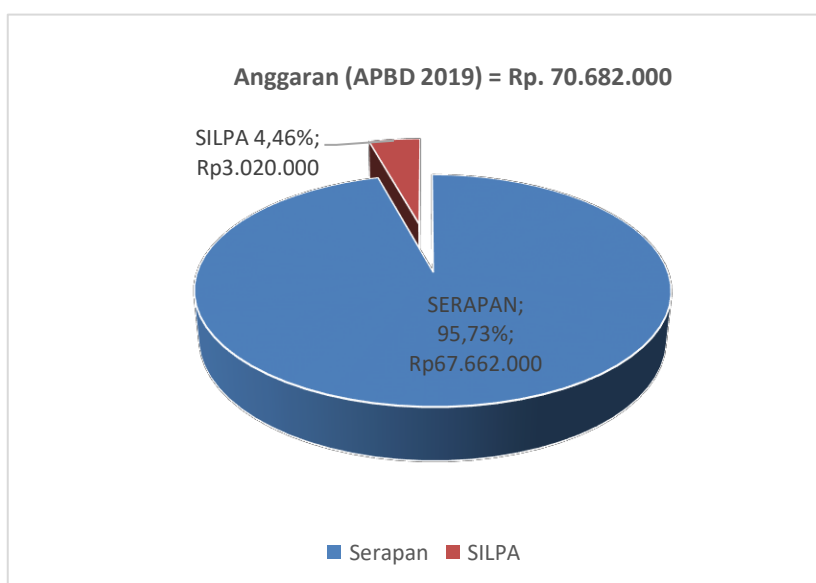
SD	SMP	Jenis Pendidikan					Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	1	1	3

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dukungan dana pelaksanaan tugas bidang kerja sama daerah (meliputi kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga) melalui Kegiatan Pengembangan Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Lembaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian

Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 Nomor 914/027/DPA/PPKD/2019 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 Nomor 914/160/DPPA/PPKD/2019 dengan total anggaran sebesar Rp.70.682.000,00 dan jumlah serapan sebesar Rp.67.662.000,00 atau 95,73%, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp.3.020.000,00 atau 4,27% sebagaimana dapat dilihat dalam **Grafik 6.15**.



Grafik 6.15. Anggaran dan Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Tahun 2019 (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)

8. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama antar daerah bervariasi, menyesuaikan dengan luas atau banyaknya ruang lingkup kerja sama dan kesepakatan para pihak.

9. Hasil (*Output*) dari Kerja Sama

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, melalui Sub Bagian Kerja Sama dilaksanakan tugas pelayanan administratif bidang kerja sama daerah dan pada tahun 2019 ini menghasilkan 16 (enam belas) dokumen perikatan kerja sama antar daerah yaitu berbentuk 1 (satu) dokumen Kesepakatan Bersama dan 15 (lima belas) dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 6.51**.

10. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam pelayanan administratif kerja sama antar daerah tahun 2019 adalah bahwa beberapa dokumen KSDD pembahasan dilaksanakan tidak bertemu secara langsung namun melalui komunikasi dengan email, hal ini mengakibatkan perlunya beberapa kali komunikasi dan koordinasi untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan maksud dari masing-masing Pihak.

11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Selain melaksanakan kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga, Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 juga menjalin sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan PP 28 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Pusat terwujud dalam 8 (delapan) Nota Kesepakatan dan 9 (Sembilan) Rencana Kerja sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 6.53**.

Tabel 6.51. Data Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
1	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019	Nomor : 02/Mou/Bt/2019 Nomor : 893.4/O2.265/PPSDM	Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.	18 Januari 2019	12 Bulan
2	Nota Kesepakatan antara Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Nomor : 16.1/NK/1/02/2019 Nomor : 03/MoU/Bt/2019	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan PPPK Penyuluh pertanian.	13 Februari 2019	s.d. terbitnya SK Pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian
3	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Kejaksaan Negeri Bantul Tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dan Tindakan Hukum Lain Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Serta Pelaksanaan Pengawal Dan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (P4D) Kabupaten Bantul	Nomor : 08/MoUIBt/2019 Nomor : B,-862/O.4.13/04/2019	Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi : a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; b. pelaksanaan P4D di lingkungan PIHAK KESATU, meliputi : 1) pendampingan, pendapat hukum terhadap permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis; dan 2) sosialisasi/penyuluhan/penerangan hukum.	24 April 2019	12 Bulan
4	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantul Tentang Program Perubahan Identitas Di Kartu Keluarga Dan Kartu Penduduk Elektronik Bagi Pengantin Baru Melalui Sinkronisasi Data Dan Integrasi	Nomor : 10/MoU/Bt/2019 Nomor : 2151/Kk.12.01/6/PW.01/5/2019	Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi : a. Elemen data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk kedua mempelai, yaitu : 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2) Nama Lengkap;	13 Mei 2019	3 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Sistem Informasi Manajemen Nikah Dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Di Kabupaten Bantul		<ul style="list-style-type: none"> 3) Alamat; 4) Tempat dan Tanggal Lahir; 5) Status Kawin; 6) Status Kelamin; 7) Agama; dan 8) Nama Lengkap Orang Tua. <ul style="list-style-type: none"> b. Elemen data dari hasil pencatatan nikah dan rujuk dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk kedua mempelai, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> 1) Nomor Akta Perkawinan; 2) Tanggal Perkawinan; 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK); 4) Nama Lengkap; 5) Perubahan Data; 6) Perubahan status; 7) Perubahan alamat; 8) Cetak Kartu Keluarga; dan 9) Cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik. c. Sosialisasi administrasi kependudukan; d. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH); e. Pelaksanaan sinkronisasi data dan integrasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM); f. Hasil sinkronisasi data dan integrasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM); g. Penyerahan KTP elektronik/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga kepada KUA di wilayah : <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Bantul; 2) Kecamatan Pleret; 3) Kecamatan Imogiri; 		

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
			4) Kecamatan Piyungan; 5) Kecamatan Pandak; 6) Kecamatan Pajangan; 7) Kecamatan Dlingo; 8) Kecamatan Bambanglipuro; 9) Kecamatan Kretek; 10) Kecamatan Jetis; 11) Kecamatan Sedayu; 12) Kecamatan Srandakan; 13) Kecamatan Sanden; 14) Kecamatan Sewon; 15) Kecamatan Kasihan; 16) Kecamatan Banguntapan; dan 17) Kecamatan Pundong		
5	Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Sinergitas Dalam Dukungan Pencegahan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan Di Kabupaten Bantul	Nomor : 15/KPPU/NK/IX/2019 Nomor : 25/MoU/Bt/2019	Objek Nota Kesepakatan ini adalah pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha, serta koordinasi pengawasan kemitraan Ruang Lingkup : a. Asistensi sosialisasi dan advokasi terkait persaingan usaha b. Tukar menukar Informasi persaingan usaha ; dan c. Koordinasi pengawasan pelaksanaan kemitraan	23 September 2019	12 Bulan
6	Nota Kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Sinergitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Bantul	Nomor : 25.2/KA-BIG/PK.05/10/2019 Nomor : 30/MoU/Bt/2019	Ruang Lingkup :: a. Penyelenggaraan data dan Informasi geospasial b. Pengembangan data dan informasi geospasial c. Pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Bantul d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial	25 Oktober 2019	

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
7	Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Sinergitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Nomor : TKS.01.01.105.1055.11.19.10824 Nomor : 33/MoU/Bt/2019	Objek Nota Kesepakatan ini meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, kesehatan, pangan olahan, serta pengawasan fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian Ruang lingkup : a. Pembinaan dan pengawasan terpadu di bidang obat dan pangan b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat c. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu d. Pembinaan dan pendampingan UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan e. Integrasi data dan system informasi dalam rangka percepatan perijinan di bidang obat dan makanan f. Pemanfaatan, peningkatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak dalam rangka pengawasan obat dan makanan g. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan h. Bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi Para Pihak	07 November 2019	12 Bulan
8	Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Kepolisian Resor Bantul Sinergitas Dalam Upaya Menciptakan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan Serta Kesiap Siagaan Pelayanan Dan Penanganan Aduan Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 34/MoU/Bt/2019 Nomor : B/2412/XI/HUK.81/2019	Ruang lingkup : a. Pemeliharaan dan peningkatan kondisi wilayah yang tenteram, tertib, aman dan nyaman b. Pelayanan dan penanganan aduan masyarakat secara cepat dan c. Dukungan kegiatan para pihak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan	18 Nopember 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
9	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019	Nomor : 01/RK/Bt/2019 Nomor : 1807/PKA.1.1/HKM.03	Penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	05 Agustus 2019	4 Bulan
10	Rencana Kerja antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Bantul	Nomor : 25.1/PPKS-BIG/PK.05/10/2019 Nomor : 02/RK/Bt/2019	<p>a. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengumpulan, pengolahan dan penggunaan data dan informasi geospasial; 2) pembentukan metadata; 3) pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial; 4) pemeliharaan, pemutakhiran dan pertukaran data dan informasi geospasial; dan 5) pembinaan, asistensi dan supervisi penyelenggaraan data dan informasi <p>b. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa peta dasar, peta tematik dan peta rencana;</p> <p>c. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial bidang penataan ruang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembinaan, asistensi dan supervisi peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang; dan 2) fasilitasi dalam rekomendasi, orthorektifikasi dan aspek teknis perpetaan tata ruang. <p>d. Pengembangan simpul jaringan informasi geospasial, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penggunaan dan pengembangan teknologi dan infrastruktur simpul jaringan informasi 	25 Oktober 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
11	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan Data Kependudukan	Nomor : 03/RK/Bt/2019 Nomor : B-2312/m.4.12/08/10/2019	geospasial; 2) pengamanan dan pengembangan simpul jaringan informasi geospasial; dan 3) pembinaan, asistensi dan supervisi pengembangan simpul jaringan informasi geospasial. e. pembinaan sumber daya manusia bidang informasi geospasial terkait penataan ruang dan pengembangan simpul jaringan informasi geospasial; dan f. monitoring dan evaluasi Rencana Kerja. Ruang lingkup : Akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga b. Nomor Kartu Keluarga (KK) c. Nama Kepala Keluarga d. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota keluarga e. Nama Anggota Keluarga f. Status Hubungan keluarga g. tempat Lahir g. Tanggal Lahir h. Jenis Kelamin dan i. Alamat	25 Oktober 2019	3 Tahun
12	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Terkait Dengan Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Bantul	Nomor : 04/RK/Bt/2019 Nomor : 2208/SKB-34.02.UP.03/XI/2019	Ruang lingkup Rencana Kerja meliputi : a. Pertukaran data PBB-P2 dan data BPHTB dengan data pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Koordinasi dan dukungan teknis administrasi PBB-P2 dan BPHTB serta Pemanfaatan ZNT	01 Nopember 2019	3 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
13	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta tentang Pembinaan Pengawasan Produk , Fasilitas Produksi Dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan Dan Pangan	Nomor : 05/RK/Bt/2019 Nomor : T-KS.01.01.105.1065.11.19.10825	yang dimiliki oleh Pihak KEDUA dan c. Koordinasi dan dukungan terhadap kegiatan PTSL yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA Ruang Lingkup : a. Pembinaan dan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan b. Pembinaan dan pengawsan peredaran obat, obat tradisional komsmetik suplemen kesehatan dan pangan c. Pengelolaan sistem informasi umpan balik d. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai obat, obat tradisonal, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan e. Penanganan kasus keracunan yang disebabkan oleh obat-obatan tradisonal, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan. f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengawsan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional , kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan g. sinkronisasi dan integrasi program pengawsan produk obat, obat tradisional , kosmetik , suplemen kesehatan dan pangan	07 Nopember 2019	5 Tahun
14	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Yogyakarta tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Nomor : T-KS, 01.01.105.1055.11.19.10825 Nomor : 06/RK/Bt/2019	Ruang Lingkup : a. Koordinasi pelaksanaan pembinaan pengeloaan PJAS dan pengelolaan kantin sekolah b. Informasi umpan balik hasil pembinaan PJAS dan pengelolaan Kantin Sekolah	07 Nopember 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
15	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Pembinaan Dan tentang Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan, Sarana Ritel Pangan Dan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Nomor : T-KS, 01.01.105.1055.11.19.10827 Nomor : 07/RK/Bt/2019	Ruang lingkup : a. Pembinaan dan pengawasan usaha produksi pangan olahan b. Pembinaan dan pengasan usaha ritel pangan c. Pembinaan dan pengawasan usaha distribusi bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan d. Pembinaan dan pengawasan pasar rakyat agar aman dari bahan berbahasa dan e. pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	07 Nopember 2019	5 Tahun
16	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Yogyakarta tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pangan Segar	Nomor : T-KS, 01.01.105.1055.11.19.10828 Nomor : 08/RK/Bt/2019	Ruang lingkup meliputi :: a. Koordinasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan hewan dan ikan b. Informasi umpan balik hasil pembinaan, pemantasan dan pengasan pangan segar asal tumbuhan hewan dan ikan	07 Nopember 2019	5 Tahun
17	Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Kepolisian Resor Bantul tentang Sinergi Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (NTPD 112)	Nomor : 09/RK/Bt/2019 Nomor : B/2413/XI/HUK.8.1/2019	Ruang lingkup : a. Penyelenggaraan layanan NTPD 112 dari Pemerintah Kabupaten Bantul b. Penyelenggaraan layanan polisi 110	18 Nopember 2019	3 Tahun

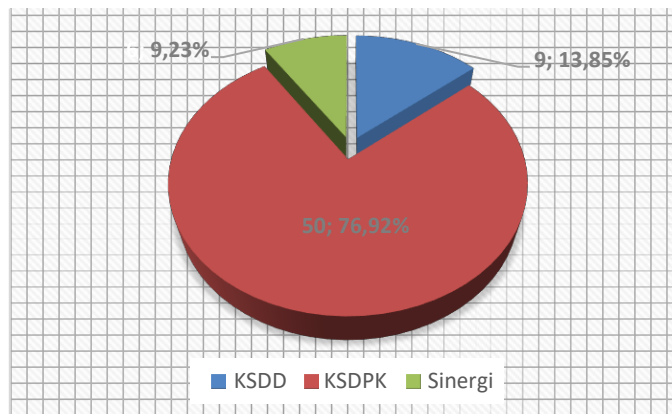
Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 secara keseluruhan telah menjalin kerja sama dengan 65 (enam puluh lima) mitra (dapat dilihat dalam **Tabel 6.52** dan **Grafik 6.16**) dan menghasilkan 143 (seratus empat puluh tiga) dokumen perikatan kerja sama (dapat dilihat dalam **Tabel 6.52** dan **Grafik 6.16**).

Tabel 6.52. Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019

Mitra Kerja Sama	Jumlah
Daerah lain	9
Instansi Vertikal	6
Pihak ketiga	
Perbankan	11
Badan usaha (CV/PT)	24
Badan hukum (Institusi Pendidikan)	20
Organisasi kemasyarakatan	1
Jumlah	71

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

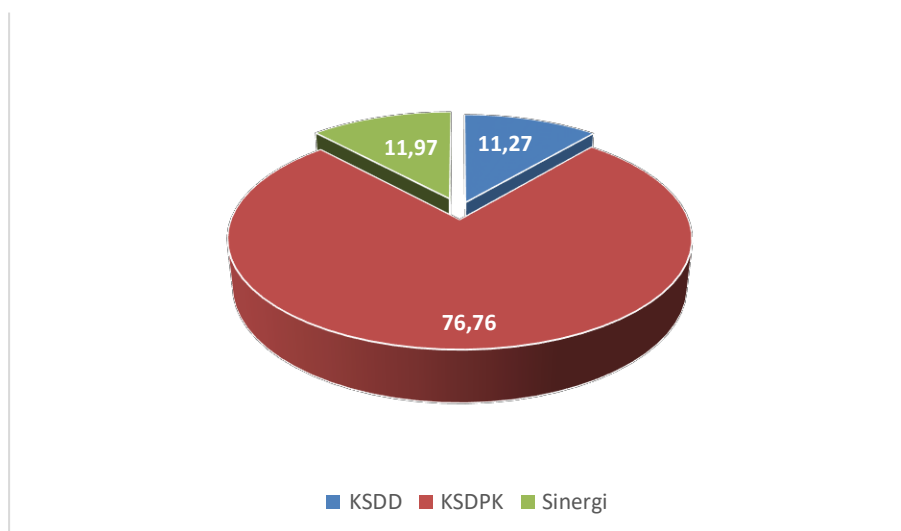


Grafik 6.16. Persentase Jumlah Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)

Tabel 6.53. Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019

Kategori	Bentuk Perikatan Kerja Sama	
	Dokumen Kesepakatan Bersama	Dokumen Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja
Kerja sama dengan daerah lain	1	15
Sinergi dengan Instansi Vertikal	8	9
Kerja sama dengan pihak ketiga	32	77
Jumlah Dokumen Perikatan Kerja Sama	41	101
Jumlah Keseluruhan Dokumen Perikatan Kerja Sama (Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja) dalam 1 tahun		142

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019



Grafik 6.17. Persentase Jumlah Dokumen Perikatan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019. (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)

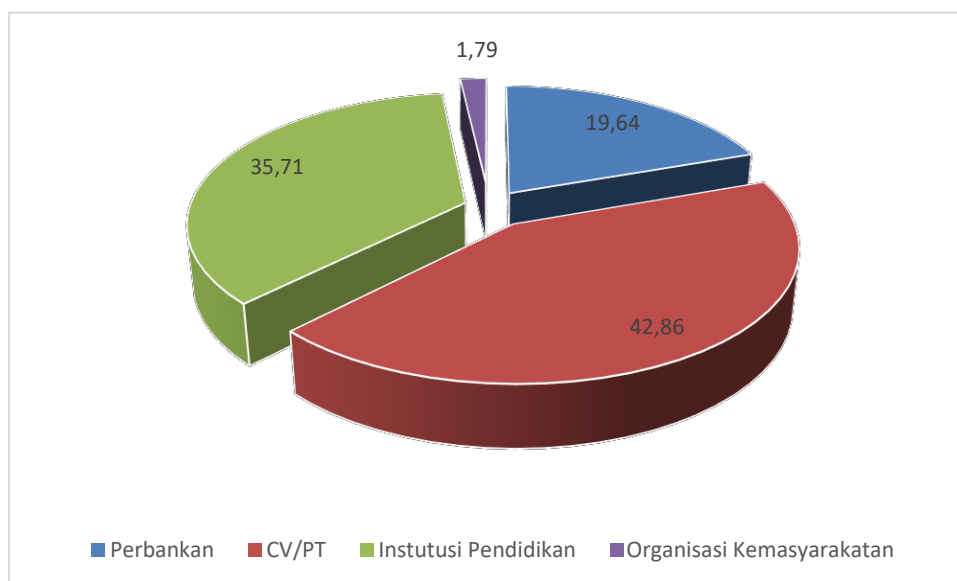
B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra yang Diajak Kerja Sama

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra terdiri atas perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dengan pihak ketiga harus dilihat sebagai suatu kebutuhan pemerintah daerah yang tidak terelakkan pada masa sekarang mengingat perubahan paradigma pembangunan yang tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan, melainkan harus melibatkan partisipasi semua pihak sehingga kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai kalangan penting untuk dibangun dan ditingkatkan. Kerja sama dengan pihak ketiga merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau menarik investasi dalam jumlah yang cukup besar guna memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 telah menjalin kerja sama dengan 56 (lima puluh enam) mitra pihak ketiga yaitu meliputi 11 (sebelas) mitra perbankan, 24 (dua puluh empat) mitra CV/PT, 20 (dua puluh) mitra institusi pendidikan, dan 1 (satu) mitra organisasi kemasyarakatan (jumlah mitra kerja sama dengan pihak ketiga dalam persen ditunjukkan dalam **Grafik 6.18**).



Grafik 6.18. Persentase Jumlah Mitra Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019. (Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019)

Perikatan kerja sama dengan 56 (lima puluh enam) mitra pihak ketiga tersebut diformalkan dalam bentuk 32 (tiga puluh dua) Kesepakatan Bersama serta 77 (tujuh puluh tujuh) Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.54.

Tabel 6.54. Mitra Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Perikatan Kerja Sama	
		Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama
1	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Yogyakarta	1	1
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul	2	8
3	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bantul	1	1
4	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta	1	1
5	PT Bank Brisyariah Kantor Cabang Yogyakarta		1
6	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Yogyakarta	1	1
7	PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta	1	1

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Perikatan Kerja Sama	
		Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama
8	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	1
9	PT Bank Mandiri TASPEN	1	1
10	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	1	1
11	PD. BPR. Bank Bantul		2
12	PT. Angkasa Pura I (Persero)	2	1
13	CV. Altar Ria Production		1
14	BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta		7
15	Institut Tehnologi Yogyakarta	1	1
16	Universitas Gadjah Mada		1
17	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	1	1
18	RSKIA Rachmi	1	1
19	Stiekes Wirahusada	1	1
20	PT Asuransi Jasaraharja Putera	1	1
21	PT Taspen		1
22	Universitas Jendral Achmad Yani	1	2
23	Universitas Yarsi	1	1
24	Universitas Ahmad Dahlan		2
25	Politeknik API Yogyakarta	1	1
26	Universitas Janabadra		1
27	Poltekkes TNI AU Adisutjipto Yogyakarta	1	2
28	Universitas Sarjana Wiyata	1	1
29	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk	1	1
30	Toko Pantès		1
31	Balong Waterpark		1
32	Bale Ayu		1
33	Apotek Indah Farma		1
34	Toko Buku Social Agency		1
35	Grand Puri Waterpark		1
36	Rumah Makan Ingkung Jawa Waroeng Ndeso		1
37	Tirta Tamansari Waterpark		1
38	PT Yudhistira Ghalia Indonesia Area Yogyakarta	1	1
39	Swalayan dan Toserba Purnama		1
40	Galaxy Waterpark	1	1
41	Baby Zone	1	1
42	Swalayan Toserba Agung	1	1
43	PT Sanghiang Perkasa	1	1
44	Antara Digitas Media		1
45	Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta		1
46	Institut Sains dan Teknoligo AKPRIND Yogyakarta	1	1
47	STIKES Madani		1
48	Radjawali Indonesia		1
49	Universitas Kristen Duta Wacana		1

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Perikatan Kerja Sama	
		Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama
50	Universitas Negeri Semarang		1
51	Akademi Keperawatan YKY	1	2
52	Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta	1	2
53	Akademi Analisis Kesehatan Manggala		2
54	Poltekes Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta		2
55	Poltekes Permata Indonesia Yogyakarta		2
56	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	
Jumlah Dokumen Perikatan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga		32	77

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

2. Dasar Hukum

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga diamanatkan dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu menyebutkan bahwa “**Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga**”. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga lebih lanjut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yaitu dalam Bab III, mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul;
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

3. Bidang Kerja Sama

Kerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2018 meliputi berbagai bidang sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 6.55** berikut.

Tabel 6.55. Bidang dan Mitra Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pihak Ketiga Tahun 2019

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja Sama
1	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan, <i>corporate social responsibility</i>	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Yogyakarta
2	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul
3	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bantul
4	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta
5	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT Bank Brisyariah Kantor Cabang Yogyakarta
6	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Yogyakarta
7	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta
8	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
9	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT Bank Mandiri TASPEN
10	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
11	Pengelolaan keuangan daerah, produk dan jasa layanan perbankan	PD. BPR. Bank Bantul

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja Sama
12	Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Kabupaten	PT. Angkasa Pura I (Persero)
13	Pelaksanaan Even Bantul Ekspo	CV. Altar Ria Production
14	Program Aplikasi, distribusi KIA	BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta
15	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Institut Tehnologi Yogyakarta
16	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Gadjah Mada
17	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
18	Pelayanan Akta Kelahiran	RSKIA Rachmi
19	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Stiekes Wirahusada
20	Asuransi	PT Asuransi Jasaraharja Putera
21	Sistem informasi	PT Taspen
22	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Jendral Achmad Yani
23	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Yarsi
24	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Ahmad Dahlan
25	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Politeknik API Yogyakarta
26	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Janabadra
27	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Poltekkes TNI AU Adisutjipto Yogyakarta
28	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Sarjana Wiyata
29	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk
30	Penggunaan Identitas Kependudukan	Toko Pantas
31	Penggunaan Identitas Kependudukan	Balong Waterpark
32	Penggunaan Identitas Kependudukan	Bale Ayu
33	Penggunaan Identitas Kependudukan	Apotek Indah Farma
34	Penggunaan Identitas Kependudukan	Toko Buku Social Agency
35	Penggunaan Identitas Kependudukan	Grand Puri Waterpark
36	Penggunaan Identitas Kependudukan	Rumah Makan Ingkung Jawa Waroeng Ndeso
37	Penggunaan Identitas Kependudukan	Tirta Tamansari Waterpark
38	Penggunaan Identitas Kependudukan	PT Yudhistira Ghalia Indonesia Area Yogyakarta

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja Sama
39	Penggunaan Identitas Kependudukan	Swalayan dan Toserba Purnama
40	Penggunaan Identitas Kependudukan	Galaxy Waterpark
41	Penggunaan Identitas Kependudukan	Baby Zone
42	Penggunaan Identitas Kependudukan	Swalayan Toserba Agung
43	Identitas Kependudukan, PAUD	PT Sanghiang Perkasa
44	Informasi Publik	Antara Digitas Media
45	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
46	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Institut Sains dan Teknoligo AKPRIND Yogyakarta
47	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	STIKES Madani
48	Promosi Pasar	Radjawali Indonesia
49	Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Universitas Kristen Duta Wacana
50	Kepegawaian	Universitas Negeri Semarang
51	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Akademi Keperawatan YKY
52	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
53	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Akademi Analis Kesehatan Manggala
54	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Poltekes Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
55	Kesehatan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	Poltekes Permata Indonesia Yogyakarta
56	Informasi dan komunikasi	Lembaga Penyiaran Publik Televesi Republik Indonesia

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

4. Nama Kegiatan

Tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif kerja sama daerah dengan pihak ketiga tahun 2019 dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga pada Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah.

5. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah

Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan tugas umum pemerintahan bidang kerja sama antar daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melalui Sub Bagian Kerja Sama melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang kerja sama daerah, dan bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kerja sama daerah meliputi kerja sama daerah dengan daerah lain (kerja sama antar daerah), antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 11 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 6.56**.

Tabel 6.56. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

SD	SMP	Jenis Pendidikan					Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
1	-	4	1	3	3	-	12	1	4	5	2	12

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

Keseluruhan pegawai yang mengampu tugas bidang kerja sama daerah (meliputi kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak

ketiga) di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 3 orang, dengan kualifikasi pendidikan tercatat dari SMA dan S2, serta pangkat dan golongan yaitu golongan II hingga golongan IV, sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 6.57**.

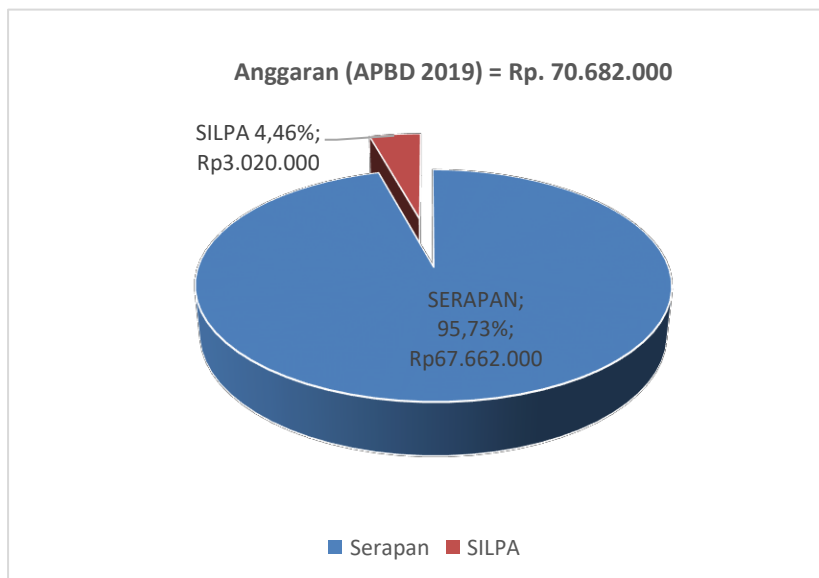
Tabel 6.57. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

SD	SMP	Jenis Pendidikan						Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3	I		II	III	IV		
-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	1	1	3	

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 2019

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dukungan dana pelaksanaan tugas bidang kerja sama daerah (meliputi kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga) melalui Kegiatan Pengembangan Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Lembaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 Nomor 914/027/DPA/PPKD/2019 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 Nomor 914/160/DPPA/PPKD/2019 dengan total anggaran sebesar Rp.70.682.000,00 dan jumlah serapan sebesar Rp.67.662.000,00 atau 95,73%, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp.3.020.000,00 atau 4,27% sebagaimana dapat dilihat dalam **Grafik 6.19**.



Grafik 6.19. Anggaran dan Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Tahun 2019

8. Jangka Waktu Kerja Sama

Pada tahun 2019, dihasilkan 109 (seratus sembilan) dokumen perikatan kerja sama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pihak ketiga yaitu berbentuk 32 (tiga puluh dua) Kesepakatan Bersama dan 77 (tujuh puluh tujuh) Perjanjian Kerja Sama dengan jangka waktu kerja sama yang bervariasi, menyesuaikan dengan luasnya atau banyaknya ruang lingkup kerja sama dan kesepakatan para pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 6.58**.

Tabel 6.58. Perikatan Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dunia Usaha/Pihak Ketiga Tahun 2019

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT Angkasa Pura (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta Tentang Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul Di Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta	Nomor : 01/MoU /Bt/2019; Nomor : SP.01/HK.O6.O2/2019/GM.JOG-B	Ruang lingkup : Promosi dan pemberian informasi tentang destinasi wisata Kabupaten Bantul di lingkungan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta	02 Januari 2019	1
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Institut Teknologi Yogyakarta Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 04/MoU /Bt/2019 Nomor : 1.196 /ITY-STTL/Rek/III/2019	Objek Dan Ruang Lingkup a. Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.	01 Maret 2019	12 Bulan
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 05/MoU /Bt/2019 Nomor : 13/UN62/HK.O7.OO /2019	Objek Dan Ruang Lingkup a. Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.	02 April 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak (RSKIA) Rachmi Yogyakarta Tentang Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Bantul	Nomor : 061MoU/Bt/2019 Nomor : 008/MoU/RACHMI/IV /2019	Ruang Lingkup: Pemberian hak akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan yang terdapat dalam sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	14 Mei 2018	5 tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Stikes Wira Husada Yogyakarta Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 07/MoU/Bt/2019 Nomor : 674/STIKES-WH/IV/2019	Ruang lingkup: Pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	14 Mei 2018	3 tahun
6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak (RSKIA) Rachmi Yogyakarta Tentang Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Bantul	Nomor : 061MoU/Bt/2019 Nomor : 008/MoU/RACHMI/IV /2019	Ruang Lingkup : Pemberian hak akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan yang terdapat dalam sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	02 April 2019	12 Bulan
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul	Nomor : 11/MoU/Bt/2019 Nomor : MOU/020/UNJANI/V/2019	Ruang lingkup: Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul	15 Mei 2019	12 bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	melalui Kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat				
8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Yarsi Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 12/MoU/Bt/2019 Nomor : 0MOU/REK /UY /V/12019	Ruang lingkup: Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul	20-05-2019	12 Bulan
9	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik API Yogyakarta Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 13/MoU/BT/2019 Nomor : 165/POLTEK-API/G/2019	Ruang lingkup: Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.	22 Mei 2019	12 Bulan
10	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Poltekes Adisutjipto Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 14/MoU/Bt/2019 Nomor : Perjama/02/VI/2019/Poltekes	Ruang lingkup: Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.	25 Juni 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
11	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Budaya Nasional Dan Ajaran Luhur Tamansiswa	Nomor : 15/MoU/Bt /2019 Nomor : 10/UST/Rek/MoU /VII/2019	Ruang lingkup: Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa di wilayah Kabupaten Bantul.	25 Juli 2019	12 Bulan
12	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Dengan PT.Bank BPD DIY Tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Nomor : • 119/02912/2019 • 18/NKB.Yk/VII/2019 • 32.1/PK.KDH/A/2019 • 16/MoU/Bt/2019 • 415.4/KBSR/13/2019 • 53/MoU.KP/HKM/2019 • 0456/OM 0004	Ruang lingkup: a. pemberian layanan kepada wajib pajak daerah dan wajib daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berpedoman pada prinsip good corporate governance ; dan b. koordinasi pendapatan asli daerah sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.	16 Juli 2019	12 Bulan
13	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi Di Kabupaten Bantul	Nomor : 17 /MoU /Bt/2019 Nomor : 0142/ BTS- KOMINFOBANTUL/Vffi/12029	Ruang lingkup: Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung pembangunan Bantul Smart City melalui kerja sama bidang infrastruktur telekomunikasi.	01 Agustus 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
14	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Agung Swalayan Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Anak Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Bantul	Nomor : 18/ MoU /Bt/2019 Nomor : 002/AGO3/VIII/2019	Ruang lingkup: a. penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA); dan b. pemberian keringanan untuk memperoleh produk dan layanan yang dimiliki PIHAK KEDUA.	21 Agustus 2019	12 Bulan
15	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Galaxy Waterpark Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Anak Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Bantul	Nomor : 19/MoU /Bt/2019 Nomor : 002 /SK-MNJ/6WP-08/VIII/2019	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA); dan b. pemberian keringanan untuk memperoleh produk dan layanan yang dimiliki PIHAK KEDUA.	21 Agustus 2019	12 Bulan
16	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Baby Zone Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Anak Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Bantul	Nomor : 20/MoU/Bt/2019 Nomor : 02 /08-Babyzone/2019	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA); dan b. pemberian keringanan untuk memperoleh produk dan layanan yang dimiliki PIHAK KEDUA.	21 Agustus 2019	12 Bulan
17	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Area Yogyakarta Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Anak Dalam Rangka Peningkatan	Nomor : 21/MoU/Bt/2019 Nomor : 040/A-YK/ASM/MOU/VIII/2019	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA); dan b. pemberian keringanan untuk memperoleh produk dan layanan yang dimiliki PIHAK KEDUA.	21 Agustus 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
18	Kesejahteraan Anak Di Kab. Bantul Kesepakatan Bersama antara PT Angkasa Pura (Persero) Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Kerja Sama Pengembangan Potensi Dan Sumber Daya Daerah Di Kabupaten Bantul	Nomor : SP.40/HK.O6.O2/2019/GM.JOG Nomor : 241/MoU/IBt/2019	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : a. promosi potensi dan sumber daya daerah di Kabupaten Bantul; dan b. pengembangan sumber daya manusia.	02 September 2019	12 Bulan
19	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Sanghiang Perkasa tentang Kerja Sama Peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul untuk mendukung Layanan Kesejahteraan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI)	Nomor : 26/MoU/Bt/2019 Nomor : 253/SHP-legal/MOU/XI/2019	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul.	23 September 2019	12 Bulan
20	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Institut Sains Dan Tehnologi AKPRIND Yogyakarta Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 29/MoU/Bt/2019 Nomor : 002/MoU/Rek/X/2019	Ruang lingkup: Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.	21 Oktober 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
21	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Dan Publikasi Pembangunan Kabupaten Bantul A	Nomor : 24/l.i/tvri/2019 Nomor : 31/MoU/Bt/2019	Ruang lingkup: a. Penyediaan layanan produksi penyiaran dan publikasi pembangunan Kabupaten Bantul ; dan b. Pelaksanaan penyiaran dan publikasi Pembangunan Kabupaten Bantul melalui TVRI	30 Oktober 2019	12 Bulan
22	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Negara Indonesta (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 35 /MoU/Bt/2019 Nomor : 173/MoU/Bt/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Desember 2019	60 hari
23	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Utama Yogyakarta Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 36 /MoU/Bt/2019 Nomor : 032/DJ0403	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari
24	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bantul Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 37 /MoU/Bt/2019 Nomor : B.3283-VII/KC/II/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
25	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Tabungan Negara Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 38 /MoU/Bt/2019 Nomor : 138/MoU/005/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari
26	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 39 /MoU/Bt/2019 Nomor : 231-MOU/YGY-BM/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari
27	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bartul Dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 40 /MoU/Bt/2019 Nomor : R.07.Ar.YOG/2427/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari
28	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bartul Dan PT. Bank Mandiri Taspen Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 41 /MoU/Bt/2019 Nomor : DIR.PKS/MOU.006/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari
29	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Muamalat Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 42 /MoU/Bt/2019 Nomor : 058/BMI-BTL/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
30	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Woori Bersaudara Tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 43/MoU/Bt/2019 Nomor : 90/MOU-KC.YGY/BWSI-PEMKAB.BTL/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	09 Deseember 2019	60 hari
31	Kepekatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor : 44/MoU/Bt/2019	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul	13 Desember 2019	12 bulan
32	Kepekatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Nomor 45/MoU/Bt/2019	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul	16 Desember 2019	12 bulan
33	Perjanjian Kerja Sama antara PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul Di	Nomor : SP.02/HK.06.02/2019/GM JOG-B Nomor : 01/PK/Bt/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pemasangan stiker destinasi wisata Kabupaten Bantul di IJnderposs Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto Yogya karta sebanyak 4 (empat) titik; b. penempatan leaflet destinasi wisata	02 Januari 2019	2 tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta		Kabupaten Bantul di gerai pusat informasi wisatawan atau Tourist Informotion Center (TIC) PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan pertunjukan seni kebudayaan Kabupaten Bantul di area terminal Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta pada acara atau event tertentu.		
34	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Brisyariah Tbk Kantor Cabang Yogyakarta tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Bantul Dengan Sistem Online	Nomor : 02/PK/Bt/2019 Nomor : B.015/KC- YOG/O1/2019	Ruang Lingkup : Kegiatan perbankan dan layanan kepada masyarakat berupa: a. penerimaan pembayaran PBB P2 Kabupaten Bantul; dan b. pelimpahan seluruh saldo penerimaan pembayaran PBB P2 tersebut dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.	04-01-2019	5 Tahun
35	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta tentang Distribusi Kartu Indonesia Sehat Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahap X Tahun 2018 Dan Tambahan Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul	Nomor : 04.1/PK/Bt/2019 Nomor : 55/KTR/VI-8/0219	Ruang Lingkup : Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada peserta penerima bantuan iuran sesuai daftar dari Kementerian Sosial	01 Februari 2019	30 Hari kerja

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
36	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Institut Teknologi Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor : 05/PK /Bt/2019 Nomor : 1.230/ITY-STTL/Rek/III /2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penelitian bagi dosen danlatau mahasiswa; b. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; dan c. pengembangan sumber daya manusia.	01-03-2019	5 Tahun
37	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 05.1/PK,/Btl/2019 Nomor : 4297 I UN1/FKG/Set.KG1 /DN/2019	Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi: a. praktek klinik dan nonklinik di Dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di wilayah Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.	01 Maret 2019	3 Tahun
38	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor : 06/PK/IBtl/2019 Nomor : 14/UN62/Hk.O7.OO/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penelitian bagi dosen danf atau mahasiswa; b. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; dan c. pengembangan sumber daya manusia.	02 April 2019	5 Tahun
39	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan RS KIA Rachmi tentang Pelayanan	Nornor : 07 /PK/Bt/2019 Nomor :	Ruag lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah akses data dan pemanfaatan data Kependudukan guna pelayanan Akta	02-04-2019	3 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Akta Kelahiran Terintegrasi Secara Online Bagi Penduduk Bantul	010/PKS/RACHMI/V /2019	Kelahiran Terintegrasi Secara Online bagi penduduk Bantul yang melahirkan di RSKIA RACHMI, meliputi : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Kartu Keluarga (KK); c. Kartu Identitas Anak (KIA); dan d. Akta Kelahiran.		
40	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Wirahusada Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 08/PK/BT/2019 Nomor : 675/STIKES-WH/IV/2019	Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi: a. praktek klinik dan nonklinik di Dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Desa Canden Kec. Jetis, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat yang disepakati Para PIHAK	02 April 2019	5 Tahun
41	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT Asuransi Jasarharja Putera Kantor Cabang Yogyakarta tentang Penutupan Asuransi Pelayanan Umum (Public Liability) Bag Pengunjung Obyek Wisata Di Kabupaten Bantul	Nomor : 09/PK/Bt /2019 Nomor : P/O7 /KS/IV/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. pembayaran premi asuransi; b. pengajuan klaim asuransi; dan c. pembayaran klaim asuransi.	29 April 2019	2 Tahun
42	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Nomor : 09.1/PKIBt/2019 Nomor :	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penempatan dan pengelolaan DAK	29 April 2019	

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Cabang Bantul tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Kabupaten Bantul Tahun 2019	010A/DJO403	NonFisik BOP PAUD Tahun 2019; b. jenis pelayanan yang diberikan; c. mekanisme penyaluran DAK NonFisik BOP PAUD Tahun 2019 ke rekening satuan pendidikan penyelenggara PAUD; d. pelaporan; dan e. tata cara penyelesaian perselisihan.		
43	Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Implementasi Sistem Informasi Pengolahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Nomor : JAN.18/C.4.3/2019 Nomor : 09.2/PK/Bt /2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. pemakaian program aplikasi SIMGAJI oleh Pihak Kedua yang dibangun dan dikembangkan oleh Pihak Kesatu dalam pengolahan gaji PNS Daerah; b. pemeliharaan data PNS Daerah, Iuran Wajib Pegawai (IWP), Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) yang akurat, up to date, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Pihak	02-05 2019	5 Tahun
44	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor : 11/PK/Bt/2019 Nomor : MOU/021/V/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa; b. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan atau mahasiswa; dan c. pengembangan sumber daya manusia.	15 Mei 2019	5 Tahun
45	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Jenderal Achmad Yani	Nomor : 12/PK/Bt/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :	15 Mei 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Yogyakarta Tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : MOU/022/V/2019	a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat yang disepakati PARA PIHAK.		
46	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta tentang Distribusi Kartu Indonesia Sehat Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahap I Dan Tahap II Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul	Nomor : 13/PK/ Bt/2019 Nomor 102/KTR/VI-8/0519	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran sesuai daftar dari Kementerian Sosial.	16 Mei 2019	30 hari
47	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Yarsi tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Bantul	Nomor 14/PK/BT/2019 Nomor : 019/PKS/REK/UY/V/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penelitian bagi dosen danf atau mahasiswa; b. pengabdian pada masyarakat bagi dosen danf atau mahasiswa; dan c. pengembangan sumber daya manusia.	20 Mei 2019	5 Tahun
48	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Pembangunan Daerah Daerah	Nomor 15/PK/BT/2019	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Penyaluran Dana BRS Tahun Anggaran	20 Mei 2019	

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Istimewa Yogyakarta Cabang Kabupaten Bantul Tentang Penyaluran Dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Berupa Uang Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bantul Tahun 2019	Nomor : 013/HM 0502	2019 dari nama penerima Dana BRS; dan b. Pelayanan penarikan dana oleh penerima Dana BRS 1. Kecamatan Pundong : Desa Panjangrejo, Srihardono; 2. meliputi : Desa Seloharjo, Desa 3. Kecamatan Srandakan : Desa Trimurti; 4. Kecamatan Sewon : Desa Timbulharjo, Desa Pendowoharjo; dan 5. Kecamatan Kasihan : Desa Ngestiharjo.		
49	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Bantul Dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Pariwisata Kabupaten Bantul	Nomor : 16/PK/BT/2019 Nomor : F5/67/H.22.V/2019	Ruang lingkup kerjasama ini dalam bidang: a. Pengembangan kapasitas Sumber Daya manusia dan kelembagaan b. Pengembangan destinasi pariwisata : dan c. Pengembangan pemasaran pariwisata	22 Mei 2019	5 Tahun
50	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik API Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Bantul	Nomor : 17/PK/Bt/2019 Nomor : 166/Poltek-API/G/05/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerjasama dalam bidang: a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; b. pengembangan destinasi pariwisata; dan c. pengembangan pemasaran pariwisata.	22 Mei 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
51	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Implementasi Integrasi Antara Aplikasi Pcare Dengan Aplikasi Digtal Government Service (Dgs) Kesehatan	Nomor : 112/KTR/VI-08/0619 Nomor : 18/PK/Bt/2019	Ruang lingkup Peq'anjian Kerja Sama ini adalah implementasi integrasi sistem antara Aplikasi PCare dan Aplikasi DGS Kesehatan yang meliputi : a. pemberian hak akses Aplikasi DGS Kesehatan oleh PIHAK KESATU untuk dapat melakukan pertukaran data melalui web seruicePCare hoduuction. b. implementasi Aplikasi DGS Kesehatan yang terintegrasi dengan uteb seruice PCare di Puskesmas.	19 Juni 2019	3 Tahun
52	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Program Studi Akuntansi Universitas Janabdra Yogyakarta tentang Pemutakhiran Data Dan Pemetaan Tematik Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Bantul	Nomor : 19/PK/Bt12019 Nomor : 467a/ A.12 /R/UJBIVI/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. pendataan dan pemuktahiran data karakteristik UMK yang berada di wilayah Kabupaten Bantul; b. pendataan dan pemuktahiran data karakteristik UMK dilakukan secara bertahap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; dan c. penyusunan peta tematik UMK, pembuatan Hak Cipta Peta Tematik, dan desiminasi informasi dalam website resmi.	24 Juni 2019	3 Tahun
53	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten Bantul	Nomor : 114/KTR/ VI-8/O619 Nomor :	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran sesuai daftar dari Kementerian	24 Juni 2019	30 hari

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Tentang Distribusi Kartu Indonesia Sehat Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahap III Dan Tahap IV Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul	20/PK/Bt /2019	Sosial.		
54	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor 21/PK/Bt/2019 Nomor : Perjama/ 11/ V1/ 201 9/ Poltekkes	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penelitian bagi dosen danlatau mahasiswa; b. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; dan c. pengembangan sumber daya manusia.	25 Juni 2019	5 Tahun
55	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor 22/PK/Bt/20t9 Nomor Perjama/ 10/VI 20119 / Poltekkes	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat yang disepakati PARA PIHAK.	25 Juni 2019	5 Tahun
56	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan CV Altar Ria Production Tentang Penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019	Nomor : 23/PK1Bt/2019 Nomor : 175/VII/ 19/ AR/YK,	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Penataan stand swasta dan Pedagang Kaki Lima; b. Pemanfaatan sarana prasarana	08 Juli 2019	21 Hari

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
			penunjang Bantul Expo 2019; dan c. Ketertiban, keamanan dan kebersihan Bantul Expo 2019.		
57	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Di Kabupaten Bantul	Nomor : 25/PK/Bt/2019 Nomor : 11/UST/Rek/MoU/ VII//2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; d. pengembangan sumber daya manusia; dan e. pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa.	08 Juli 2019	5 Tahun
58	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PD BPR Bank Bantul tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2019	Nomor : 26/PK/Bt/2019 Nomor : 581/161/BB.UM/VII/2019	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pelayanan penyaluran Dana Bantuan Sosial dari rekening RKUD kepada penerima Bantuan Sosial serta pembuatan buku rekening atas nama penerima Bantuan Sosial; dan b. pelayanan penarikan dana oleh penerima Dana Bantuan Sosial yaitu meliputi Desa Sabdodadi, Desa Tirtohargo, Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari dan Desa Poncosari.	12-07-2019	
59	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Distribusi Kartu Indonesia Sehat Bagi Peserta Penerima	Nomor : 125/KTR/ VI-8/0719 Nomor : 20/PK/Bt /2019	Ruang lingkup Pedanjian Kerja Sama ini adalah pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran sesuai daftar dari Kementerian Sosia	29 Juli 2019	30 Hari

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahap V Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul				
60	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Pembangunan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi Di Kabupaten Bantul	Nomor : 30/PK /Bt/2029 Nomor : 0142-A/BTS- KOMINFOBANTUL/VIII/2019	Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi: a. pemanfaatan MCP dan Jaringan FO sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1, 2 dan 3 dari Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini; dan b. dukungan pelaksanaan program Bantul Smart City PIHAK KESATU melalui CSR yang diberikan oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Bantul.	01 Agustus 2019	5 Tahun
61	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PD BPR Bank Bantul Tentang Penyaluran Dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran Tahun 2019	Nomor 31/PK/BT/2019 Nomor : 581/178/BB.UM/VIII/2019	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Pelayanan penerimaan transfer Dana Bantuan Sosial dari Rekening Kas Daerah kepada penerima Bantuan Sosial Serta pembuatan buku rekening atas nama penerima Bantun Sosial; dan b. Pelayanan penarikan dana oleh penerima Dana Bantuan Sosial meliputi: 1. Kecamatan Dlingo (Desa Dlingo, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo) 2. Kecamatan Pleret (Desa Wonokromo, Desa Segoroyoso, Desa Wonolelo) 3. Kecamatan Jetis (Desa Patalan)	05-08-2019	

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
			4. Kecamatan Pandak (Desa Wijirejo, Desa Triharjo, Desa Caturharjo) 5. Kecamatan Piyungan (Desa Sitimulyo, Desa Srimartani, Desa Srimulyo) 6. Kecamatan Kasihan (Desa Ngestiharjo, Desa Tirtonirmolo, Desa Bangunjiwo) 7. Kecamatan Sedayu (Desa Argomulyo, Desa Argosari, Desa Argodadi, Desa Argorejo) 8. Kecamatan Bambanglipuro (Desa Sidomulyo, Desa Mulyodadi, Desa Sumbermulyo) 9. Kecamatan Kretek (Desa Tirtosari, Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis) 10. Kecamatan Pundong (Desa Seloharjo, Desa Panjangrejo) 11. Kecamatan Sewon (Desa Pendowoharjo, Desa Bangunharjo, Desa Panggungharjo, Desa Timbulharjo) 12. Kecamatan Bantul (Desa Tirenggo, Desa Bantul, Desa Palbapang, Desa Sabdodadi, Desa Ringinharjo) 13. Kecamatan Srandakan (Desa Trimurti, Desa Poncosari) 14. Kecamatan Sanden (Desa Srigading)		
62	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Toko Pantes Bantul tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak	Nomor : 32/PK/Bt/2019 Nomor :	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh	22 Agustus 2019	3 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	(KIA) Kabupaten Bantul	028/PTS /VIII /2019	produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.		
63	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Balong Water Park tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 33/PK/Bt/2019 Nomor : 01/BWP/VIII /2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
64	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Rumah Makan Bale Ayu tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 34/PK/Bt/2019 Nomor : 02/PK/BAR/VIII /2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
65	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Apotek Indah Farma tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 35/PK/Bt/2019 Nomor : 03/IF.S.Kel/VIII /2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
66	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Toko Buku Social Agency Cabang Gabusan Bantul tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 36/PK/Bt/2019 Nomor : 01/VIII /SABE/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
67	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Grand Puri Waterpark tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak	Nomor : 37/PK/Bt/2019 Nomor : 002/PK-GPWP/VII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/	22 Agustus 2019	3 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	(KIA) Kabupaten Bantul		layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.		
68	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Rumah Makan Ingkung Jawa Waroeng Ndesso tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 38/PK/Bt/2019 Nomor : 006/II W.P.D/VII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
69	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Tirta Tamansari Water Park tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 3 9/PK/Bt/2019 Nomor : 02/TTS/VIII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
70	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Area Yogyakarta tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 40/PK/Bt/2019 Nomor : 041/A-YK/ASM/PKS/VIII/19	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
71	Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah Kabupaten Bantul dan swalayan dan toserba Purnama bantul tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 41/PK/Bt/2019 Nomor : 03/P3/KIA/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
72	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Galaxy Water Park tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak	Nomor : 42/PK/Bt/2019 Nomor : 002/SK-MNJ/6WP-08/VIII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/memanfaatkan/memperoleh produk/	22 Agustus 2019	3 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	(KIA) Kabupaten Bantul		layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.		
73	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Baby Zone tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 43/PK/Bt/2019 Nomor : 002/VIII/BABYZONE/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/ memanfaatkan/memperoleh produk/ layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
74	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Swalyan Toserba Agung tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 44/PK/Bt/2019 Nomor : 003/A603/VIII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/ memanfaatkan/memperoleh produk/ layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
75	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul tentang Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bantul	Nomor : 45/PK/Bt/2019 Nomor : 019/DJ 0406/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerbitan KIA dan pemberian keringanan fasilitas untuk mengakses/ memanfaatkan/memperoleh produk/ layanan yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi anak yang memiliki KIA.	22 Agustus 2019	3 Tahun
76	Perjanjian Kerja sama antara PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyaluran Bantuan <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> PT. Bank BPD DIY Tahun 2019 Berupa Taman Klodran Sisi Barat Untuk Pemerintah Kab. Bantul	Nomor : 023b/HM.0502 Nomor : 50/PK/Bt/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyaluran bantuan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Bank BPD DIY Tahun 2019 berupa Taman Klodran Sisi Barat untuk Pemerintah Kabupaten Bantul.	02 September 2019	1 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
77	Perjanjian Kerja sama antara PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istiewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyaluran Bantuan <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> PT. Bank BPD DIY Tahun 2019 Berupa Taman Adipura Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul	Nomor : 023b/HM.0502 Nomor : 51/PK/Bt/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyaluran bantuan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Bank BPD DIY Tahun 2019 berupa Taman Adipura untuk Pemerintah Kabupaten Bantul.	02 September 2019	1 Tahun
78	Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT Shanghiang Perkasa	Nomor : 53/PK/Bt/2019 Nomor : 2017 SHP-legal/PKS /XI/2019	Penyerahan 10.000 (Sepuluh ribu) keping KIA kepada anak usia dini se Kabupaten Bantul yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2019	23 September 2019	2 bulan
79	Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan	Nomor : 54 /PK/Bt/2019 Nomor : F11/128.A/H.1/IX/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. praktik klinik di dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah b. kerja dinas; c. praktik komunitas di wilayah Kabupaten Bantul; dan d. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.	23 September 2019	5 tahun
80	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Antara Digital Media tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik	Nomor : 56/PK/Bt/2019 Nomor : 085/PKS/ADM/2019	Ruang lingkup : a. Pemanfaatan lokasi untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan, keharmonisan berbangsa	03 Oktober 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
			<p>dan kedaulatan negara</p> <p>b. penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur sarana dan prasarana , aplikasi , data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat dari dan oleh PARA PIHAK, dan</p> <p>c. pemanfaatan media dalam ruang (TVC) dan media luar ruang (videorton) "o-media" untuk berita dan layanan informasi publik</p>		
81	Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan BPJS Cabang Yogyakarta	<p>Nomor : 57/PK/Bt/2019</p> <p>Nomor : 354/KTR/VI-8/2019</p>	Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada peserta penerima bantuan iuran sesuai daftar dari Kementerian Sosial	15 Oktober 2019	30 hari
82	Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta	<p>Nomor : 58/PK/Bt/2019</p> <p>nomor : 20/MoU/DIR/AMAYO/201</p>	<p>Ruang lingkup:</p> <p>a. Praktik non klinik di dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas</p> <p>b. Praktik komunitas di wilayah kabupaten bantul dan</p> <p>c. Bidang bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja dinas</p>	17 Oktober 2019	5 tahun
83	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Institut Sains Dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta tentang Penerapan Teknologi Informaasi	<p>Nomor : 60/PK/Bt/2019</p> <p>Nomor : 003/MoU/Rek/X/2019</p>	<p>Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:</p> <p>a. pembuatan dan Pemanfaatan TIK untuk mendukung kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. pelatihan dan/atau pendampingan</p>	21 Oktober 2019	5 tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Dan Komunikasi Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul		Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam hal pemanfaatan TIK; dan c. pendampingan pemanfaatan sistem informasi marketplace.		
84	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 61/PK/Bt/2019 Nomor : 026/MoU/SMY/X/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas	21 Oktober 2019	5 Tahun
85	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Radjawali Indonesia Penyelenggaraan Promosi Pasar Melalui Kegiatan Latihan Dan Lomba Burung Berkicau	Nomor : 64/Pk/Bt/2019 Nomor : 06/II/PK/DPD-Jogja/Bt/2019	Runag lingkup: a. Pemanfaatan area terbuka masyarakat b. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung promosi pasar desa c. ketertiban, keamanan dan kebersihan pelaksanaan kegiatan promosi pasar	29 Oktober 2019	3 Tahun
86	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Universitas Kristen Duta Wacana Indonesia tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 65/Pk/Bt/2019 Nomor : 060/E.03/BIROIV/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu	30 Oktober 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
87	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Nomor : 66/Pk/Bt/2019 Nomor : 031/OM 0004	<p>pelayanan kesehatan diwilayah kerja Dinas</p> <p>Ruang lingkup:</p> <p>a. Penggunaan perangkat sistem online dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan alat antara lain berupa Printer Date Capture, Server Data dan Capture Online cash Register 2. Penghentian atau pencabutan alat 3. Perubahan dan atau pemindahan alat 4. Penggantian alat dan 5. Sosialisasi <p>b. Koordinasi pelaksanaan optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan para pihak</p>	01 Nopember 2019	3 Tahun
88	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penumbuhan dan Penguatan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Bantul	Nomor : 67/PK/Bt/2019 Nomor : 031A/KR1006	<p>Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:</p> <p>a. sosialisasi produk dan jasa bank yang dapat digunakan oleh pelaku Usaha Pekerja Mandiri yang mempunyai usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;</p> <p>b. analisa dan pendampingan kepada pekerja mandiri yang mempunyai usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang memperoleh fasilitas permodalan PIHAK KEDUA.</p>	04-11-2019	5 Tahun
89	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan	Nomor :	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Pelatihan dan Ujian	05-11-2019	2 bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pelaksanaan Pelatihan dan Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	68/PK/Bt/2019 Nomor : T/5991/UN37.3.1/KS/2019	Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Presiden 16 tahun 2018		
90	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta tentang Distribusi Kartu Indonesia Sehat Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahap VII Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul	Nomor : 538/KTR/VI-8/1119 Nomor : 69/PK/Bt/2019	Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada peserta penerima bantuan iuran sesuai daftar dari Kementerian Sosial	11 Nopember 2019	30 Hari
91	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Akademi Keperawatan YKY tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 70/Pk/Bt/2019 Nomor : 1002/25/AKPERYKY/XII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas	13 Desember 2019	5 Tahun
92	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan	Nomor :	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:	13 Desember 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Akademi Keperawatan YKY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan YKY Di Kabupaten Bantul	71/PK/Bt/2019 Nomor : 1001/25/AKPERYKY/XII/2019	a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; d. pengembangan sumber daya manusia; dan e. pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa.		
93	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor : 72/PK/Bt/2019 Nomor : 52/AFI-YO/MoU/XII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; d. pengembangan sumber daya manusia; dan e. pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa.	16 Desember 2019	5 Tahun
94	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 73/PK/Bt/2019 Nomor : 53/AFI-YO/MoU/XII/2019	Ruang lingkup meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas	16 Desember 2019	5 Tahun
95	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Negara Indonesia Cabang	Nomor : 174/PK/Bt/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	(Persero) Tbk Cabang Yogyakarta tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 74/PK/Bt/2019			
96	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 033/DJ0403 Nomor : 75/PK/Bt/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
97	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bantul tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : B.3284-VII/KC/II/2019 Nomor : 76/PK/Bt/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
98	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 77/PK/BT/2019 Nomor : 139/BTN/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
99	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Bukopin Tbk Kantor Cabang Yogyakarta tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul	Nomor : 78/PK/BT/2019 Nomor : 232-PKS/YGY-BM/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Dalam Bentuk Deposito				
100	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 79/PK/BT/2019 Nomor : R.07.Ar.YOG/2428/ 019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
101	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Mandiri Taspen tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 80/PK/BT/2019 Nomor : DIR.PKS/041/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
102	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 81/PK/BT/2019 Nomor : 059/BMI-BTL/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
103	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito	Nomor : 82/PK/BT/2019 Nomor : 93/PKS-KC.YGY/BWSI-PEMKAB.BTL/XII/2019	Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito	18 Desember 2019	12 Bulan
104	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta tentang	Nomor : 83/PK/Bt/2019 Nomor : 602/PKS/AAKM/XII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pendidikan; b. penelitian;	19 Desember 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Akademi Analis Manggala Yogyakarta Di Kabupaten Bantul		c. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; d. pengembangan sumber daya manusia; dan e. pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa.		
105	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 84/Pk/Bt/2019 Nomor : 603/PKs/AAK.M/XII/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas	19 Desember 2019	5 Tahun
106	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor : 85/PK/Bt/2019 Nomor : HK.03.01/5.11/8251/2019	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; d. pengembangan sumber daya manusia; dan e. pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa	19 Desember 2019	5 Tahun
107	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta tentang	Nomor : 86/PK/Bt/2019 Nomor : HK.03.01/5.11/8250/2019	Ruang lingkup meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang	19 Desember 2019	5 Tahun

No	Judul Dokumen	Nomor Dokumen	Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama	Tanggal Dokumen	Jangka Waktu
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul		berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; dan c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas		
108	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta Di Kabupaten Bantul	Nomor : 87/PK/Bt/2019 Nomor : 010/A.12/Dir/PI/XII/2019	Ruang lingkup meliputi: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan/atau mahasiswa; d. pengembangan sumber daya manusia; dan e. pengembangan budaya nasional dan ajaran luhur Tamansiswa	19 Desember 2019	5 Tahun
109	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Di Kabupaten Bantul	Nomor : 88/PK/Bt/2019 Nomor : 011/A.12/Dir/PI/XII/2019	Ruang lingkup meliputi : a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua Puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas; b. praktik komunitas di Kabupaten Bantul; c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas	19 Desember 2019	5 Tahun

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2019

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

1. Forum Koordinasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan di dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil dan daya guna yang sebesar-besarnya. Selain itu, penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dengan instansi vertikal dilaksanakan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan adalah forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

2. Materi Koordinasi

Materi koordinasi yang dibahas didalam forum koordinasi antara lain sebagai berikut:

- a) Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian nasional
- b) Evaluasi *long weekend*
- c) Persiapan memasuki bulan Ramadhan
- d) Permasalahan bentrok antar suporter sepakbola
- e) Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satber Saber Pungli)
- f) Penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bantul
- g) Penataan tanda nama kendaraan bermotor perorangan dan dinas jabatan
- h) Pelaksanaan Program Persertifikatan PRONA atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- i) Persiapan liburan Natal dan Tahun Baru

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi yang terlibat dalam forum koordinasi antara lain adalah:

- a) Bupati Bantul
- b) Wakil Bupati Bantul
- c) Komandan Kodim 0729 Bantul
- d) Kepala Kepolisian Resort Bantul
- e) Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
- f) Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- g) Ketua DPRD Kabupaten Bantul
- h) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
- i) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul
- j) Kepala kantor Pelayanan Pajak
- k) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- l) Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul
- m) Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul
- n) Kepala Kecamatan se-Kabupaten Bantul

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul terselenggara melalui dukungan dana APBD sebesar Rp.461.500.000,00 dengan jumlah serapan sebesar Rp.459.183.000,00 atau sebesar 99,50%.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten yang melaksanakan urusan tugas umum pemerintahan terkait koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 11 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 6.59**.

Tabel 6.59. Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan,, Sekretariat Daerah Kabupaten

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
1	-	4	1	3	3	-	12	1	4	5	2	12

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2019

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebanyak 12 (dua belas) kali.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Forum koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat menjadi media bagi pemerintah daerah didalam mensosialisasikan kebijakan daerah, menggali informasi terkini terkait penyelenggaraan kegiatan oleh instansi vertikal di Kabupaten Bantul, musyawarah didalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selain itu, melalui forum koordinasi ini diharapkan mampu menggali potensi-potensi kerjasama yang dapat dibangun demi kemajuan bersama.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Hasil koordinasi dengan instansi vertikal yang terlaksana oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ditindak lanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi melibatkan perangkat daerah terkait untuk kemudian dilakukan perumusan kebijakan.

10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Koordinasi yang dilaksanakan tidaklah selalu berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan terutama didalam penentuan jadwal pelaksanaan koordinasi. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilaksanakan mengharuskan untuk dihadiri oleh pimpinan instansi yang notabene memiliki banyak kesibukan lain. Solusi yang telah dilaksanakan sejauh ini adalah selalu aktif berkoordinasi untuk penyesuaian jadwal dengan instansi vertikal yang akan diundang.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pemerintah daerah memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dapat diartikan bahwa perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu pemerintahan. Perbatasan pada Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Perbatasan wilayah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik dan hukum yang berlaku.

Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu hal yang memerlukan perhatian khusus didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kawasan perbatasan seringkali memunculkan konflik kepentingan yang pelik untuk diselesaikan terutama pada kawasan yang strategis sehingga penentuan batas wilayah menjadi suatu hal yang sangat krusial. Secara umum, beberapa isu yang muncul didalam pengelolaan wilayah perbatasan antara lain:

- a. Masalah penetapan garis batas (alokasi, *delimitasi*, dan demarkasi), baik darat (demarkasi) maupun laut (*delimitasi*);
- b. Masalah pengamanan kawasan perbatasan;
- c. Masalah pengembangan kawasan perbatasan (administrasi);
- d. Masalah pemanfaatan sumberdaya alam.

Penegasan batas wilayah di Kabupaten Bantul memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di sisi utara. Di sisi barat Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo. Di sisi Timur Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan melalui koordinasi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dan Pemerintah Daerah DIY.

Penegasan batas wilayah di Kabupaten Bantul telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Berikut adalah peraturan perundangan penetapan batas wilayah Kabupaten Bantul:

- a. Permendagri Nomor 70 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo;
- b. Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul;
- c. Permendagri Nomor 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta;
- d. Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman.

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

Penegasan batas wilayah merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan terjadinya konflik atau permasalahan batas. Walaupun penegasan batas wilayah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten yang

berbatasan telah ditetapkan dalam permendagri, namun masih ditemukan adanya permasalahan batas pada tahun 2019. Permasalahan yang muncul adalah masalah yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya, yakni permasalahan perbatasan antara Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dengan Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul.

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

Permasalahan batas antara Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dengan Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul muncul pada saat dilaksanakan kegiatan FGD Penegasan Batas Desa Secara Kartometris oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY di Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Pada saat FGD tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak hingga dilakukan beberapa FGD lanjutan dan beberapa kali cek lapangan. Melalui penelusuran dokumen Pemasangan Pilar Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Gunungkidul, dokumen Peta Desa Lama Desa Parangtritis maupun Desa Girijati, dan penelusuran sejarah pemasangan pilar serta diikuti dengan cek lapangan, diketahui bahwa terdapat fisik pilar PBA 001A di lapangan yang belum masuk kedalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan perapatan pilar dan penegasan batas berikut dengan pengukuran geodetik pada koridor batas Desa Parangtritis dan Desa Girijati, namun permasalahan yang muncul di tahun 2018 dan belum terselesaikan, menjadi hambatan dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Hingga pada akhir tahun 2019, permasalahan tersebut dapat terselesaikan setelah dilakukan beberapa kali koordinasi yang sifatnya penyelesaian lingkup internal sebelum permasalahan ini dibawa ke tingkat lebih lanjut. Koordinasi tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul dengan melibatkan beberapa perangkat daerah seperti Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DIY, BPN Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Bappeda Kabupaten Bantul serta otoritas kewilayahan di Kabupaten Bantul yang terkait dengan sengketa (Kecamatan Kretek dan Desa Parangtritis) serta melibatkan tenaga ahli perbatasan yang selama ini telah lama terlibat dan memahami historis batas wilayah di Kabupaten Bantul dan DIY.
 2. Koordinasi tindak lanjut hasil kesepakatan pada koordinasi lintas sektor terdahulu. Koordinasi ini dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan Desa Parangtritis sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada koordinasi pertama tidak dihadiri oleh Lurah Desa Parangtritis dan hanya mewakilkan sehingga yang bersangkutan tidak bisa memberi keputusan. Pada koordinasi yang kedua, setelah melalui diskusi berdasarkan data, peraturan perundangan terkait dengan penegasan batas, serta teknis penegasan batas, akhirnya diperoleh kesepakatan dan kesepahaman hingga akhirnya Desa Parangtritis mengakui dan menyetujui hasil dari kegiatan penegasan batas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bagian Administrasi Pemerintahan maupun Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Pertanahan dan Ruang DIY.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten yang melaksanakan urusan tugas umum pemerintahan terkait dengan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 12 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat Tabel 6.60. Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan,, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul **Tabel 6.60**.

Tabel 6.60. Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Bagian Administrasi Pemerintahan,, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
1	-	4	1	3	3	-	12	1	4	5	2	12

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2019

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Wilayah kabupaten Bantul secara geografis, hidrologis dan klimatologis memungkinkan terjadi berbagai ancaman atau bencana. Kondisi alam seperti ini menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Secara administratif Kabupaten Bantul meliputi 17 kecamatan yang terdiri dari 75 desa. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana baik yang berasal dari ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor dan angin puting beliung. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana.

Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada **Tabel 6.61**.

Tabel 6.61. Kejadian dan Lokasi Bencana tahun 2019

NO	KECAMATAN	Tanah Longsor	Angin Kencang	Kebakaran	Gelombang Pasang	Laka Sumur Dahan	Patah Pohon	Tumbang Rumah	Roboh Laka Laut	Banjir	Kerja	Tanah Amblias	Gempa yg dirasakan di DIY		
		Dampak (Titik)												Jumlah Kejadian	laka Sungai
1	Bantul	0	27	Januari = 9	18	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
2	Banguntapan	0	144	Februari =	23	1	1	0	0	1	9	1	0	0	0
3	Piyungan	9	10	2	11	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0
4	Srandakan	0	7	Maret 2	1	0	0	1	0	0	3	0	5	0	0
5	Sanden	0	14	April = 3	9	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0
6	Kretek	0	1	Mei = 0	4	0	0	1	0	0	10	0	10	0	0
7	Pun#Dong	2	8	Juni = 0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Jetis	1	19	Juli = 0	15	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0
9	Sewon	0	16	Agustus =	15	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
10	Kasih	0	27	0	21	0	2	0	0	0	17	1	0	0	1
11	Dlingo	4	5	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pajangan	0	11	= 0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
13	Pandak	0	8	Oktober =	5	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
14	Sedayu	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pleret	4	27	November	11	0	1	0	0	0	10	1	0	0	1
16	Imogiri	2	26	= 0	36	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
17	Bambanglipuro	0	19	Desember	12	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1

NO	KECAMATAN	Tanah Longsor Dampak (Titik)	Angin Ken cang Kejadian	Kebakaran laka Sungai	Erosi	Abrasi & Gelombang Pasang	Laka Sumur Dahan	Patah Pohon	Tumbang Rumah Roboh Laka Laut	Banjir	Kerja	Tanah Amblas	Gempa yg dirasakan di DIY			
			= 5													
JUMLAH		23	22	208	4	8	3	1	3	80	5	16	0	1	3	97
Total								474								

Sumber: BPBD, 2019

Upaya pencegahan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

- Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;
- Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;
- Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten//Kota)

Bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2017 seperti tersaji pada **Tabel 6.61** merupakan kejadian kebencanaan dengan status lokal.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran dari penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana bersumber dari APBD dengan dukungan dana

sebesar Rp.5.424.298.200,00.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a) Prabencana (meliputi kegiatan preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan), yaitu:
 - 1). Pengadaan peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran (PBK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - 2). Pengadaan peta ancaman dan peta resiko bencana;
 - 3). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4). Pengadaan *Early Warning System*(EWS) tsunami;
 - 5). Pos piket TRC dan perlengkapan piket;
 - 6). Pendidikan dan pelatihan tanggap darurat;
 - 7). Peningkatan ketrampilan dan kualitas Penanggulangan Bencana (PB)dalam bentuk sosialisasi, pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;
 - 8). Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana;
 - 9). Pengembangan desa siaga bencana;
 - 10). Pembuatan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD);
 - 11). Penyusunan rencana operasikedaruratan;
 - 12). Fasilitasi Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) berada di setiap desa di wilayah kabupaten bantul;
 - 13). Gladi posko dan gladi lapang;
 - 14). Bimtek SAR latihan gabunganpenyelamatan, Evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - 15). Pelatihan Pusat Kendali Operasi (Pusdalops);

- 16). Fasilitasi dalam penyaluran bantuan bencana dan korban bencana;
 - 17). Fasilitasi dan koordinasi teknis PB;
- b) Saat bencana, kegiatan yang dilaksanakan yaitu tanggap darurat yang menitikberatkan pada upaya pengerahan seluruh potensi penanggulangan bencana alam guna mencari, menolong, dan menyelamatkan korban bencana serta melakukan *assessment/* kaji cepat sebagai acuan dalam memberikan pelayanan bantuan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinir.
- c) Pasca bencana, kegiatan yang dilaksanakan mencakup rehabilitasi fisik, sosial, dan pemberdayaan. Rehabilitasi fisik dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan fisik (seperti tempat tinggal). Rehabilitasi sosial dititikberatkan pada upaya pemulihan kembali kondisi korban seperti semula atau lebih baik lagi dibanding sebelum bencana. Langkah pemberdayaan dititikberatkan pada upaya peningkatan kemampuan atau keterampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif (*livelihood*) sehingga fungsi ekonomi keluarga korban dapat dipulihkan kembali.

Untuk mengetahui kecenderungan perkembangan kejadian bencana selama lima tahun terakhir, maka dilakukan analisis kecenderungan yang didapatkan dari perubahan jumlah kejadian dalam kurun waktu tersebut. Kejadian bencana tersebut merupakan catatan kejadian yang ada di daerah dan nasional. Selain itu juga dilakukan analisis kecenderungan kejadian untuk potensi bahaya lainnya di daerah tersebut.

Kecenderungan kejadian dari jumlah kejadian dengan tahun kejadian dalam rentang waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 6.62.**

Tabel 6.62. Tren kejadian bencana Tahun 2013 - 2018

No.	Jenis Bahaya	Kecenderungan Kejadian		
		Meningkat	Tetap	Menurun
1	Banjir			V
2	Cuaca ekstrim			V
3	Tanah longsor			V
4	Abrasi/Erosi			V
5	Kekeringan		V	
6	Kebakaran	V		
7	Laka Laut			V
8	Gempa Bumi	V		

Sumber: BPBD, 2019

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

OPD yang menanganai pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD BPBD berjumlah 32 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SMP hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 6.63**.

Tabel 6.63. Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
5	4	8	3	7	5	-	32	4	6	16	6	32

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2019

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

BPBD merupakan kelembagaan khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010. BPBD memiliki 2 (dua) fungsi utama yakni (1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta (2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu, ketugasan dari BPBD antara lain :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang pada masa tanggap darurat;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan, lihat **Tabel 6.64**.

Tabel 6.64. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

NO	JENIS BENCANA	KAWASAN RAWAN BENCANA
1	Gempa bumi	Seluruh kecamatan
2	Tanah longsor	Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong
3	Banjir	Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret
4	Gelombang pasang	Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak (sebagian), Pundong (sebagian), Imogiri (sebagian), Jetis (sebagian), Bambaglipuro (sebagian)
5	Kekeringan	Dlingo, Piyungan (sebagian), Pajangan (sebagian), Pleret (sebagian), Imogiri (sebagian), Pundong (sebagian), Sedayu (sebagian), Kasihan (sebagian), Kretek (sebagian)

Sumber: Bappeda, 2019

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan khusus merupakan kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan strategis di Kabupaten Bantul meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); kawasan strategis Bantul Kota Mandiri (BKM); kawasan strategis pantai Selatan; kawasan strategis industri Sedayu dan Piyungan; kawasan strategis desa wisata dan kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem); dan kawasan strategis gumpul pasir Parangtritis. Untuk mewujudkan kawasan strategis tersebut dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai upaya percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan. Langkah yang ditempuh di antaranya melalui peningkatan infrastruktur kawasan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan lahan.

1. Jenis Kawasan Khusus

a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)

Kawasan Perkotaan Yogyakarta telah ditetapkan sebagai salah satu bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki fungsi pelayanan yang mempunyai pengaruh penting secara nasional. Hal ini ditandai dengan perkembangan kegiatan sektor perdagangan, jasa, perumahan, hotel, dan restoran yang mendominasi kawasan tersebut.

Dampak perkembangan tersebut adalah berkurangnya daya tampung ruang kawasan sehingga memerlukan dukungan perencanaan, penataan, dan penanganan sarana dan prasarana yang memadai.

Perencanaan, penataan, dan penanganan yang telah dilaksanakan di kawasan ini antara lain sebagai berikut:

1). Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Alokasi anggaran pada tahun 2019 untuk Rusunawa sebesar Rp3.104.163.500,00 meliputi:

- Pembayaran rekening air;
- Pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Pembayaran sewa tanah desa Banguntapan dan Tamanan;
- Pembayaran dua unit pos Satpam;
- Pembangunan landscape;
- Pembangunan tempat parkir.

2). Penanganan Sanitasi dan Air Minum Perkotaan

Pembangunan Sambungan Rumah (SR) air limbah sudah menjadi komitmen Kabupaten Bantul dalam program *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP), yaitu tercapainya 6.000 SR serta mendukung target *universal access* sanitasi layak 100% pada tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemasangan sambungan rumah air limbah sebanyak 236 SR di Kecamatan Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Sampai dengan akhir pelaksanaan program pada tahun 2017, telah tersambung 4.174 SR di wilayah tersebut, sehingga target capaian masih kurang 1.826 SR. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, dilakukan pembangunan IPAL komunal melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kecamatan Kasihan, Sewon, dan Banguntapan.

Program penyediaan air minum untuk meningkatkan cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) non perpipaan, dilaksanakan di Desa Banguntapan dan Desa Wirokerten

(Kecamatan Banguntapan) dan Desa Tamantirto (Kecamatan Kasihan). Sementara itu cakupan penyediaan air minum melalui perpipaan PDAM dilaksanakan melalui program hibah air minum APBN.

b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM)

Kawasan BKM yang memiliki luas lebih kurang 1.300 ha yang mencakup Desa Sendangsari, Desa Triwidadi, dan Desa Guwosari di Kecamatan Pajangan dan Desa Bangunjiwo di Kecamatan Kasihan, direncanakan sebagai kawasan yang dapat mewadahi berbagai kegiatan seperti permukiman, pendidikan, perdagangan jasa, olah raga dan rekreasi, perkantoran, dan aneka industri.

Upaya untuk mewujudkan kawasan BKM di antaranya adalah pengembangan kawasan perumahan dan industri yang diharapkan dapat mendukung perkembangan daerah di sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan BKM pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan perumahan diarahkan ke kawasan BKM sebagai tindak lanjut SE Bupati tentang pengendalian perumahan di lima kecamatan (Kasihan, Sewon, Banguntapan, Bantul, dan Pleret);
- Pemasangan sambungan rumah air minum;
- Peningkatan jalan Jambean-Butuh;
- Peningkatan jalan Beji-Kalirandu;
- Peningkatan jalan Pedes-Metes.

c. Kawasan Strategis Pantai Selatan

Perubahan paradigma pembangunan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana visi Gubernur DIY, khususnya keinginan wilayah selatan DIY sebagai halaman muka, memiliki

pengaruh yang besar terhadap pengembangan wilayah pesisir selatan Kabupaten Bantul. Pengembangan wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian sehingga mampu memberikan kontribusi PDRB yang besar bagi Kabupaten Bantul.

Perencanaan yang telah dilakukan di kawasan ini antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan jalan Sapuangin-Sanden;
- Peningkatan jalan Panggang-Paker;
- Peningkatan jalan Kranggan-Patehan.

d. Kawasan Strategis Industri Piyungan dan Sedayu

Penetapan kawasan industri Piyungan dan industri Sedayu sebagai kawasan strategis di wilayah Kabupaten Bantul akan berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian (taraf hidup) baik bagi masyarakat pada kawasan setempat maupun bagi fisik dan perekonomian wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan industri Piyungan terdapat di Desa Srimulyo dan Desa Sitimulyo, menampung kegiatan industri yang berskala menengah dan besar yang cenderung berpolutan tinggi. Kawasan industri Piyungan telah *dilaunching* oleh Gubernur DIY pada bulan Desember 2015. Sementara kawasan industri Sedayu terdapat di Desa Argosari, Desa Argomulyo, Desa Argorejo, dan Desa Argodadi, mampu menampung kegiatan industri yang berskala menengah dan besar dengan tingkat polutan rendah.

Kegiatan yang menunjang perencanaan dan pengembangan kawasan tersebut yaitu:

- Pengadaan tanah untuk akses jalan menuju Kawasan Industri Piyungan Zona 4;
- Peningkatan jalan Ngelo-Bintaran;

- Peningkatan jalan Petir-Karangpucung.

e. Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem)

Kawasan strategis sosio-kultural yaitu wilayah Desa Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) memiliki potensi budaya, kerajinan tangan, dan kerajinan cinderamata (*handicraft*). Tidak hanya produknya saja, melainkan proses pembuatannya juga menarik wisatawan untuk turut secara interaktif.

Perencanaan dan penataan yang telah dilakukan di kawasan ini antara lain:

- Penyusunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Songgo Negoro (Kasih, Sewon, Banguntapan) khusus yang di Sewon Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya;
- Peningkatan jalan Kalangan-Jipangan.

f. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk pasir di pesisir selatan Pulau Jawa yang terdapat di Kabupaten Bantul memiliki karakteristik unik dan langka di dunia. Gumuk pasir tersebut merupakan gumuk pasir tipe *barchan* dan satu-satunya di Asia. Kerusakan terhadap gumuk pasir akan mengubah ekosistem secara nyata yang berakibat besarnya kerusakan ekologis dan mengganggu keseimbangan ekologi. Potensi karakteristik yang unik dapat dikembangkan selain untuk daya tarik wisata juga merupakan wisata pendidikan.

Pengembangan kawasan strategis gumuk pasir di Parangtritis, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka

konservasi alam gumuk pasir, yaitu pelarangan pemanfaatan kawasan gumuk pasir untuk kegiatan lain selain konservasi, laboratorium alam, penelitian, dan kegiatan yang menunjang pelestarian keberadaan kawasan, dan pariwisata serta pengembangan Laboratorium Alam Geospasial bekerjasama antara BIG, UGM, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tahun 2015 Laboratorium Alam Geospasial telah ditransformasi menjadi Parangtritis *Geomaritime Science Park* (PGSP). Pengembangan kawasan gumuk pasir dibagi menjadi tiga zona yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona pengembangan terbatas. Zona inti seluas lebih kurang 140 hektar merupakan kawasan lindung yang sudah ditetapkan batas-batasnya.

Kawasan lahan pasir pantai selatan di luar kawasan inti gumuk pasir dapat dipergunakan untuk kegiatan pertanian lahan pasir dan kegiatan lain sebatas memenuhi aturan sempadan pantai dan kaidah-kaidah konservasi lahan pantai. Perencanaan dan penataan telah dilakukan di kawasan ini sebagai berikut:

- Penyusunan DED Kawasan Depok;
- Penyusunan DED Kawasan Pengklik;
- Pembangunan Sarana Pendukung Pariwisata di Kawasan Parangtritis.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya

Status kawasan khusus yang ada di Kabupaten Bantul seluruhnya merupakan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kawasan khusus ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 -2030.

3. Sumber Anggaran

Dalam rangka untuk pengembangan dan pembangunan kawasan khusus di Kabupaten Bantul diupayakan dari berbagai sumber, baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun pihak swasta.

4. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus disajikan pada **Tabel 6.65**.

Tabel 6.65. Permasalahan dan Solusi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Khusus

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan	Penanganan kawasan permukiman kumuh perlu kolaborasi dengan berbagai sektor
2	Keterbatasan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak huni	Sinkronisasi penanganan rumah tidak layak huni dengan data miskin
3	Pemakaman umum belum bisa digunakan karena belum ada peraturan pengelolaannya	Penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan pemakaman umum

Sumber: DPUPKP, 2019

5. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Menangani Kawasan Khusus

OPD yang menangani kawasan khusus di Kabupaten Bantul adalah DPUPKP.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD DPUPKP berjumlah 119 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SMP hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 6.63**.

Tabel 6.66. Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan di DPUPKP Kabupaten Bantul

SD	SMP	Jenis Pendidikan					Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
6	11	66	3	22	11	-	119	6	48	54	11	119

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya)

Pada tahun 2019, di Kabupaten Bantul tidak didapatkan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, organisasi perangkat daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keseluruhan jumlah pegawai pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 49 orang. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SMP hingga S2. Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, lihat **Tabel 6.67**.

Tabel 6.67. Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pagkat dan Golongan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

SD	SMP	Jenis Pendidikan					Jml	Gol				Jml
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
1	3	26	0	14	4	-	48	-	12	32	4	48

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2019

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dilaksanakan penanganan ketentraman dan ketertiban melalui beberapa program dan kegiatan yang melibatkan beberapa instansi terkait dan komponen masyarakat. Sasaran dan Indikator kinerja dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

a. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2019 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban di kawasan maraknya PKL maupun reklame. Pada tahun 2019, Satpol PP Kabupaten Bantul telah melaksanakan penertiban yustisi dan non yustisi sebanyak 120 kali. Adapun jumlah aduan yang masuk sebanyak 66.

Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban Anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidangan. Dengan demikian persentase penyelesaian pelanggaran K3 tercapai 100%.

Indikator sasaran ini adalah persentase penyelesaian pelanggaran K3, capaian kinerja untuk IKU adalah persentase penyelesaian pelanggaran K3. Sat Pol PP Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 100% dan realisasinya sebesar 100%, dengan kata lain tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018. Hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Sat Pol PP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran K3. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

- 1). Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan indikator rasio Linmas dengan RT, dengan capaian 95,3% dari target 96%.
- 2). Peningkatan ketertiban dan keamanan, dengan indikator kinerja program ini adalah cakupan kawasan tertib dengan target capaian sampai tahun 2019 adalah 14 kawasan. Target ini tercapai 100%, dengan kawasan sebagai berikut:

- Gose – Bejen
- Bejen – Kweden
- Gose – Klodran
- Gose – Jetak
- Klodran – Jonggrangan
- Klodran – Manding
- Manding – Bakulan
- Klodran – Kasongan
- Palbapang – Gilangharjo
- Sidomulyo – Mulyodadi
- Mulyodadi – Srigading
- Gilangharjo – Sumbermulyo
- Sepanjang Jalan Wahidin Sudiro Husodo
- Depan Pasar Imogiri Baru.

b. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2019, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria Sangat Tinggi. Hal tersebut ditandai dengan terlewatnya target IKU tahun 2019. Dari jumlah sasaran sebanyak 641, sebanyak 124 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti 498, tidak memenuhi panggilan 15 orang dan tidak ditemukan barang bukti sebanyak empat orang. Dari angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang ditindak dibagi jumlah sasaran kali 100% maka capaian persentase penegakkan Perda adalah sebesar 77,7%. Sementara target capaian untuk tahun 2019 adalah 60%.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat, Sat Pol PP Kabupaten Bantul sering

bekerjasama dengan instansi TNI dan Polri. Pada tahun 2019, operasi gabungan yang telah dilaksanakan sebanyak 15 kali dengan sasaran penertiban penjualan miras, PSK, reklame, dan karaoke.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun anggaran 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul memperoleh anggaran APBD sebesar Rp.5.070.161.568,00 yang merupakan belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Program-program tersebut adalah pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, peningkatan ketertiban dan keamanan, serta penegakan Perda.

BAB VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

7.1. Urusan Pendidikan

7.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 7.68. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator pada Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 – 6 th dalam PAUD yang mendapat layanan
Pendidikan dasar (SD)	Jumlah anak usia 7 – 12 th dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan
Pendidikan dasar (SMP)	Jumlah anak usia 12 – 15 th dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 – 18 th dalam Pendidikan kesetaraan yang mendapat layanan

Sumber: Dikpora, 2019

7.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan seperti tersaji pada Tabel 7.69.

Tabel 7.69. Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Indikator	Target	
	Jumlah	%
Jumlah anak usia 5 – 6 th dalam PAUD yang mendapat layanan	27.060	100
Jumlah anak usia 7 – 12 th dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	81.294	100
Jumlah anak usia 12 – 15 th dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	39.578	100
Jumlah anak usia 7 – 18 th dalam Pendidikan kesetaraan yang mendapat layanan	1.373	100

Sumber: Dikpora, 2019

7.1.3. Realisasi

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.70. Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan

Indikator	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Jumlah anak usia 5 – 6 th dalam PAUD yang mendapat layanan	27.060	27.060	100
Jumlah anak usia 7 – 12 th dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	81.294	81.294	100
Jumlah anak usia 12 – 15 th dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	39.578	39.578	100
Jumlah anak usia 7 – 18 th dalam Pendidikan kesetaraan yang mendapat layanan	1.373	1.373	100

Sumber: Dikpora, 2019

7.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 7.71. Alokasi dan realisasi anggaran pemenuhan SPM bidang Pendidikan

Program/Kegiatan 2019	Anggaran 2019	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,742,417,500	2,605,731,994	95
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	141,931,817,572	131,126,397,039	92
Program Pendidikan Non Formal	1,481,470,000	1,378,745,800	93

Sumber: Dikpora, 2019

7.1.5. Dukungan Personil

OPD pelaksana pada pemenuhan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Keseluruhan jumlah personil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 4453 personil. Sedangkan personil yang terlibat dalam penyelenggaraan pemenuhan spm bidang pendidikan berjumlah 4442 personil. Kualifikasi pendidikan tercatat bervariasi dari SD hingga S3 dengan kualifikasi pendidikan terbanyak adalah DIV/S1 sebanyak 3371 dan paling sedikit SD sebanyak 1 personil (**Tabel 7.72**). Pangkat dan golongan juga bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, dengan jumlah terbanyak adalah golongan IV sebesar 2306 personil dan paling sedikit golongan I sebesar 21 personil. Selain itu jabatan fungsional mendominasi personil dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan, yakni sebesar 3800 personil, lihat **Tabel 7.73**.

Tabel 7.72. Dukungan personil berdasarkan kualifikasi pendidikan pada pemenuhan SPM bidang pendidikan

Σ Peg	Kualifikasi Pendidikan								
	SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S1	S2	S3
4442	1	32	433	15	300	102	3371	186	2

Sumber: Dikpora, 2019

Tabel 7.73. Golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional yang mendukung pemenuhan SPM bidang pendidikan

Golongan				Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional									
I	II	III	IV	Eselon						Jabatan			
				II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Sekdes	CPNS
21	191	1924	2306	0	1	1	4	15	0	278	3800	0	343

Sumber: Dikpora, 2019

7.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. Permasalahan

Implementasi pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten Bantul dalam menemui beberapa masalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan Anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul baik itu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta rencana penghapusan Bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Kepala Sekolah dan Komite Sekolah kurang memahami kewajiban untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar yang harus

dilakukan oleh semua satuan pendidikan sehingga masih ada sekolah yang lebih mengutamakan kebutuhan yang lain daripada memenuhi SPM Pendidikan Dasar.

- 3) Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penentuan kriteria penerima bantuan baik itu bantuan DAK atau bantuan lainnya yang tidak sinkron dengan kebijakan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar, misalnya bantuan dari Pemerintah Pusat dapat diberikan bagi sekolah-sekolah yang mempunyai siswa yang besar padahal masih ada sekolah kecil yang belum memenuhi SPM Pendidikan Dasar.
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Alam/lahan untuk pembangunan ruang kelas baru, ruang kepala sekolah/madrasah, ruang guru serta ruang laboratorium bagi satuan pendidikan swasta.
- 5) Belum semua lembaga penyelenggara pendidikan memahami secara detail tentang kewajiban pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan.
- 6) Belum adanya reward dan punishment dari Pemerintah Kabupaten Bantul/Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul untuk sekolah yang sudah memenuhi dan belum memenuhi SPM Pendidikan Dasar.
- 7) Belum terjalinnya komunikasi yang baik Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan sekolah di sekitarnya.

b. Solusi

Masalah yang ada dalam pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Bantul dapat diatasi dengan mengoptimalkan potensi yang ada melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun prioritas pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber anggaran yang ada dan mengutamakan tingkat urgensi untuk masing-masing indikator SPM Pendidikan Dasar.

- 2) Sosialisasi dan Pelatihan Standar Pelayanan Minimal kepada Pengawas, Kepala sekolah, Guru, Bendahara dan Komite sekolah agar dapat menyelesaikan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan masing-masing dengan mengintegrasikan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
- 3) Optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan di bidang pendidikan.
- 4) Optimalisasi koordinasi dengan lembaga penyelenggara pendidikan dalam rangka percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan swasta.
- 5) Sosialisasi dan Optimalisasi kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk mendukung tuntasnya SPM di satuan pendidikan di Kabupaten Bantul .
- 6) Pemberian penghargaan bagi DUDI yang peduli/mendukung pencapaian SPM di satuan pendidikan.
- 7) Pemberian sertifikat SPM bagi sekolah yang mencapainya.

7.2. Urusan Kesehatan

7.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul terdiri atas 12 jenis pelayanan sebagaimana tersaji pada **Tabel 7.74.**

Tabel 7.74. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
kesehatan penderita hipertensi	hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sumber: Dinkes, 2019

7.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian SPM tahun 2019 ditetapkan tidak semua 100 % dikarenakan menyesuaikan kemampuan sumber daya pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan pada usia lanjut, orang dengan Hipertensi, Orang dengan Diabetes, dan orang dengan gangguan jiwa berat ditetapkan 75%.

Adapun proyeksi sasaran dan target SPM Tahun 2019 adalah seperti dalam **Tabel 7.75** berikut ini :

Tabel 7.75. Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis Layanan Dasar	Target	
	Jumlah	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	14.228	100
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	13.533	100
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.242	100
Pelayanan kesehatan balita	57.421	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	26.679	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	150.001	75
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	44.264	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	56.996	75
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	18.257	75
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.038	75
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	15.319	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	11.354	100

Sumber: Dinkes, 2019

7.2.3. Realisasi

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.76** berikut :

Tabel 7.76. Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis standar pelayanan	Indikator	Realisasi Capaian	
		Jumlah	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang sudah bersalin dan memasuki trimester 3	14.312	
	Jumlah ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar	13.848	97
Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Jumlah ibu bersalin.	13.088	
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	13.072	99,8
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Jumlah bayi baru lahir.	13.072	
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10.998	84,1
Pelayanan kesehatan balita.	Jumlah balita.	60.005	
	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	42.135	70,2
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar.	27.861	
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	27.861	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang telah mengakses pelayanan kesehatan	98.438	
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	98.438	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang telah mengakses pelayanan kesehatan	49.942	
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	41.063	82,2
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang ditemukan	29.337	
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	29.337	100
Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang ditemukan	11.954	

Jenis standar pelayanan	Indikator	Realisasi Capaian	
		Jumlah	%
penderita Diabetes Melitus.	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	11.954	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang ditemukan	2.999	
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.999	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis.	9.224	
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9022	98
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang tidak mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	0	0
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12.787	
	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	12.787	100

Sumber: Dinkes, 2019

Realisasi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantul tidak seluruhnya mencapai 100% sebagaimana telah diamanatkan didalam peraturan perundangan, hal ini dikarenakan adanya beberapa hal diantaranya:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil 97% dari 14.312 sasaran, baru 13.848 ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil yang sesuai standar. Hal ini dikarenakan ada

ibu hamil yang belum mengakses pelayanan K4 pada trimester 3 kehamilannya.

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Capaian pelayanan kesehatan pada ibu bersalin belum mencapai 100% karena masih ada beberapa ibu bersalin tidak di fasilitas pelayanan kesehatan, namun sudah semua ibu bersalin sudah mendapatkan pertolongan oleh tenaga kesehatan.

c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Semua bayi baru lahir di Kabupaten Bantul telah mendapatkan pelayanan kesehatan, namun ada 15,87 % yang tidak dilakukan Inisiasi Menyusi Dini sehingga capaian SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Bantul hanya 84, 13 %.

d) Pelayanan kesehatan balita

Setiap balita di Kabupaten Bantul akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Namun tidak semua ibu rutin memantau berat badan balita per bulan (yang merupakan bagian dari sytandar pelayanan kesehatan). Ada 29, 78 % balita yang tidak dipantau secara rutin berat badan dan tinggi badannya, sehingga capaian SPM pelayanan kesehatan balita hanya 70,22 %.

e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

Anak kelas 1 dan kelas 7 setingkat SD dan SMP telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Semua penduduk usia produktif yang mengakses pelayanan kesehatan telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Capain pelayanan kesehatan pada usia lanjut 82,22 %. Hal ini disebabkan banyak lansia yang terkendala dalam pengisian instrument Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Penderita hipertensi yang mengakses pelayanan kesehatan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Penderita diabetes melitus yang mengakses pelayanan kesehatan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar

j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Orang dengan gangguan jiwa berat yang ditemukan telah dilayani sesuai standar.

k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

Semua orang terduga TB di kabupaten Bantul telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Namun ada 2,19 % penderita TB yang belum taat dalam minum obat sesuai standar, sehingga capaian SPM pelayanan kesehatan orang terduga TB hanya 97,81%.

- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Semua orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

7.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2019 sebagaimana tersaji pada **Tabel 7.77**:

Tabel 7.77. Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	6.159.511.021	6.145.191.659
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	726.538.375	723.920.090
Peningkatan kesehatan masyarakat	1.463.690.000	1.283.476.913
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas srandakan	675.000.000	671.500.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas sanden	698.270.316	696.180.316
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas kretek	757.449.350	734.202.800
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pundong	679.050.000	678.150.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas bambanglipuruo	693.063.000	655.940.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pandak i	701.550.000	638.010.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pandak ii	696.820.000	693.113.100
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas bantul i	715.440.000	690.915.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas bantul ii	733.028.000	714.338.000

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas jetis i	720.872.000	715.217.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas jetis ii	766.422.782	753.970.843
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas imogiri i	726.574.725	718.284.725
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas imogiri ii	695.000.100	691.400.100
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas dlingo i	717.970.050	697.335.050
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas dlingo ii	753.830.863	739.607.112
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pleret	747.699.600	742.743.200
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas piyungan	805.430.700	757.563.860
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas banguntapan i	716.050.430	712.042.400
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas banguntapan ii	710.250.000	692.505.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas banguntapan iii	710.100.000	710.100.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas sewon i	710.000.000	698.595.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas sewon ii	740.000.000	736.999.998
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas kasihan i	710.000.000	706.249.684
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas kasihan ii	713.005.500	710.805.500
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pajangan	702.200.000	701.050.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas sedayu i	696.815.000	696.575.000
Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas sedayu ii	695.000.000	693.790.000
Operasional rumah sakit	1.641.500.000	1.584.281.954
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	185.000.000	178.951.500

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Promosi kesehatan	989.075.000	961.970.650
Pemberdayaan masyarakat sehat	961.375.000	901.772.500
Peningkatan status gizi	2.612.157.000	2.442.692.850
Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan	3.820.391.000	3.362.083.100
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk	316.195.000	249.629.000
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	602.382.500	527.765.731
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	392.785.000	212.536.500
Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan	845.562.300	757.297.648
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	97.825.000	97.064.879
Keg. Pelayanan kesehatan rujukan	459.135.000	452.009.170
Pelayanan jamkesda pada upt jamkesda	18.279.898.000	17.559.482.634
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	5.019.900.000	4.572.427.000
Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	6.825.765.900	6.352.755.541
Pembangunan, perluasan, dan rehab puskesmas, pustu dan jaringannya	4.625.078.000	4.486.059.489
Pendampingan jamkesda	213.000.000	207.708.172
Kemitraan pelayanan kesehatan	247.140.000	245.791.700
Pelayanan kesehatan anak dan balita	164.720.000	163.220.000
Pelayanan kesehatan lansia	147.000.000	138.684.992
Peningkatan pelayanan kesehatan	5.035.920.058	2.110.373.361
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1.869.610.892	1.790.396.000
BLUD PUSKESMAS	61.428.688.146	58.352.893.268,41
Jumlah	144.739.626.908	141.800.179.014

Sumber: Dinkes, 2019

7.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada **Tabel 7.78** menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian

SPM. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul membawahi 27 puskesmas, 67 Puskesmas pembantu yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bisa melakukan pelayanan sesuai standar.

Tabel 7.78. Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

Jenis tenaga	Jumlah
Dokter umum	110
Dokter gigi	40
Perawat	226
Perawat Gigi	57
Tenaga medis kefarmasian	33
Apoteker	20
Kesehatan Masyarakat	35
Kesehatan lingkungan	37
Nutrisionis	47
Fisioterapis	20
Radiografer	3
Analisis kesehatan	41
Rekam medis dan informasi kesehatan	24

Sumber: Dinkes, 2019

7.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Sosialisasi perencanaan awal propinsi yang telat
- 2) Target pencapaian yang sangat besar sedangkan SDM Kesehatan untuk memenuhi target tersebut terbatas.
- 3) Anggaran untuk memenuhi target masih kurang terutama untuk pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan reagen untuk pemeriksaan.
- 4) Ada definisi operasional dalam permenkes yang menimbulkan perbedaan persepsi.

b. Solusi

- 1) Melibatkan institusi pendidikan dan praktisi swasta untuk pemenuhan SDM kesehatan.

- 2) Mengusulkan anggaran tambahan untuk pemenuhan BMHP dan Reagen serta koordinasi ke desa untuk dapat meanggarkan dana DED guna membantu sarana pemenuhan SPM
- 3) Mengusulkan ke Dinas Kesehatan DIY untuk bisa memfasilitasi kejelasan definisi operasional SPM sehingga tidak timbul perbedaan persepsi.

7.3. Urusan Pekerjaan Umum

7.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Bantul terdiri atas 12 jenis pelayanan sebagaimana tersaji pada **Tabel 7.79**.

Tabel 7.79. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Sumber: DPUPKP, 2019

7.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.80**.

Tabel 7.80. Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Indikator	Target	
	Jumlah	%
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	222.979	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layahan pengolahan air limbah domestik	264.449	100

Sumber: DPUPKP, 2019

7.3.3. Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.81** berikut :

Tabel 7.81. Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Indikator	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	222.979	222.979	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layahan pengolahan air limbah domestik	264.449	264.449	100

Sumber: DPUPKP, 2019

7.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.82**.

Tabel 7.82. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar	Indikator	Sumber dana	Program /kegiatan pendukung	Jumlah anggaran
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	APBD	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	4.469.244.000
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	APBD	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	10.681.984.200

Sumber: DPUPKP, 2019

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dimaksudkan untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan. Pada kapasitasnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyediaan sarana dan prasarana air minum. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.4.469.244.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.304.480.000,00 atau tercapai 96,31% dengan efisiensi sebesar Rp.104.678.000,00. Uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Jatimulyo Dlingo (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan;

- a. Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Timbulharjo Sewon (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/SRM-Unit Pelayanan);
- b. Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Gilangharjo Pandak (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/SRM-Unit Pelayanan);
- c. SPAM Desa pada 3 tiga desa yaitu SPAM Desa Selopamioro, Desa Triharjo Pandak dan Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret.
- d. Dua SRM di Jetis dan Kasihan
- e. Pengadaan SR Air Minum di Wijirejo Kecamatan Pandak.
- f. Untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, didukung oleh program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.10.681.984.200,00 terealisasi sebesar Rp. 10.425.631.000,00 atau tercapai 97,60%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa :
- g. Pembangunan SR IPAL Terpusat di 3 kecamatan yaitu Banguntapan, Sewon dan Kasihan.
- h. Pembangunan saluran drainase/air hujan di 26 lokasi tersebar di Kabupaten Bantul
- i. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola IPAL Komunal

7.3.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul tersaji pada Tabel 7.83.

Tabel 7.83. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan Tahun 2019

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan					Tingkat Pendidikan				
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
111	100	10	6	46	48	11	6	9	60	3	18	15

Sumber: DPUPKP, 2019

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana **Tabel 7.84**.

Tabel 7.84. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	32	4	16	11	1
Bidang Bina Marga	14	1	4	8	1
Bidang Cipta Karya	7	0	2	3	2
Bidang Sumber Daya Air	13	0	5	5	3
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	0	2	3	1
Bidang Lit, TI, Jakon dan Alkal	13	0	3	9	1
UPT Pengamatan Pengairan BWK	5	0	3	2	0
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	2	2	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	10	0	7	3	0
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	1	1
Arsiparis/JFT	2	0	1	1	0
Total	111	6	46	48	11

Sumber: DPUPKP, 2019

7.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Sumber-sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air bersih oleh PDAM Kabupaten Bantul pada saat ini terdiri dari mata air, air tanah dan air permukaan belum maksimal
- 2) Kapasitas produksi air bersih terpasang oleh PDAM tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena :
 - Jumlah pelanggan di unit-unit tertentu masih sedikit dibanding kapasitas mesin pompa yang tersedia
 - Jumlah jam operasional belum mencapai 24 jam per hari
 - Sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber air alternatif lain selain air PDAM untuk mencukupi kebutuhannya
 - Pertumbuhan Sambungan Rumah belum optimal
 - Kurangnya kemampuan operator lapangan pada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Bersih atau Pengelola Air Bersih di tingkat dusun maupun desa terutama berkaitan dengan teknis pengoperasian dan perbaikan sistem penyediaan air bersih ketika mengalami kerusakan serta Teknis Pengelolaan sumber air baku.
 - Efisiensi dan optimalisasi sistem masih harus dilakukan, mengingat pada umumnya sistem ini hanya menyediakan air sampai dengan hidran umum, selain itu persyaratan teknis terkait hidrolis sistem harus dievaluasi.
 - Kekurangmandirian dari pengelola/pengurus Sumber Penyediaan Air Bersih Desa dalam mengelola sistem penyediaan air bersih di wilayahnya, bahwa ketika sistem itu diserahkan oleh instansi yang berwenang ini adalah merupakan aset wilayah tersebut yang bisa dikelola dan

dikembangkan dengan sebaik-baiknya dimana ini bersifat stimulan dan masyarakat bisa mengembangkan baik jaringan maupun pelayanan serta sambungan rumah secara mandiri dari hasil iuran dari anggota pemakai air tersebut.

- Paguyuban Kelompok Pengelola Sistem Pengelolaan Air Bersih Desa tidak tersosialisasi dengan maksimal sehingga Organisasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan air bersih belum menjalin sinergitas dengan Paguyuban ini, dengan demikian sinergitas visi dan misi paguyuban dengan Pemerintah Daerah belum dapat tercapai.
- Kondisi ini menyebabkan kapasitas pengurus Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Bersih atau Pengelola Air Bersih di tingkat dusun maupun desa menjadi sangat terbatas dalam mengelola Sistem Pengelolaan Air Bersih yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat di dusun dan desa sehingga sangat rentan terhadap ketidakberfungsian sistem.
- Untuk mengantisipasi ketidakberfungsian sistem secara masal di semua desa maka perlu segera dilakukan pembinaan kelembagaan oleh OPD terkait yaitu Dinas PPKBPM, Dinas Kesehatan, Dinas PUPKP dan Bagian Pemerintahan Desa dengan memfasilitasi penerbitan payung-payung regulasi dan kebijakan-kebijakan daerah terhadap keberfungsian Sistem Pengelolaan Air Bersih secara mandiri oleh Kelompok Pengelola dan didorong menjadi BUMDES.

b. Solusi

- 1) Mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Air atau IPA
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Penyediaan Air Bersih Regional “Kartamantul”

- 3) Menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan perlindungan sumber air bersih yang ada
- 4) Memberikan Penyertaan Modal untuk meningkatkan cakupan pelayanan dengan menambah jaringan ataupun SR kepada PDAM
- 5) Mengoptimalkan Perbup Nomor: 37 tahun 2017 tentang penyediaan air baku bagi usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya.
- 6) Dalam rangka menambah Sambungan Rumah baru bersama SKPD atau OPD terkait melakukan sosialisasi kualitas air kepada masyarakat dan pemanfaatan air PDAM
- 7) Mengembangkan jaringan pelayanan
- 8) Pengawasan kinerja terhadap jaringan produksi terpasang
- 9) Memperbaiki jaringan produksi yang rusak
- 10) Meningkatkan kinerja pengelola/pengurus Sumber Penyediaan Air Bersih Desa dalam mengelola sistem penyediaan air bersih
- 11) Meningkatkan sinergitas penyediaan dan pengelolaan air bersih Bersama seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

7.4. Urusan Perumahan Rakyat

7.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan dasar sebagaimana tersaji pada Tabel 7.85.

Tabel 7.85. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Sumber: BPBD, 2019

7.4.3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul pada Bidang Perumahan Rakyat tersaji pada **Tabel 7.86**:

Tabel 7.86. Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Indikator	Target	
	Jumlah	(%)
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110	100
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	5	100

Sumber: BPBD, 2019

7.4.4. Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.87**.

Tabel 7.87. Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Indikator	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110	222.979	100
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	5	264.449	100

Sumber: BPBD, 2019

7.4.5. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.88**.

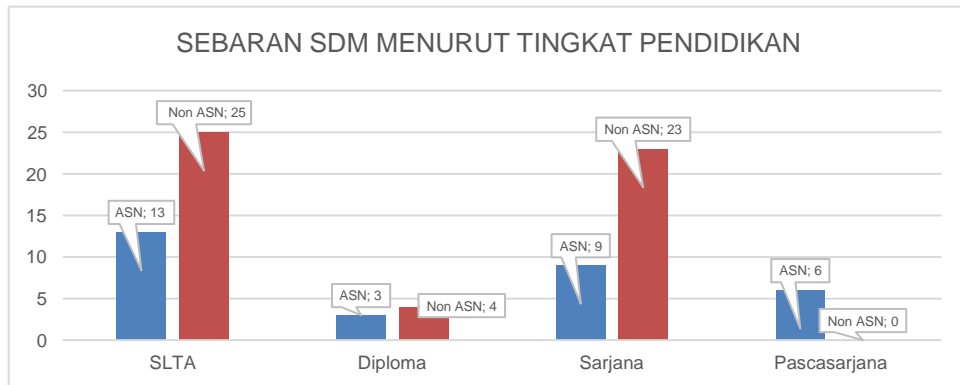
Tabel 7.88. Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar	Indikator (sesuai peraturan menteri pekerjaan umum nomor 29/prt/m/2018)	Sumber dana	Program /kegiatan pendukung	Jumlah anggaran
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	APBN	Stimulan Bahan Bangunan Dana Siap Pakai BNPB	1.750.000.000
		APBN (Dana Hibah Daerah)	Bantuan Dana Rumah (BDR)	4.600.000.000
Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	APBD	Kegiatan Relokasi Korban Bencana Alam	156.250.000

Sumber: BPBD, 2019

7.4.6. Dukungan Personil

SPM Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 7.20. Sebaran SDM Menurut Tingkat Pendidikan

7.4.7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sifatnya sangat insidental, tergantung ada/tidaknya kejadian, sehingga penyediaan anggaran terbatas
- 2) Masih tingginya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana untuk direlokasi oleh pemerintah

b. Solusi

- 1) Peningkatan sinergitas dengan stakeholder terkait kebencanaan untuk pemenuhan anggaran dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang sewaktu-waktu bias terjadi
- 2) Menyiapkan lokasi relokasi dengan fasilitas pendukungnya (Drainase, sumur, listrik, fasum lainnya)

- 3) Peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana untuk direlokasi

7.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

7.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

a. Sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar Sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang mengalami kerugian materiil dan/ atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (limapuluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada

b. Sub-urusan Bencana

Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana terdiri atas :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan

bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana.

Kegiatan tahun 2019 dalam pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dilaksanakan dalam bentuk pelatihan relawan, gladi/simulasi, Optimalisasi Sistem Peringatan Dini Bencana, Optimalisasi Tempat Evakuasi Sementara, Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, Penguatan Satgas Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC), Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

c. Sub-Urusan Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pedoman operasional kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

2) Layanan Penunjang Capaian SPM

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

7.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 7.89. Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber: Satpol PP; BPBD, 2019

7.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.90. Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		89,43%+10,57%	100%
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satgas PBK BPBD Kab. Bantul			
	$\frac{203}{227} \times 100\% = 89,43\%$			
	Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Kelompok Relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang Dibentuk dan/atau Dibawah Pembinaan BPBD Kab. Bantul			
	$\frac{24}{227} \times 100\% = 10,57\%$			

Sumber: Satpol PP; BPBD, 2019

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bantul tidak ada warga negara yang memperoleh layanan karena tidak ada korban akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada . Tidak adanya korban tersebut karena Satpol PP telah berupaya memenuhi mutu pelayanan dasar, yang terdiri dari:

- 1) Memiliki beberapa SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada ;
- 2) Selalu meningkatkan kompetensi SDM yang humanis dan profesional ;
- 3) Optimalisasi Sarpras yang telah dimiliki.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : 16.655
- 2) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan informasi rawan bencana : 0

Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada acuan teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana :

1) Penyusunan Kajian Resiko Bencana

Tahun 2019 dilaksanakan reviu Dokumen RPB sekaligus memasukkan komponen wajib dalam Dokumen Kajian Resiko Bencana dengan hasil tersaji pada **Tabel 7.91**.

Tabel 7.91. Jenis Ancaman dan Jumlah Penduduk Terpapar

No	Jenis Ancaman	Jumlah Penduduk Terpapar
1	Kebakaran	94.878
2	Banjir	24.558
3	Tsunami	34.735
4	Gempa	93.414
5	Longsor	63.369
6	Kekeringan	93.460
7	Cuaca Ekstrim	692.936
8	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7.031
9	Epidemi dan Wabah penyakit	1.006.692
Jumlah		2.111.073

Sumber: BPBD, 2019

Berdasarkan analisa kelas ancaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.92. Tabel Kelas Ancaman

Ancaman Bahaya	Banjir	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim dan Abrasi	Gempabumi	Kebakaran	Kekeringan	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tanah Longsor	Tsunami
Kecamatan									
Pajangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pandak	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sedayu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanden	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dlingo	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sewon	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Srandakan	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kasihani	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Imogiri	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pleret	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bantul	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pundong	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kretek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bambanglipuro	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piyungan	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jetis	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Banguntapan	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keterangan:



2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

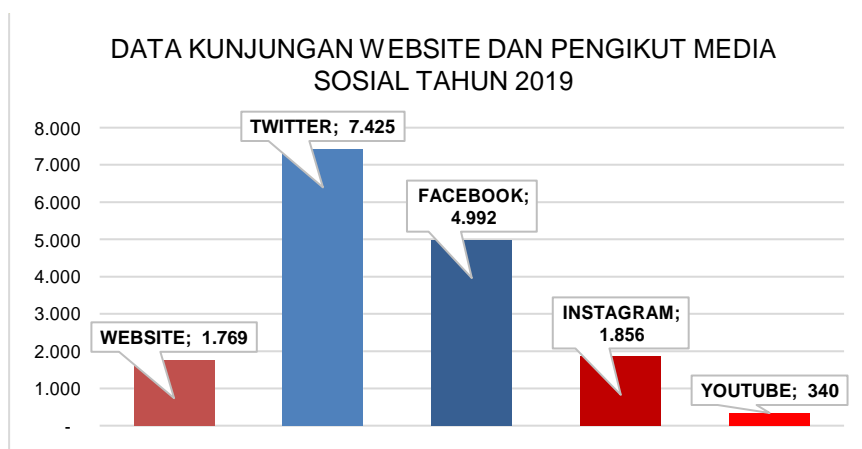
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana pada Tahun 2019 dilaksanakan dengan 3 strategi yaitu:

- 1) Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana

Pada Tahun 2019 dilaksanakan sosialisasi dengan tatap muka untuk 4.100 peserta dengan rincian sebagai berikut: Sarasehan (10 kali @ 50 orang); Sosialisasi (7 kali @ 300 orang); Sosialisasi Destana (4 Desa @ 150 orang); dan Sosialisasi SPAB (3 Sekolah @ 300 orang).

- 2) Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia

Media sosial dan wahana multimedia menjadi sarana komunikasi yang efektif menysar kalangan generasi milenial. Pelaksanaan Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia pada tahun 2019 dapat menjangkau 12.555 warganet dengan rincian pada gambar di bawah ini.



Grafik 7.21. Kunjungan Website dan Pengikut Media OSsial tahun 2019

- 3) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik

Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi bencana

pada tahun 2019 dilaksanakan pada 13 titik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.93. Pemasangan Rambu evakuasi dan papan informasi publik

No	Jenis Papan Informasi Publik	Jumlah Titik Pemasangan
1.	Papan Informasi Waspada Bencana	10
2.	Papan Informasi Daerah Rawan Tsunami	3

Sumber: BPBD, 2019



c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 82.334
- 2) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 0

Pelaksanaan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada acuan teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu layanan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Pada tahun 2019 dilakukan reviu atas Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dengan memasukkan memasukkan beberapa hal yaitu: perubahan cakupan area dan prioritas ancaman bencana; kenaikan kapasitas pemerintah daerah dan turunnya angka kerentanan.

2) Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)

Tahun 2019 disusun 2 Dokumen Rencana Kontinjensi yaitu Reviu Renkon Banjir dan Reviu Renkon Tsunami. Reviu ini dilakukan sejalan dengan reviu RPB dan pertimbangan sudah terdapat perubahan pemanfaatan ruang serta perubahan tren bencana hidrometeorologis pada 2 tahun terakhir.

3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi

Pelatihan pada tahun 2019 menitikberatkan pada peningkatan kemampuan teknis dalam pencegahan dan mitigasi bencana melalui Pelatihan Dasar (Latsar) Petugas dan Peningkatan Kapasitas Relawan

4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

Tahun 2019 dilaksanakan gladi dengan melibatkan 82.334 orang dengan rincian tersaji pada **Tabel 7.94**.

Tabel 7.94. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana

No	Gladi	Jumlah Peserta
1.	Gladi Lapang (7 kali @ 600 orang)	4.200
2.	Gladi Posko (1 kali @ 500 orang)	500
3.	Gladi Destana (4 Desa @ 400 orang)	1.600
4.	Gladi SPAB (3 Sekolah @ 300 orang)	900
5.	Gladi Dalam Rangka HKB 2019	
	- Desa	48.838
	- Sekolah	22.848
	- Dunia Usaha	2.367
	- Instansi Pemerintah	1.017
	- Komunitas	40
	- Individu	24
Jumlah		82.334

Sumber: BPBD, 2019

5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Alat perlindungan diri merupakan hal penting dalam pelaksanaan

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 11.464

2) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 0

Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada acuan teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu layanan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- 1) Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.

Pada tahun 2019 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.

- 2) Respon cepat darurat bencana

Pada Tahun 2019 terdapat 2 bencana yang masuk dalam fase penanganan Tanggap Darurat yaitu

- Badai Savanna

Keputusan Tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2019 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul. Keputusan tanggap darurat diambil pada hari yang sama dengan permohonan pengajuan penetapan status yaitu pada tanggal 8 Maret 2019 atau sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

- Kekeringan

Keputusan Tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 430 Tahun 2019 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bantul. Keputusan tanggap darurat diambil pada hari yang sama dengan permohonan pengajuan penetapan status yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019 atau sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

- 3) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

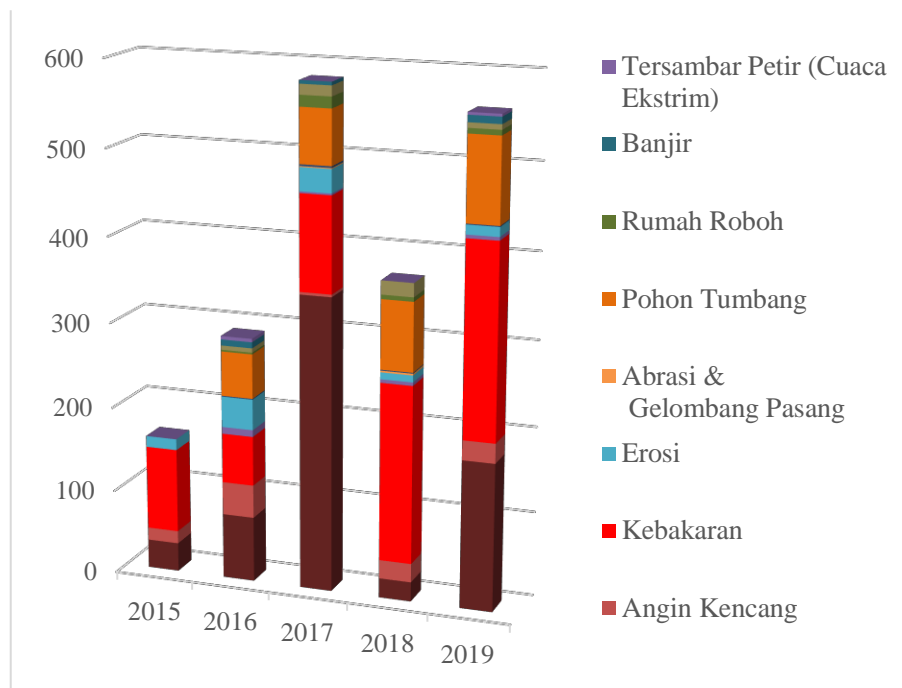
Sistem Komando penanganan darurat bencana didasarkan pada Keputusan Bupati tentang penetapan Tanggap Darurat. Pelaksanaan Sistem komando sudah berjalan baik dan

melibatkan semua potensi penanganan bencana seperti unsur TNI, POLRI, BUMN, Perangkat Daerah, LSM, dan Relawan dan Masyarakat.

4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Pelaksanaan Sub Layanan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2019 sudah berjalan dan terorganisasi dengan baik. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana khususnya dampak Badai Savanna pada tahun 2019 dilaksanakan dengan melibatkan semua potensi SAR seperti Basarnas, TNI, Polri, LSM dalam koordinasi BPBD.

Selain bencana yang sifatnya masif, terdapat kejadian kebencanaan yang sifatnya kecil sampai dengan sedang selama tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi grafik berikut:



Grafik 7.22. Kejadian Bencana

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran : 227
- 2) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran : 0

7.5.4. Alokasi Anggaran

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penerapan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum seperti tersaji pada **Tabel 7.95**.

Tabel 7.95. Alokasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Uraian program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan/ Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	361.477.750	Mobil operasional
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	24.822.000	Pengadaan RIG Mobil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	96.000.000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
Program Penegakan Perda	Operasi penegakan perda	40.000.000	Jasa bongkar reklame

Sumber: Satpol PP, 2019

b. Sub Urusan Bencana

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penerapan sub urusan bencana seperti tersaji pada **Tabel 7.96**.

Tabel 7.96. Alokasi Anggaran Sub Urusan Bencana

Jenis layanan	Alokasi anggaran (x Rp 1.000)					
	Belanja tidak langsung			Belanja langsung		
	APRD	APBN	Sumber dana lainnya	APRD	APBN	Sumber dana lainnya
Pelayanan Informasi Rawan Bencana				1,076,375		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1,675,135		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana				2,416,600		
TOTAL				5,168,110		

Sumber: BPBD, 2019

c. Sub Urusan Kebakaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penerapan sub urusan bencana seperti tersaji pada **Tabel 7.97**.

Tabel 7.97. Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebakaran

Jenis layanan	Alokasi anggaran (x Rp 1.000)					
	Belanja tidak langsung			Belanja langsung		
	APRD	APBN	Sumber dana lainnya	APRD	APBN	Sumber dana lainnya
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				4,183,140		
TOTAL				4,183,140		

Sumber: BPBD, 2019

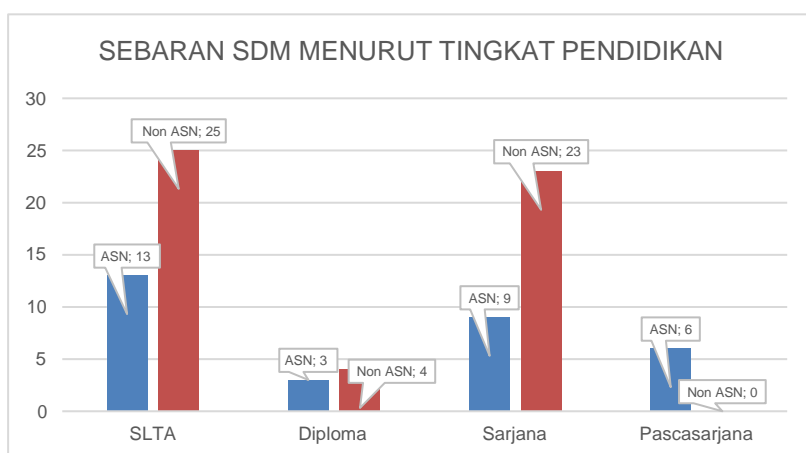
7.5.5. Dukungan Personil

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah anggota Satpol PP yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak : 51 orang

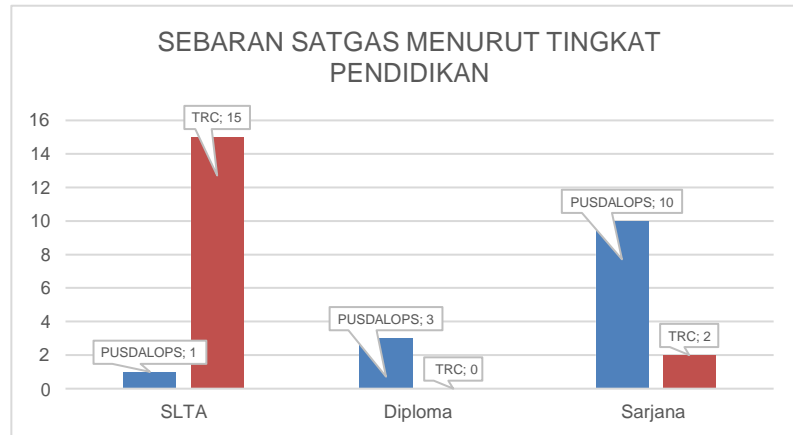
b. Sub Urusan Bencana

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini

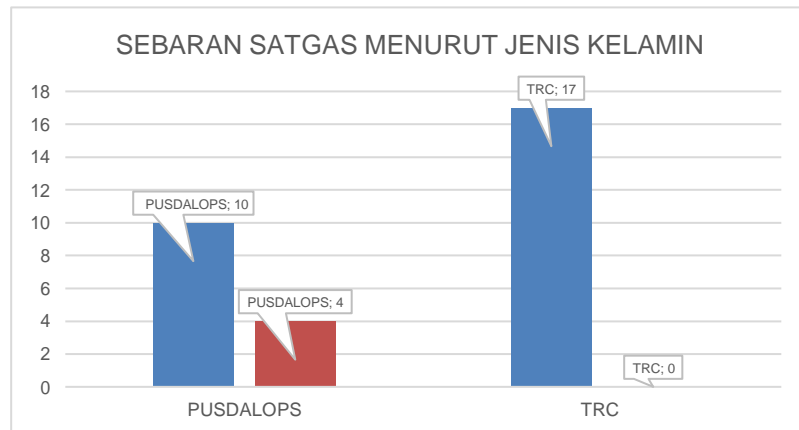


Grafik 7.23. Sebaran SDM Menurut Tingkat Pendidikan pada Sub Urusan Bencana

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilengkapi dengan 2 unit Satuan Tugas yaitu: Satgas Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) dan Satgas Tim Teaksi Cepat (TRC).



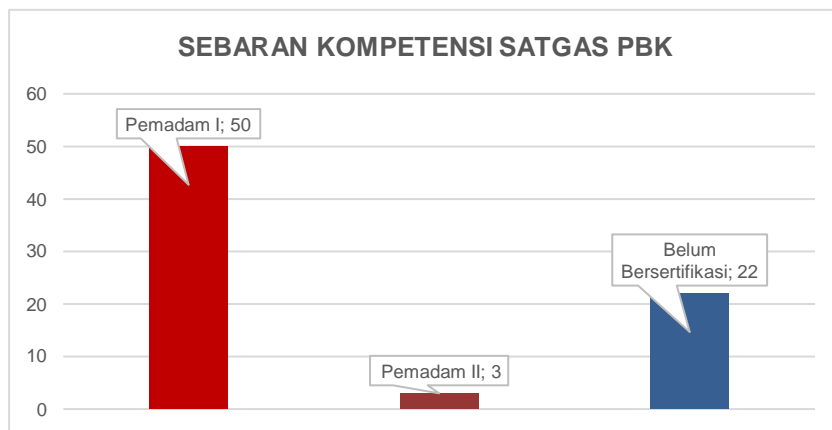
Grafik 7.24. Sebaran Satgas Menurut Tingkat Pendidikan



Grafik 7.25. Sebaran Satgas Menurut Jenis Kelamin

c. Sub Urusan Kebakaran

Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilengkapi dengan 1 unit Satuan Tugas yaitu: Satgas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) dengan jumlah 75 personil yang seluruhnya adalah Non ASN dengan rincian kompetensi sebagai berikut:



Grafik 7.26. Sebaran Kompetensi Satgas PBK

Peningkatan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran terus dilakukan dengan mengoptimalkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang sudah ditentukan. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada **Gambar 7.27**.



Gambar 7.27. Peta Wilayah Manajemen Kebakaran

7.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.98**.

Tabel 7.98. Permasalahan dan Solusi pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
- belum ada pemahaman terhadap pasal 9 ayat (2)Permendagri No 121 Tahun 2018 terkait biaya perbaikan atas kerugian materiil dan cedera fisik ringan pendanaanya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada	- Perlu adanya penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 9 ayat (2)Permendagri No 121 Tahun 2018 perihal anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada	
- Sarpras yang dimiliki belum sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2019	- Pengadaan Sarpras sesuai dengan ketentuan Permendagri No 17 Tahun 2019	

Sumber: Satpol PP, 2019

b. Sub Urusan Bencana

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan bencana di tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.99**.

Tabel 7.99. Permasalahan dan Solusi pada Sub Urusan Bencana

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
A. Perencanaan		
Dokumen Renstra Belum sepenuhnya memasukkan aspek pemenuhan SPM yang disebabkan Peraturan Teknis pada saat Reviu Renstra belum ada.	Memasukkan komponen pemenuhan SPM dalam APBD 2019 dan 2020.	Perbaikan DPA 2019 melalui Perubahan serta Penyempurnaan Dokumen Renja 2020 dengan mengacu pada aspek pemenuhan SPM
A. Koordinasi		
Belum optimalnya koordinasi lintas sector dalam pemenuhan SPM	Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemenuhan SPM.	Menganggarkan workshop lintas sektor dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana dan kebakaran pada tahun 2020 untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan antara lembaga/institusi
B. Pendanaan		
Porsi anggaran pemenuhan SPM pada tahun 2019 dan 2020 masih belum dapat menjangkau target SPM.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemenuhan SPM.	Penguatan dan Optimalisasi Relawan dan Dunia Usaha dalam peningkatan sebaran informasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

Sumber: BPBD, 2019

c. Sub Urusan Kebakaran

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2019 tersaji pada **Tabel 7.100.**

Tabel 7.100. Permasalahan dan Solusi pada Sub Urusan Kebakaran

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
A. Perencanaan		
Dokumen Renstra Belum sepenuhnya memasukkan aspek pemenuhan SPM yang disebabkan Peraturan Teknis pada saat Reviu Renstra belum ada.	Memasukkan komponen pemenuhan SPM dalam APBD 2019 dan 2020.	Perbaiki DPA 2019 melalui APBD Perubahan serta Penyempurnaan Dokumen Renja 2020 dengan mengacu pada aspek pemenuhan SPM
A. Koordinasi		
Belum optimalnya koordinasi lintas sector dalam pemenuhan SPM	Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemenuhan SPM.	Menganggarkan workshop lintas sektor dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana dan kebakaran pada tahun 2020 untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan antara lembaga/institusi
B. Pendanaan		
Porsi anggaran pemenuhan SPM pada tahun 2019 dan 2020 masih belum dapat menjangkau target SPM.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemenuhan SPM.	Penguatan dan Optimalisasi Relawan dan Dunia Usaha dalam peningkatan sebaran informasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran.
C. Lain-Lain		
Kelembagaan Pemadam Kebakaran masih belum optimal	Meningkatkan kelembagaan Pemadam Kebakaran dalam unit Struktural tersendiri	Evaluasi kelembagaan

Sumber: BPBD, 2019

7.6. Urusan Sosial

7.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial terdiri atas :

Tabel 7.101. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Sumber: Dinsos PPPA, 2019

7.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM urusan sosial pada tahun 2019 lebih kepada pemilahan data PMKS agar sasaran penerima manfaat pelayanan SPM tepat sasaran pada tahun berikutnya. Target Pencapaian SPM bidang urusan sosial tersaji pada Tabel 7.102.

Tabel 7.102. Target Capaian SPM Bidang Sosial

Indikator	Target	
	Jumlah	(%)
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	200	100

Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	500	100
Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	200	100
Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	57	100
Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	92	100

Sumber: Dinsos PPPA, 2019

7.6.3. Realisasi

Tabel 7.103. Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

Indikator	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	200	200	100
Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	500	500	100
Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	200	200	100
Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	57	57	100
Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	92	92	100

Sumber: Dinsos PPPA, 2019

Dikarenakan tahun 2019 merupakan tahap awal pelaksanaan pemenuhan SPM sesuai permendagri nomor 100 tahun 2018, maka

pelaksanaan pemenuhan SPM dilaksanakan sesuai dengan renstra yang ada, pemenuhan SPM pada tahun selanjutnya dilakukan tahap pemilahan data dan persiapan operasional, yaitu antara lain :

a. Verivali data baseline sesuai kebutuhan pemenuhan indikator

Telah dilakukan verivali data termasuk kebutuhan alat bantu di dalamnya. Data yang telah diverivali antara lain :

- 1) Updating kemiskinan
- 2) Kebutuhan alat bantu
- 3) Calon penerima boga sehat , dan alat bantu bagi anggota LKS

b. Permakanan untuk desil 1 dan 2 lansia dan difabel terlantar

Telah dilaksanakan pemetaan penerima permakanan dalam bentuk kegiatan Boga Sehat dengan jumlah sasaran sebanyak 1.342 orang. Dengan sasaran lansia dan difabel miskin absolut. Penerima manfaat sebanyak 900 orang.

c. Pemberian alat bantu

Telah dilakukan pendataan dan penyediaan alat bantu :

- 1) Bekerjasama dengan jamkesos dan jamkesus
- 2) Mendata kebutuhan alat bantu warga pada masing- masing kecamatan
- 3) Menyediakan dan mengangarkan alat bantu non spesifikasi khusus untuk keadaan darurat bagi warga yang membutuhkan tahun 2019 sebanyak 6 pengakses alat bantu non spesifikasi.

d. Tenaga pemetaan data

Pemetaan data telah dilaksanakan di tahun 2019 sehingga dapat menghasilkan dan memilah data pmks sasaran SPM.

e. Perencanaan shelter

Dalam rangka keterpaduan operasional fasilitasi percepatan pemenuhan SPM, komitmen Kabupaten Bantul khususnya pada urusan sosial, telah merencanakan pembangunan shelter. Hal ini dilakukan salah satu faktor utamanya adalah kewajiban dan kewenangan yang diampun kabupaten dalam pemenuhan SPM urusan sosial adalah PMKS yang berada di luar panti. Sehingga dibutuhkannya fasilitas, sarana prasarana lokasi yang mampu menyediakan tempat sementara sebagai tempat singgah selama proses assement berlangsung.

Perencanaan Shelter telah dilaksanakan :

- 1) Pemenuhan syarat DED dan perencanaan pembangunan Shelter
- 2) Perencanaan Penganggaran pembangunan shelter pada tahun 2020

Pemenuhan SPM tahun 2019 terealisasi 100% dari semua jumlah yang ditargetkan. Untuk penanganan PMKS secara holistik dan menyeluruh dibutuhkan komitmen dan kesinambungan dengan perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya.



Gambar 7.28. Foto Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial

7.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran APBD dalam pemenuhan SPM tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.104. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial

Uraian program	Anggaran
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar (tidak keseluruhan anggaran untuk pemenuhan SPM)	Rp. 8.209.770.750,-
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Bantuan Sosial dengan anggaran sebesar (tidak keseluruhan anggaran untuk pemenuhan SPM);	Rp. 1.171.719.900,-
Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial dengan anggaran sebesar (tidak keseluruhan anggaran untuk pemenuhan SPM)	Rp. 1.224.871.915,-
Jumlah	Rp. 10.606.362.565,-

Sumber: Dinsos PPPA, 2019

7.6.5. Dukungan Personil

Penerapan SPM dan pemenuhannya melibatkan personil dan rekan kerja relawan sosial, yang terdiri antara lain :

- a. TKSK, Jumlah 17 orang; 1 orang setiap kecamatan (
- b. Panti/LKSA

7.6.6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan

Permasalahan dalam pemenuhan SPM urusan sosial di Kabupaten Bantul antara lain :

- 1) Penanganan gelandang dan pengemis tergantung dari adanya razia atau berdasarkan data temuan gelandangan dan

pengemis, sehingga cukup sulit untuk dilakukan penentuan target;

- 2) Peraturan terkait SPM yang disahkan pada tahun 2018, membuat kabupaten tidak dapat menyesuaikan kegiatan khusus SPM, kegiatan SPM masih masuk di dalam sub kegiatan dikarenakan pada tahun 2018 RPJMD Kabupaten Bantul telah melakukan revisi RPJMD yang berdampak pada RENSTRA masing-masing perangkat daerah.

b. Solusi

- 1) Melakukan koordinasi dengan TAPD dan Tim Penerapan SPM;
- 2) Penganggaran terkait pemenuhan SPM hanya dapat dimasukkan ke dalam kegiatan yang telah ada pada RENJA.

BAB VIII
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH



BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada **Tabel 8.105:**

Tabel 8.105. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2019, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada **Tabel 8.106**.

Tabel 8.106. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	7,5 (baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,6 tahun
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,23 tahun
4	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	10,86 %
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Pendapatan (Gini Rasio)	5,6% 0,39
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	22%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	45%
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,8%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1020%
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1,08%
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,25%
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,40%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	76
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	38,66%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	72,5%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,070
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	65

Sumber : Perubahan RPJMD 2016-2021

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

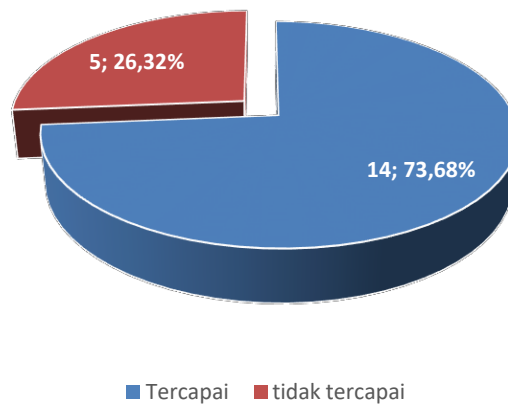
Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul di Tahun 2019 berdasarkan realisasi capaian terhadap indikator kinerja utama Bupati menunjukkan hasil yang cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator sasaran atau sebanyak 89,47% tergolong dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 12 (dua belas) IKU capaiannya diatas 100%, Sedangkan 2 (dua) IKU atau 10,52% masuk dalam kriteria Tinggi yaitu angka kemiskinan dan Gini Ratio. Kriteria realisasi capaian kinerja tersaji pada table Tabel 8.107

Tabel 8.107. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019			Kriteria
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	<i>Indonesia Governance Index (IGI)</i>	Angka	7,5	7,72	102,93	Sangat Tinggi
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,6	73,77	100,23	Sangat Tinggi
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,23	15,15*	99,47	Sangat Tinggi
4	Angka Kemiskinan	Persen	10,86	12,92*	81,03	Tinggi
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6	5,53	98,75	Sangat Tinggi
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,39	0,448**	85,13	Tinggi
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	22	22,89	104,04	Sangat Tinggi
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	45	46,2	102,66	Sangat Tinggi
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	0,8	1,57	196,25	Sangat Tinggi
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1020	3,83*	3754	Sangat Tinggi
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,08	1,09*	100,92	Sangat Tinggi
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,25	0,57	228	Sangat Tinggi
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,40	1,41	100,71	Sangat Tinggi
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	76	76,77	101,01	Sangat Tinggi
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	56	60,40	107,85%	Sangat Tinggi
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	38,66	46,67	120,71	Sangat Tinggi
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	72,5	72,5	100	Sangat Tinggi
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,070	0,074	94,29	Sangat Tinggi
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	65	69,7	107,2	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda, 2019, data diolah (*) angka sementara, **) angka sangat sementara)

Capaian kinerja tahun 2019 jika diukur dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja menunjukkan hasil kinerja yang baik, lihat **Tabel 8.107** dan **Grafik 8.29**. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 13 indikator kinerja utama, capaiannya melebihi target dan 1 indikator kinerja utama sesuai dengan target. Dengan kata lain, sebanyak indikator yang telah ditetapkan targetnya dapat terealisasi sebesar 73,68% atau 14 dari total 19 indikator. Indikator kinerja utama yang tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain adalah angka harapan lama sekolah, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, *Gini Ratio*, dan angka kriminalitas. Namun demikian, keempat indikator kinerja utama tersebut masuk dalam kriteria kinerja sangat tinggi (pertumbuhan ekonomi, angka kriminalitas) dan tinggi (angka kemiskinan dan *Gini Ratio*).



Grafik 8.29. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2019

C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

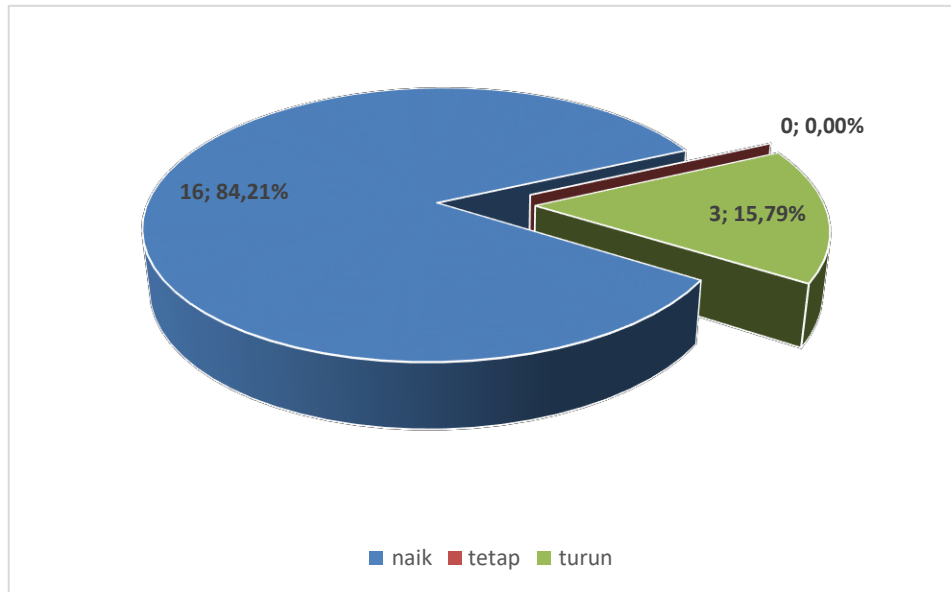
Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 terhadap capaian kinerja tahun 2018 juga menunjukkan hasil yang bagus, dimana sebanyak 16 indikator kinerja utama mengalami peningkatan atau sebesar 84,21% dari total 19 indikator (lihat **Tabel 8.108** dan **Grafik 8.30**). Indikator yang realisasinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3 indikator atau sebesar 15,79%. Indikator tersebut antara lain adalah IGI,

Gini Ratio dan angka kriminalitas.

Tabel 8.108. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Kenaikan/ penurunan
1	<i>Indonesia Governance Index (IGI)</i>	Angka	7,96	7,72	96,98
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,56	73,77	100,29
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,03	15,15*	100,80
4	Angka Kemiskinan	Persen	13,43	12,92*	103,80
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,02	5,53	110,16
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,4126	0,448**	91,42
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	13,28	22,89	172,36
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	42,9	46,2	107,69
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	0,71	1,57	221,13
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,130	3,83*	2946,15
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	0,85	1,09*	128,24
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,24	0,57	237,50
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,14	1,41	123,68
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	74,36	76,77	103,24
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	53,36	60,40	113,19
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	37,33	46,67	125,02
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	70,45	72,5	102,91
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,055	0,074	65,45
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	68,4	69,7	101,90

Sumber : Bappeda, 2019, data diolah (*) angka sementara, **) angka sangat sementara)



Grafik 8.30. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Realisasi Tahun 2018

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayanannya. Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

D. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran capaian kinerja IKU Bupati tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021) menunjukkan hasil pencapaian yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari ada sebanyak 4 indikator dengan realisasi capaian melebihi target akhir

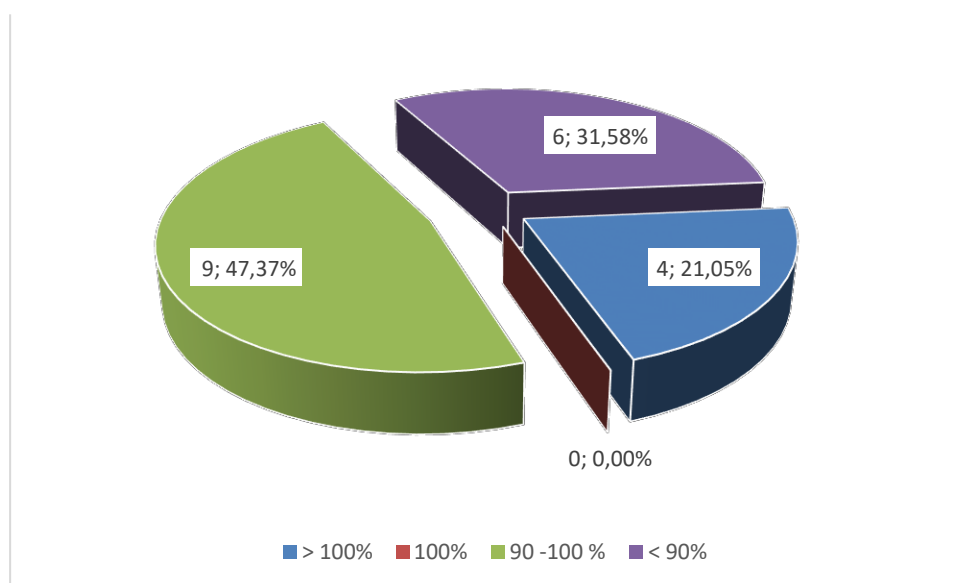
RPJMD yang telah ditetapkan, lihat **Tabel 8.109**.

Tabel 8.109. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
1	<i>Indonesia Governance Index (IGI)</i>	Angka	7,72	8,5	90,82
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,77	73,70	100,09
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,15*	15,54	97,49
4	Angka Kemiskinan	Persen	12,92*	8,32	44,71
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,53	5,6	98,75
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,448**	0,37	78,92
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	22,89	24	95,38
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	46,2	50	92,4
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	1,57	1	157
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	3,83*	0,103	3718,45
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,09*	1,125	96,89
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,57	0,35	162,86
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,41	1,50	94
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	76,77	80	95,96
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	60,40	72	83,89
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	46,67	52	89,75
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	72,5	80	90,63
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,074	0,060	76,67
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	69,7	75	92,93

Sumber : Bappeda, 2019, data diolah (*) angka sementara, **) angka sangat sementara)

Lebih lanjut lagi, berdasarkan **Tabel 8.109** diperoleh beberapa kesimpulan, yakni (1) Ada 4 indikator dengan realisasi capaian melebihi target (hasil pengukuran > 100%); (2) Ada 9 indikator dengan realisasi mendekati target (hasil pengukuran 90-100%); dan (3) Ada 6 indikator jauh di bawah target (hasil pengukuran < 90%). Ringkasan atau garis besar pengukuran capaian tersebut sebagaimana tersaji pada **Grafik 8.31**.



Grafik 8.31. Hasil pengukuran capaian tahun 2019 dibandingkan dengan target RPJMD

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.2.258.180.662.975,05 dan belanja sebesar Rp. 2.504.062.661.991,45 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.245.881.999.016,4 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2019 untuk pendapatan sebesar Rp. 2.269.643.208.667,86 realisasi belanja Rp. 2.284.063.006.483,98 terdapat surplus pembiayaan Rp.397.802.016,00.

Tabel 8.110. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019*

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Bertambah/(berkurang)	
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN	2.258.180.662.975,05	2.269.643.208.667,86	(11.462.545.692,81)	100,51%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	467.159.577.195,41	506.143.123.220,86	(38.983.546.025,45)	108,34%
	DANA PERIMBANGAN	1.388.065.951.692,00	1.351.157.100.831,00	36.908.850.861,00	97,34%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	402.955.134.087,64	412.342.984.616,00	(9.387.850.528,36)	102,33%
B	BELANJA	2.504.062.661.991,45	2.284.063.006.483,98	219.999.655.507,47	91,21%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.256.133.050.319,45	1.180.251.549.168,00	75.881.501.151,45	93,96%
	BELANJA LANGSUNG	1.247.929.611.672,00	1.103.811.457.315,98	144.118.154.356,02	88,45%
C	PEMBIAYAAN DAERAH	245.881.999.016,40	248.093.505.918,40	(2.211.506.902,00)	100,90%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	307.841.999.016,40	289.985.005.918,40	17.856.993.098,00	94,20%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.960.000.000,00	41.891.500.000,00	20.068.500.000,00	67,61%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	233.673.708.102,28		

Sumber : BKAD, 2019

* : unaudited

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.258.180.662.975,05 (lihat **Tabel 8.110**) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagaimana tersaji pada **Tabel 8.111**:

Tabel 8.111. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.256.133.050.319,45	50,16%
2	Belanja Langsung	1.247.929.611.672,00	49,84%
Jumlah		2.504.062.661.991,45	

Sumber : BKAD, 2019

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 8.112. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)	(%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	179.467.169.719	14,38%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	221.508.562.948	17,75%
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	216.812.628.051	17,37%
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	47.939.807.515	3,84%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	18.240.242.967	1,46%
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	15.738.721.500	1,26%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	12.724.117.116	1,02%
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	13.470.561.061	1,08%
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	2.639.667.600	0,21%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	222.325.396.050	17,82%
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	23.136.581.000	1,85%
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	6.591.147.910	0,53%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan	2.367.495.000	0,19%

ruang

14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	6.906.299.590	0,55%
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	5.510.460.000	0,44%
Jumlah		995.378.858.027	79,76%
Program/kegiatan pendukung		252.550.753.645	20,24%
Total Belanja Langsung		1.247.929.611.672	100%

Sumber : BKAD, 2019

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.995.378.858.027 atau sebesar 79,76% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.252.550.753.645 atau sebesar 20,44% dari total belanja langsung, hal ini sebagaimana tersaji pada **Tabel 8.112**.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat, yaitu sebesar 17,82% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan besaran anggaran 17,75%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,19% dari total anggaran belanja langsung, lihat **Tabel 8.112**.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 88,45%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93,22%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 69,65%. Penjelasan ini merujuk pada **Tabel 8.113**

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)

sebesar 98,01%. Anggaran pada IKU ini efektif mendukung akuntabilitas kinerja. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Desa Tangguh Bencana sebesar 81,63%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja, lihat **Tabel 8.113**.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 8.113. Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	7,5	7,72	103%	179.467.169.719	166.397.841.215	92,72%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,6	73,66	100%	221.508.562.348	206.863.327.205	93,39%
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	15,23	15,03	99%	216.812.628.051	204.345.763.559	94,25%
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	10,86	12,92	81,03%	47.939.807.515	46.852.901.036	97,73%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,45	5,47	100%	17.353.683.467	16.972.058.863	97,80%
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,39	0,45	85,13%	886.559.500	868.949.800	98,01%
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	22	22,89	104%	15.738.721.500	15.110.212.593	96,01%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	45	46,20	103%	12.724.117.116	11.185.615.715	87,91%
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,8	1,57	196%	13.470.561.061	12.984.384.792	96,39%
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,102	0,1	98%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1,08	1,09	101%			
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,25	0,57	228%			
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,40	1,41	101%	2.639.667.600	2.586.980.908	98,00%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	76	76,77	101%	222.325.396.050	202.156.840.570	90,93%
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56	60,39	108%	23.136.581.000	21.875.255.258	94,55%
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	38,66	46,67	121%	6.591.147.910	5.380.135.144	81,63%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	72,5	72,5	100%	2.367.495.000	2.182.648.480	92,19%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,07	0,074	94,29%	6.906.299.590	6.721.329.490	97,32%
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	65,0	69,7	107%	5.510.460.000	5.430.399.745	98,55%
Jumlah						995.378.857.427	927.914.644.373	93,22%
Belanja Langsung Pendukung						252.550.754.245	175.896.812.943	69,65%
Total Belanja Langsung						1.247.929.611.672	1.103.811.457.316	88,45%

Sumber : Bappeda, BKAD, 2019, data diolah

Kabupaten Bantul dalam mewujudkan capaian kinerja telah melaksanakan penghematan dalam hal belanja anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan tidak semua anggaran belanja langsung yang mendukung capaian kinerja terbelanjakan namun dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Penghematan/efisiensi anggaran belanja langsung pada program/kegiatan yang mendukung capaian di tahun 2019 sebesar 11,55% dari total anggaran. Efisiensi anggaran tersaji pada **Tabel 8.114**.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6,78%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Desa Tangguh Bencana pada sasaran Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana sebesar 18,37% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan pada sasaran Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebesar 1,45%.

Efisiensi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada **Tabel 8.114**:

Tabel 8.114. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target	Realisasi	Rp	%
1	Indonesia Governance Index (IGI)	179.467.169.719	166.397.841.215	13.069.328.504	7,28%
2	Umur Harapan Hidup	221.508.562.948	206.863.327.205	14.645.235.743	6,61%
3	Angka Harapan Lama sekolah	216.812.628.051	204.345.763.559	12.466.864.492	5,75%
4	Angka Kemiskinan	47.939.807.515	46.852.901.036	1.086.906.479	2,27%
5	Pertumbuhan ekonomi	17.353.683.467	16.972.058.863	381.624.604	2,20%
6	Pemerataan Pendapatan	886.559.500	868.949.800	17.609.700	1,99%
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	15.738.721.500	15.110.212.593	628.508.907	3,99%
8	Cakupan Industri Kreatif	12.724.117.116	11.185.615.715	1.538.501.401	12,09%
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	13.470.561.061	12.984.384.792	486.176.269	3,61%
10	Pertumbuhan				

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp) Target	Realisasi	Efisiensi Anggaran Rp	%
11	produksi tanaman pangan Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura				
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan				
13	Pertumbuhan produksi perikanan	2.639.667.600	2.586.980.908	52.686.692	2,00%
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	222.325.396.050	202.156.840.570	20.168.555.480	9,07%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	23.136.581.000	21.875.255.258	1.261.325.742	5,45%
16	Desa Tangguh Bencana	6.591.147.910	5.380.135.144	1.211.012.766	18,37%
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	2.367.495.000	2.182.648.480	184.846.520	7,81%
18	Angka Kriminalitas	6.906.299.590	6.721.329.490	184.970.100	2,68%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	5.510.460.000	5.430.399.745	80.060.255	1,45%
	Jumlah	995.378.858.027	927.914.644.373	67.464.213.654	6,78%
	Program /kegiatan pendukung	252.550.753.645	175.896.812.943	76.653.940.702	30,35%
	Total Belanja Langsung	1.247.929.611.672	1.103.811.457.316	144.118.154.356	11,55%

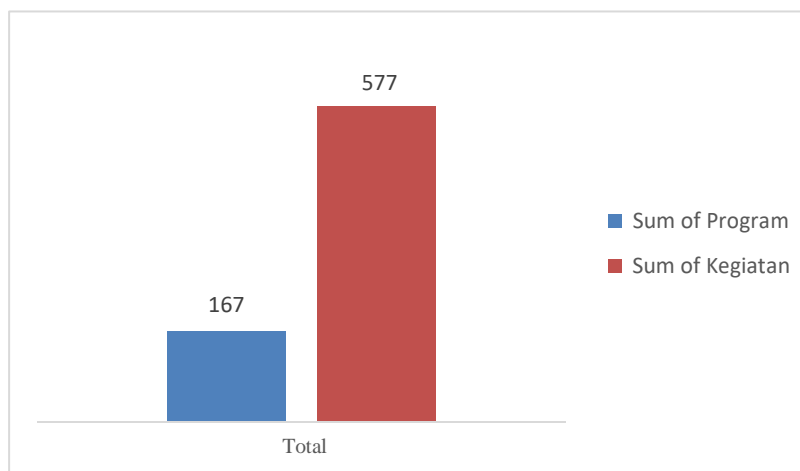
Sumber : Bappeda, BKAD, 2019, data diolah

F. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Bantul telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di tahun 2019 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 167 program dan 577 kegiatan, sebagaimana tersaji pada **Grafik 8.32**. Rincian jumlah program kegiatan per indikator kinerja utama sasaran strategis tersaji pada **Tabel 8.115** Tabel 8.116.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat

mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan didalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program kegiatan di tahun 2019 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada **Tabel 8.116**.



Grafik 8.32. Grafik Jumlah Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis (Sumber: Bappeda, BKAD 2019, data diolah)

Tabel 8.115. Jumlah Program Kegiatan per IKU Sasaran Strategis yang Didukung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	42	165
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	26	107
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	8	47
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	16	60
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	13	41
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	3	10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
	dan unggul			
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	6	10
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) Pertumbuhan produksi tanaman pangan Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	6	15
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1	4
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	19	36
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4	16
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	3	22
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	3	10
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	12	24
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	5	10
	Jumlah		167	577

Sumber : Bappeda, BKAD, 2019, data diolah

Tabel 8.116. Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah 4. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 5. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah 6. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan 7. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 2. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus 3. Pelaksanaan Pendampingan SPIIP di Kab. Bantul 4. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online 5. Pelaporan LP2P dan LHKPN 1. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 2. Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai 4. Penilaian PNS 1. Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga 1. Analisis Kebijakan Pembangunan 2. Pelaporan Pembangunan 3. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD 4. Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1. Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik 2. Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik 4. Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan 2. Penerimaan Kunjungan Kerja 3. Pengelolaan Informasi Media Massa 4. Peningkatan Kemampuan Keprotokolan 5. Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten 1. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah 2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1. Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah 2. Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten 3. Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah 3. Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
			10. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa 3. Pedampingan Administrasi Desa 4. Pemberdayaan lembaga desa 5. Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa 6. Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa 7. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa 8. Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa 9. Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa 10. Update Data Monografi Desa
			11. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
			12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan 2. Pemberian bantuan hukum 3. Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4. Pengawasan produk hukum pemerintah desa 5. Penyuluhan Hukum 6. Penyusunan Produk Hukum Daerah 7. Publikasi peraturan perundang-undangan
			13. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 6. Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan 7. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan 8. Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			14. Program Analisis Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Kitab Keislaman 2. Pendamping halaqoh & berbagai forum keagamaan lainnya 3. Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu 4. Peningkatan Pemberdayaan kaum rois & penjaga masjid
			15. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 2. Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat 3. Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah 5. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat 7. Pengembangan Ekonomi Masyarakat 8. Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat
			16. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis 2. Peningkatan Pelayanan Kearsipan 3. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
			17. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian sistem administrasi kearsipan 2. Pengawasan Kearsipan 3. Pengklasifikasian data
			18. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuisisi dan Pengelolaan Arsip 2. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
			19. Program peningkatan pelayanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2. Peningkatan pelayanan masyarakat
			20. Program Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah 3. Musrenbang tingkat kecamatan 4. Pelaksanaan Rakorpem desa 5. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6. Pengendalian keamanan lingkungan 7. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 8. Peningkatan pemberdayaan keagamaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 10. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 11. Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan 12. Rapat koordinasi unsur Muspika 13. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
			21. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam 2. Pemberdayaan lembaga desa 3. Pemberdayaan Petani 4. Pembinaan Organisasi Perempuan 5. Pendampingan kegiatan TMMD 6. Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			22. Program Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
			23. Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian 2. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi
			24. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
			25. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan KID dan PPID 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 3. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
			26. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
			27. Program Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak) 2. Pelayanan Mutasi Penduduk 3. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 4. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 5. Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM
			28. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 2. Sinkronisasi Kebijakan 3. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			29. Program Pengelolaan Data Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Data Kependudukan 2. Publikasi Kebijakan Kependudukan 3. Penyusunan Buku Profil Kependudukan 4. Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 5. Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data
			30. Program Penegakan Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Penegakan Perda 2. Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
			31. Program pendidikan politik masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forkom Ormas, Orsos, dan LSM 2. Pendidikan politik di masyarakat
			32. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Rapat-rapat paripurna 3. Reses 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5. Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD 6. Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya 7. Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 8. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			33. Program Pengembangan Data/Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pengelolaan data daerah 2. Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
			34. Program Kerjasama Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah
			35. Program perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penganggaran 2. Perencanaan pembangunan sektoral 3. Perencanaan pembangunan kewilayahan
			36. Program perencanaan pembangunan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri 2. Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam
			37. Program perencanaan sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan pemerintahan 2. Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat 3. Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
			38. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
			39. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
			40. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem inovasi daerah
			41. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			42. Program Pengelolaan Barang Daerah	2. Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD 1. Peningkatan SDM aparatur Pemda 2. Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang 3. Penataan aset 4. Penghapusan barang daerah 5. Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah 6. Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah 7. Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah 8. Pengamanan dokumen kepemilikan barang milik daerah 9. Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4. Program obat dan perbekalan kesehatan 5. Program upaya kesehatan masyarakat	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan anak dan Balita 1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1. Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2. Peningkatan kesehatan masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan 5. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan 6. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden 7. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek 8. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong 9. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro 10. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I 11. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II 12. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I 13. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II 14. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I 15. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II 16. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I 17. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II 18. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I 19. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II 20. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				21. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan
				22. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I
				23. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II
				24. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III
				25. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I
				26. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II
				27. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I
				28. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II
				29. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan
				30. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I
				31. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II
				32. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan
				33. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden
				34. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek
				35. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong
				36. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro
				37. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I
				38. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II
				39. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I
				40. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II
				41. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I
				42. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II
				43. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I
				44. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II
				45. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I
				46. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II
				47. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret
				48. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan
				49. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I
				50. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II
				51. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III
				52. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I
				53. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II
				54. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I
				55. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II
				56. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan
				57. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				58. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II 59. Operasional Rumah Sakit
			6. Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
			7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1. Promosi Kesehatan 2. Pemberdayaan masyarakat sehat
			8. Program perbaikan gizi masyarakat	1. Peningkatan status gizi
			9. Program pengembangan lingkungan sehat	1. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
			10. Program standarisasi pelayanan kesehatan	1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 2. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 3. Pelayanan Kesehatan Rujukan
			11. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1. Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
			12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	1. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 3. Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
			13. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1. Pendampingan Jamkesda
			14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1. Pelayanan kesehatan Lansia
			15. Program peningkatan pencegahan penyakit tidak menular	1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
			16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya
			17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	1. Pengelolaan BLUD RSUD
			18. Program pelayanan kontrasepsi	1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
			19. Program keluarga berencana	1. Pelayanan KIE 2. Pembinaan Keluarga Berencana 3. Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal 4. Pemantapan mekanisme operasional 5. Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten 6. Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB 7. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	20. Program kesehatan reproduksi remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2. Lomba forum PIK remaja 3. KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
			21. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Forum IMP
			22. Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Data dan Dampak Kependudukan 2. Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah 3. Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
			23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 2. Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) 3. Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya 4. Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA 5. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
			24. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
			25. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan olahraga rekreasi 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
			26. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga
			1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD 4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
			2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP 2. Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar 3. Perijinan SD dan SMP Baru 4. Pengembangan Pendidikan Dasar SMP 5. Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar 6. Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar 7. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 8. Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD 9. Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				kearifan lokal
				10. Pengembangan Pendidikan Dasar SD
				11. Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD
				12. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD
				13. Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD
				14. penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI
				15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa
				16. Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP
				17. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
				18. Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS
				19. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
				20. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
		3. Program Pendidikan Non Formal		1. Penyelenggaraan pendidikan non formal
				2. Pengembangan Pendidikan non formal
				3. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B
				4. Penyelenggaraan Paket C setara SMU
		4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1. Evaluasi standar pelayanan minimal
				2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
				3. Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
		5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
				2. Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)
				3. Pembinaan dan operasional dewan pendidikan
				4. Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia
				5. Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi
		6. Program Peningkatan Nilai Akademik		1. Penambahan Pelajaran
				2. Peningkatan Metode Pengajaran
				3. Peningkatan Peran Orangtua
		7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan
				2. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
				3. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
				4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				5. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
				6. Pengembangan Sarpras Perpustakaan
		8. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan		1. Pengembangan Pelayanan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penempatan tenaga kerj 2. Program perluasan kerja 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 5. Program transmigrasi regional 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Promosi Perpustakaan 1. Penyuluhan ketenagakerjaan 2. Penempatan pencari kerja 1. Kegiatan terapan teknologi tepat guna 2. Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur 3. Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat 4. Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri 1. Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan 2. Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. Kegiatan Pembinaan LPK 2. Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan 3. Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan 4. Uji kompetensi peserta latihan di BLK 5. Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja 6. Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja 7. Pelatihan Menjahit 8. Pelatihan Mekanik 9. Pelatihan Teknisi 10. Pelaltihan Meubelair 11. Pelatihan Juru Las 12. Pelatihan Software 13. Pelatihan Tata Boga 14. Pelatihan Batik Tulis 15. Pelatihan Bahasa Inggris 1. Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi 1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 4. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				serta Berkembangnya Praktek Protistusi
			7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan 2. Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) 3. Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya 4. Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA 5. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
			8. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 4. Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
			9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2. Penyelenggaraan lomba desa 3. Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD 4. Pendampingan kegiatan TMMD 5. Bantul Ekspo dan karnaval 6. Pengembangan desa siaga 7. Pengembangan Kerjasama Desa
			10. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)
			11. Program pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
			12. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN 2. Pemberdayaan usaha EKONOMI pedesaan 3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
			13. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
			14. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin 2. Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin 3. Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan
			15. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 2. Pendampingan Kegiatan Karang taruna 3. Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			16. Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Updating Keluarga Miskin 2. Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	<p>Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 3. Program pemberdayaan pedagang 4. Program penataan pasar rakyat 5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan 9. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 2. Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah 1. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1. Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat 2. Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI 3. Revitalisasi Pasar Rakyat 4. Insentififikasi Pendapatan Pasar 1. Pelayanan Kemetrologian Daerrah 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2. Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang 3. Peningkatan pelayanan perdagangan 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1. Sosialisasi pengelolaan perijinan 2. Operasional pelayanan perijinan 3. Pendataan dan penetapan perijinan 4. Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan 5. Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan 6. Pengelolaan perijinan online 7. Survei kepuasan masyarakat 8. Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo 9. Lokakarya penanganan pengaduan 10. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan 11. Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan 1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Pengembangan Kewirausahaan
			11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Peningkatan Promosi UMKM
			12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 2. Peningkatan Manajemen Perkoperasian 3. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi 4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA
			13. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2. penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4. Pendampingan dewan pengupahan 5. Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah 6. bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial 7. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 8. Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja 9. Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	1. Program pengembangan kemitraan	1. Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata 2. Pemberdayaan Desa Wisata 3. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
			2. Program pengembangan destinasi pariwisata	1. Pengembangan daerah tujuan wisata 2. Peningkatan daya tarik Wisata 3. Peningkatan Pelayanan Kepariwisata
			3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 4. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata
7	Terciptanya industri kreatif	Cakupan Industri	1. Program potensi energi	1. Pendataan Potensi Energi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
	yang berkualitas	Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 3. Program pengembangan industri kecil dan menengah 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5. Program penataan struktur industri 6. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri 1. Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul 2. Pengembangan dan Pemberdayaan IKM 3. Pengembangan Pemasaran IKM 4. Pengembangan Industri Kreatif 1. Pengembangan Kewirausahaan 1. Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri 1. Pemberdayaan IKM Sentra 2. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	<p>Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)</p> <p>Pertumbuhan produksi tanaman pangan</p> <p>Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura</p> <p>Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan 5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 6. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan 2. Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan 3. Peningkatan Kesehatan Ternak 1. Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah 1. Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran 1. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2. Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan 3. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan 1. Peningkatan Prasarana Pertanian 1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2. Pengembangan Agribisnis Tembakau 3. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan 4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP) 5. Pengendalian dan Perlindungan Tanaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1. Program peningkatan produksi perikanan	6. Pengembangan Agribisnis Pertanian 1. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya 2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan 3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan 4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2. Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan 3. Program Pengendalian Banjir 4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5. Program pengembangan jasa konstruksi 6. Program Pembangunan Gedung 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Lingkungan Sehat Perumahan 9. Program Pengelolaan Area Pemakaman 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 11. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan jalan 1. Pembangunan infrastruktur perdesaan 1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai 1. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Peningkatan Teknologi Informasi 1. Pembangunan Gedung 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2. Penyelenggaraan pengembangan perumahan 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1. Penanganan Kawasan Kumuh 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air 1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah 2. Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				3. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
			13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 3. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	1. Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
			15. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 2. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 3. Pelayanan perijinan di bidang perhubungan 4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
			16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2. Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
			17. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	1. Pengadaan pagar pengaman jalan 2. Pengadaan Flashing Lamp 3. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
			18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
			19. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Pengadaan Prasarana Pendukung PKB
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Kerjasama pengelolaan persampahan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Evaluasi Adipura
			2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pengkajian dampak lingkungan 2. Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup 3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan
			3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				Sumber Air
			4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan 2. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup 5. Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 2. Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2. Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam 3. Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial 4. pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam 5. Pengembangan desa siaga bencana 6. Gladi posko dan gladi lapang 7. Pengembangan budaya sadar bencana 8. Penyelenggaraan posko pengendalian bencana 9. Penguatan kapasitas satgas BPBD 10. Penguatan FPRB 11. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 12. Pembentukan Desa Tangguh Bencana 13. Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 14. Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 15. Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana
			3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relokasi Korban Bencana ALam 2. Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam 3. Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam 4. Rekonstruksi Pasca Bencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Program perencanaan tata ruang	5. Rehabilitasi Pasca Bencana 1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 4. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 5. Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 6. Studi tentang Tata Ruang
			2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
			3. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1. Inventarisasi tanah kas desa 2. Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY 3. Pemanfaatan Tanah SG
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan	1. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
			2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1. Pemantauan orang asing 2. Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis
			3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1. Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan
			4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	1. Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin 2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
			5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah
			6. Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	1. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat
			7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan 2. Pemberdayaan Linmas
			8. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1. Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak 2. Pengembangan Kabupaten Layak Anak 3. Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul
			9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2. Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak 3. Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 4. Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)
			10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	11. Program peningkatan peran serta kepemudaan	kekerasan 2. Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 3. Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
			12. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 2. Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda
			1. Program Pengembangan Nilai Budaya;	1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
			3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2. Pembuatan Film Dokumenter
			2. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda;	1. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 1. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 2. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan 3. Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal 4. Pengelolaan Tata Nilai
5. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	1. Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya 2. Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya 3. Rehab Cagar Budaya			

Sumber : Bappeda, 2020, data diolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Laporan Penyelenggara Program Pemerintahan Daerah
----	-------------------	-------------------------	---

Kabupaten Bantul Tahun 2019

BAB IX PENUTUP



BAB IX

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dibuat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya kewajiban Kepala Daerah dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. LPPD diharapkan juga dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketentuannya.

Laporan ini juga diperlukan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu kekurangan atau kelebihan yang terdapat dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk penyusunan kebijakan terhadap daerah dimasa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Bantul.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan daerah kepada Presiden akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 ini disusun sesuai format dan sistematika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

